



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**



LAPORAN KEUANGAN TA 2022 *AUDITED*

BAGIAN ANGGARAN 067

JI. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan, 12750,
DKI Jakarta

Telp : 021 - 7994372

Kemendes.go.id



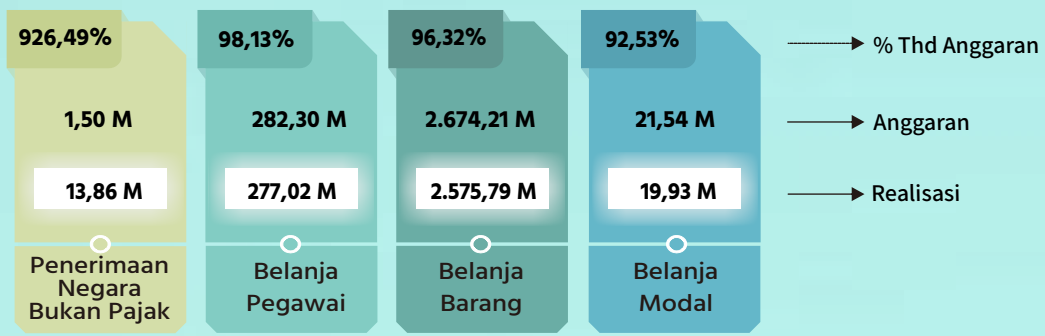
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

2022

AUDITED

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Milyar Rupiah)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja dalam basis kas.



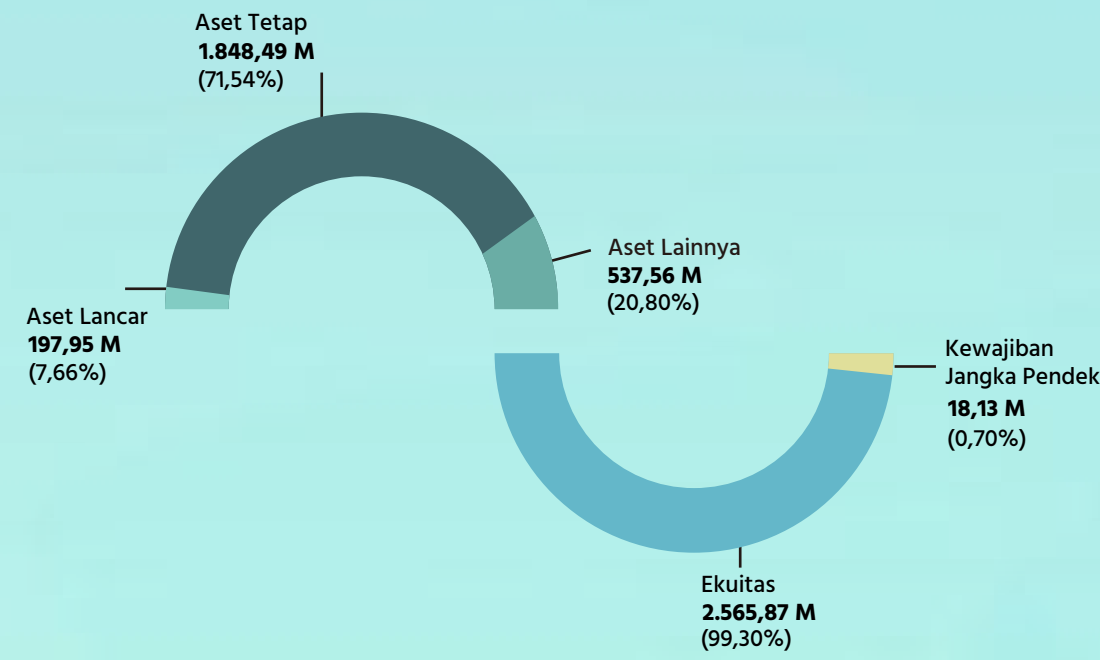
LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional disusun menggunakan basis akrual, menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih dari Pendapatan dengan Beban dari Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non Operasional serta Pos Luar Biasa akan menghasilkan Surplus/Defisit LO yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



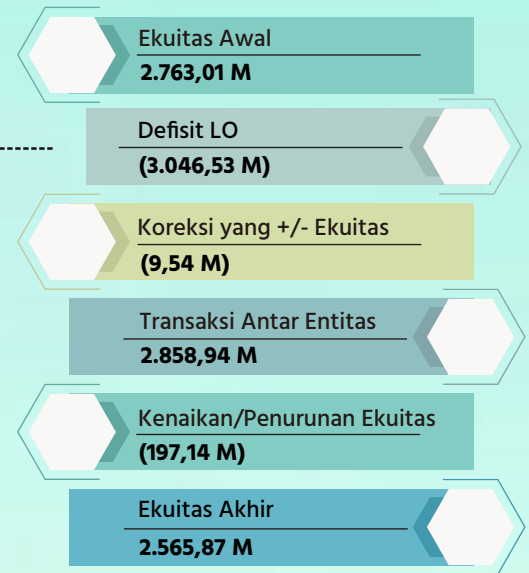
NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per akhir periode pelaporan.



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi saldo ekuitas awal, kenaikan atau penurunan dan saldo akhir ekuitas selama satu periode pelaporan.



Laporan Keuangan Lebih Lengkap



<https://tinyurl.com/LKKEMENDESA2022AUDITED>

Biro Keuangan dan BMN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2022 *Audited* Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan Tahun 2022 *Audited* ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan Tahun 2022 *Audited* ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Disamping itu, Laporan Keuangan Tahun 2022 *Audited* ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2023
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
Sekretaris Jenderal,



Taufik Madjid, S.Sos, M.Si
NIP 19710701 199903 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
Laporan Realisasi Anggaran	3
Neraca	4
Laporan Operasional	5
Laporan Perubahan Ekuitas	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	43
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	81
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	98
F. Pengungkapan Lain-Lain	115
Lampiran	129



**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2023

Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
Republik Indonesia,



Abdul Halim Iskandar

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2022. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13.856.530.978,00 atau mencapai 926 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.495.587.000,00.

Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp2.872.738.025.794,00 atau mencapai 96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.978.047.971.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.583.997.122.115,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp197.950.152.524,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp1.848.490.392.769,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp537.556.576.822,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas, masing-masing sebesar Rp18.127.452.827,00; dan Rp2.565.869.669.288,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.539.735.159,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.995.944.145.169,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.993.404.410.010,00. Defisit Kegiatan Non

Operasional dan Defisit sebelum Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp53.125.347.512,00 dan Rp3.046.529.757.522,00. Tidak ada beban di Pos Luar Biasa sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp3.046.529.757.522,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp2.763.006.771.618,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp3.046.529.757.522,00, ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp9.544.510.321,00 dan transaksi antar entitas senilai total Rp2.858.937.165.513,00 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp2.565.869.669.288,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang profil atau kebijakan teknis, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi dan penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022		REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% Thd Angg	31 Desember 2021
		ANGGARAN	REALISASI			REALISASI
PENDAPATAN	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	1.495.587.000,00	13.856.530.978,00	12.360.943.978,00	926,49	6.340.076.578,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.495.587.000,00	13.856.530.978,00	12.360.943.978,00	926,49	6.340.076.578,00
BELANJA	B.2					
Belanja Operasi						
Belanja Pegawai	B.2.1	282.298.358.000,00	277.016.814.944,00	(5.281.543.056,00)	98,13	253.339.847.313,00
Belanja Barang	B.2.2	2.674.210.722.000,00	2.575.791.053.808,00	(98.419.668.192,00)	96,32	2.647.572.730.238,00
Belanja Modal	B.2.3	21.538.891.000,00	19.930.157.042,00	(1.608.733.958,00)	92,53	46.566.432.484,00
JUMLAH BELANJA		2.978.047.971.000,00	2.872.738.025.794,00	(105.309.945.206,00)	96,46	2.947.479.010.035,00

Jakarta, Mei 2023
 Penanggung Jawab UAPA,
 Menteri Desa Pembangunan Daerah
 Tertinggal dan Transmigrasi Republik
 Indonesia



Abdul Halim Iskandar

II. NERACA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
ASET	C.1		
ASET LANCAR	C.1.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.1	23.500.000,00	10.716.000,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1.2	5.118.500,00	74.353.492,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.1.3	4.861.085.003,00	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.4	766.622.921,00	1.157.977.401,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan pajak	C.1.1.5	(45.526.799,00)	(101.957.578,00)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1.1.6	721.096.122,00	1.056.019.823,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.1.7	-	145.767.100,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.1.8	-	(11.686.710,00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.1.1.9	-	134.080.390,00
Persediaan	C.1.1.10	192.339.352.899,00	185.453.337.428,00
Jumlah Aset Lancar		197.950.152.524,00	186.728.507.133,00
ASET TETAP	C.1.2		
Tanah	C.1.2.1	701.074.345.474,00	701.074.345.474,00
Peralatan dan Mesin	C.1.2.2	411.831.979.599,00	401.220.950.084,00
Gedung dan Bangunan	C.1.2.3	592.704.642.830,00	603.103.929.447,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.1.2.4	840.224.928.086,00	857.833.129.797,00
Aset Tetap Lainnya	C.1.2.5	97.531.882.269,00	115.537.418.571,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.1.2.6	9.581.539.269,00	17.670.622.284,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.1.2.7	(804.458.924.758,00)	(725.372.452.628,00)
Jumlah Aset Tetap		1.848.490.392.769,00	1.971.067.943.029,00
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.1.3		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.3.1	-	30.714.287,00
Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.3.2	-	(1.535.714,00)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.1.3.3	-	29.178.573,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	29.178.573,00
ASET LAINNYA	C.1.4		
Aset Tidak Berwujud	C.1.4.1	20.643.950.764,00	9.304.684.004,00
Aset Lain-Lain	C.1.4.2	1.329.277.877.603,00	1.428.971.979.371,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.1.4.3	(812.365.251.545,00)	(827.967.413.591,00)
Jumlah Aset Lainnya		537.556.576.822,00	610.309.249.784,00
JUMLAH ASET		2.583.997.122.115,00	2.768.134.878.519,00
KEWAJIBAN	C.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.1		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.1.1	17.642.123.060,00	4.356.743.309,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.1.2	461.829.767,00	759.320.242,00
Uang Muka dari KPPN	C.2.1.3	23.500.000,00	10.716.000,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.1.4	-	1.327.350,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		18.127.452.827,00	5.128.106.901,00
JUMLAH KEWAJIBAN		18.127.452.827,00	5.128.106.901,00
EKUITAS	C.3		
Ekuitas	C.3	2.565.869.669.288,00	2.763.006.771.618,00
JUMLAH EKUITAS		2.565.869.669.288,00	2.763.006.771.618,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.583.997.122.115,00	2.768.134.878.519,00

Jakarta, Mei 2023
 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia



Abdul Halim Iskandar

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	2.539.735.159,00	1.899.336.545,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.539.735.159,00	1.899.336.545,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	276.994.678.239,00	253.339.847.313,00
Beban Persediaan	D.3	20.230.031.948,00	25.558.272.980,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.061.299.179.866,00	1.986.396.103.325,00
Beban Pemeliharaan	D.5	43.275.631.168,00	43.154.768.245,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	217.422.659.921,00	223.764.953.002,00
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	220.341.171.932,00	199.388.318.251,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	156.380.571.634,00	165.222.108.471,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	220.461,00	51.191.861,00
JUMLAH BEBAN		2.995.944.145.169,00	2.896.875.563.448,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.993.404.410.010,00)	(2.894.976.226.903,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		(64.776.062.077,00)	(55.661.107.168,00)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		567.621.022,00	209.807.086,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		65.343.683.099,00	55.870.914.254,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		11.650.714.565,00	3.963.083.853,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		11.929.800.525,00	3.963.083.853,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		279.085.960,00	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10	(53.125.347.512,00)	(51.698.023.315,00)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(3.046.529.757.522,00)	(2.946.674.250.218,00)
Pos Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.11	(3.046.529.757.522,00)	(2.946.674.250.218,00)

Jakarta, Mei 2023

Penanggung Jawab UAPA,

Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia

Abdul Halim Iskandar

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
EKUITAS AWAL	E.1	2.763.006.771.618,00	2.739.050.841.674,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.046.529.757.522,00)	(2.946.674.250.218,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(9.544.510.321,00)	29.378.813.812,00
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	3.400.000,00	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	94.310.635,00	(116.816.479,00)
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.5	1.737.140.534,00	26.241.018.426,00
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.6	(11.379.361.490,00)	3.254.611.865,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	2.858.937.165.513,00	2.941.251.366.350,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	(197.137.102.330,00)	23.955.929.944,00
EKUITAS AKHIR	E.7	2.565.869.669.288,00	2.763.006.771.618,00

Jakarta, Mei 2023

Penanggung Jawab UAPA,

Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik

Indonesia



Abdul Halim Iskandar

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

*Dasar
Hukum*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis

*Rencana
Strategis*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka visi dan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan instrument untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan berdasarkan RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga, visi Kementerian

Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah

“Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 terdapat target sasaran strategis tahun 2020 sampai dengan 2024 yaitu:

- a. Berkembangnya status pembangunan desa;
- b. Meningkatnya status perkembangan kawasan Perdesaan;
- c. Menurunnya kemiskinan di pedesaan;
- d. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- e. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma);
- f. Meningkatnya investasi di Perdesaan mendukung transformasi ekonomi;
- g. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal;
- h. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal;
- i. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal
- j. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi;
- k. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatnya daya saing pembangunan desa, pedesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi;
- l. Meningkatnya kapasitas SDM desa dan pedesaan daerah tertinggal dan transmigrasi;
- m. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi
- n. Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif.

Selain itu terdapat Arah Pembangunan Desa Berkelanjutan 2020-2024 yang diimplementasikan berupa program SDGs Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs Desa merupakan role

pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Sebagai entitas pelaporan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan gabungan dari beberapa entitas pelaporan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI), yaitu:

KODE BA ES-1	NAMA ESELON 1
067 02	Inspektorat Jenderal
067 03	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan
067 04	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
067 06	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
067 07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
067.08*	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi*
067 09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
067 10	Sekretariat Jenderal
067.11	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Ket:

(*) Unit Kerja Eselon 1 yang likuidasi namun masih memiliki saldo

Pada awal tahun 2022 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri dari 104 Satker yang terdiri dari 93 satker aktif dan 11 satker inaktif bersaldo (1 satker pada Ditjen PDP dan 10 Satker ex-Ditjen PKTrans) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode BA ES-1	Nama UKE 1	Total Satker
1	06702	Inspektorat Jenderal	1
2	06703	Ditjen PDP	2
3	06704	Ditjen PEID	6
4	06706	Ditjen PPDT	1
5	06707	Ditjen PPKTrans	72
6	06708	Ditjen PKTrans	10
7	06709	BPSDM	10
8	06710	Setjen	1
9	06711	BPI	1
Total			104

Hingga 31 Desember 2022 Satker Inaktif bersaldo sudah tidak ada dan bersaldo 0.

A.2.1. Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional PN I, PN II, PN III, PN V, PN VI.

1. PN I : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pagu anggaran PN I adalah Rp5.665.540.000,00;
2. PN II : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pagu anggaran PN II adalah Rp1.950.475.673.000,00;
3. PN III : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Pagu anggaran PN III adalah Rp147.756.685.000,00;
4. PN V : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pagu anggaran PN V adalah Rp36.082.143.000,00
5. PN VI : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Pagu anggaran PN VI adalah Rp3.178.730.000,00.

A.2.2. Output Strategis K/L

Dalam mendukung arah kebijakan strategis pada periode Tahun Anggaran 2022, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memiliki beberapa output strategis yang ditetapkan sebagai berikut:

No	Program	Sasaran Strategis
1.	Terpenuhinya Indeks Desa yang Berkembang dan Mandiri	Berkembangnya Status Pembangunan Desa
2.	Menurunnya Angka Kemiskinan Desa	Menurunnya Angka Kemiskinan di Perdesaan
3.	Meningkatnya Status BUM Desa yang Berkembang dan Maju	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
4.	Terbentuknya Komitmen Lintas K/L/D dalam Pembangunan Daerah Tertinggal	Meningkatnya Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal
5.	Meningkatnya Daerah Tertinggal yang Potensi Terentaskan sesuai Indeks Ketertinggalan	Berkurangnya Jumlah Daerah Tertinggal
6.	Terpenuhinya Indeks Pembangunan Transmigrasi Berdaya Saing Indeks Kawasan Mandiri yang	Meningkatnya Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi

7.	Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang Berintegritas dan Berkompeten	Meningkatnya Kapasitas SDM Desa dan Perdesaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
----	---	--

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Ekuitas.

SAI terdiri dari dua sub sistem yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Dalam penerapannya baik SAK maupun SIMAK BMN menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI. Sistem ini merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan (GLP).

Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Satker menggunakan Aplikasi SAKTI modul persediaan, aset tetap, dan modul GLP dan terekonsiliasi di Aplikasi MONSAKTI, Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I dan Tingkat Kementerian disusun dengan mengunduh dari Aplikasi MONSAKTI. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022 *Audited* berpedoman pada:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-54/PB/PB.6/2022 tanggal 29 Desember 2022 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2022 (*Unaudited*);

- Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-203/KN/KN.2/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penyusunan Keuangan dan Barang Milik Negara tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2022.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-14/PB/PB.6/2023 tanggal 3 April 2023 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2022 *Audited*.

A.4. Basis Akuntansi

*Basis
Akuntansi*

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang diakui setelah hasil produksi terjual;
 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a). Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b). Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Adapun perhitungan penyisihannya sesuai dengan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dan PMK Nomor 207/PMK.06/2019 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara adalah:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang mengatur bahwa persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang pertama yang keluar.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian kembali selain Tanah.
- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan untuk penyempurnaan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset

Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.

- Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *Semester 1* sesuai mekanisme yang berlaku.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah masa manfaat. Aset Tetap Renovasi (ATR) adalah asset yang berasal dari pengakuan belanja modal atas biaya renovasi asset yang

bukan milik satker. Aset yang direnovasi dapat berupa Gedung dan Bangunan milik satker lain, Kendaraan milik satker lain maupun BMN Lainnya milik satker lain. (PMK Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat).

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di

Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memperoleh alokasi anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal dengan pagu awal sebesar Rp3.104.638.674.000,00 menjadi Rp2.978.047.971.000,00. Terdapat pengurangan anggaran pada sumber dana Rupiah Murni (RM) dan penambahan anggaran Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

Adapun terdapat pengurangan anggaran terdiri dari

- Pemotongan anggaran/Realokasi ke BA BUN Tukin 50% THR dan Gaji ke-13 sebesar Rp9.483.422.000,00 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022 hal Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* Belanja K/L TA 2022
- Pemotongan Sisa Blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp170.565.108.000,00 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 hal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
- Terdapat selisih Rp2.250.628.000,00 yang merupakan anggaran semula dari Satker 690545 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji. Anggaran semula tersebut adalah pergeseran anggaran dari satker lain bukan tambahan anggaran, namun di Laporan Realisasi Anggaran dari SAKTI modul pelaporan tercatat sebagai tambahan anggaran semula.

Penambahan anggaran terdiri dari:

- Hibah Luar Negeri dari *World Bank* untuk program INEY (*Investing in Nutrition and Early Years Project*) sebesar Rp10.736.546.000,00 sesuai surat Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-167/AG/AG.4/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi TA 2022 (Revisi III);
- Hibah Luar Negeri dari *IFAD* untuk program TEKAD (Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu) sebesar Rp3.515.762.000,00 sesuai Surat Direktur Anggaran Bidang PMK a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-239/AG/AG.4/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tambahan *Automatic Adjustment* Belanja dan Revisi Lainnya pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi TA 2022;

- Pinjaman Luar Negeri dari *World Bank* untuk program P3PD (Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa) sebesar Rp16.082.143.000,00 sesuai Surat Direktur Anggaran Bidang PMK a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-394/AG/AG.4/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi TA 2022;
- Pinjaman Luar Negeri dari *World Bank* untuk program P3PD sebesar Rp20.783.282.000,00 sesuai Surat Direktur Anggaran Bidang PMK a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-477/AG/AG.4/2022 tanggal 1 November 2022 hal Pengesahan Revisi Anggaran Buka Blokir *Automatic Adjustment* Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- Hibah Langsung Luar Negeri dari *UNICEF* sebesar Rp4.590.722.000,00 sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor S-8467/WPB.12/2022 tanggal 16 Desember 2022 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan (350456) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Perubahan Anggaran Setelah Revisi
Per Jenis Pendapatan dan Jenis Belanja
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022		
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	KENAIKAN / PENURUNAN
Pendapatan			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	1.495.587.000,00	1.495.587.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan	1.495.587.000,00	1.495.587.000,00	0,00
Belanja			
Belanja Pegawai	297.466.352.000,00	282.298.358.000,00	(15.167.994.000,00)
Belanja Barang	2.795.147.918.000,00	2.674.210.722.000,00	(120.937.196.000,00)
Belanja Modal	12.024.404.000,00	21.538.891.000,00	9.514.487.000,00
Jumlah Belanja	3.104.638.674.000,00	2.978.047.971.000,00	(126.590.703.000,00)

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan belanja pegawai sebesar Rp15.167.994.000,00 yang terdiri atas pengurangan anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp6.315.808.000,00; pengurangan anggaran belanja gaji dan tunjangan Pejabat Negara sebesar

Rp80.000.000,00; pengurangan anggaran belanja lembur sebesar Rp2.025.380.000,00; serta pengurangan anggaran belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito sebesar Rp6.746.806.000,00.

Pengurangan pagu belanja barang sebesar Rp120.937.196.000,00 terdiri atas akumulasi dari penambahan anggaran Belanja Barang Operasional sebesar Rp5.312.000.000,00; pengurangan anggaran Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp359.976.000,00; pengurangan anggaran Belanja Barang Persediaan sebesar Rp732.928.000,00; pengurangan anggaran Belanja Jasa sebesar Rp56.860.174.000,00; penambahan anggaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp3.203.239.000,00; pengurangan anggaran Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp5.998.830.000,00; penambahan anggaran Belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp869.251.000,00; pengurangan anggaran Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp41.955.725.000,00; pengurangan anggaran Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebesar Rp25.685.543.000,00; serta penambahan anggaran Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp1.271.490.000,00.

Penambahan Belanja Modal sebesar Rp9.514.487.000,00 terdiri atas akumulasi dari penambahan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.423.573.000,00; pengurangan anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.607.792.000,00; serta penambahan anggaran Belanja Modal Lainnya sebesar Rp9.698.706.000,00.

Adapun rincian Perubahan Anggaran Belanja Setelah Revisi per Program per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Perubahan Revisi Anggaran Belanja Per Program
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Kode	Program	Anggaran Belanja Semula	Anggaran Belanja Setelah Revisi
WA	Program Dukungan Manajemen	705.073.399.000,00	666.083.224.000,00
CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	2.399.565.275.000,00	2.311.964.747.000,00
Jumlah		3.104.638.674.000,00	2.978.047.971.000,00

Sumber dana program kegiatan berasal dari rupiah murni, pinjaman luar negeri, dan hibah luar negeri. Adapun rincian perubahan revisi anggaran belanja berdasarkan sumber dana dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Perubahan Revisi Anggaran Belanja
Berdasarkan Sumber Dana
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022		
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	KENAIKAN (PENURUNAN) ANGGARAN BELANJA
Rupiah Murni	2.756.470.674.000,00	2.574.171.516.000,00	(182.299.158.000,00)
Pinjaman Luar Negeri	344.000.000.000,00	380.865.425.000,00	36.865.425.000,00
Hibah Luar Negeri	4.168.000.000,00	18.420.308.000,00	14.252.308.000,00
Hibah Langsung Luar Negeri	-	4.590.722.000,00	4.590.722.000,00
Jumlah Anggaran Belanja	3.104.638.674.000,00	2.978.047.971.000,00	(126.590.703.000,00)

Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat anggaran dana pinjaman luar negeri sebesar Rp380.865.425.000,00 yang digunakan untuk program:

1. Program *Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery*/Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Ditjen PDP sebesar Rp16.692.728.000,00 dengan lender *World Bank*;
2. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di BPSDM yang memiliki pagu sebesar Rp113.090.554.000,00;
3. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Sekretariat Jenderal dengan pagu anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00;
4. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di BPI dengan pagu anggaran sebesar Rp36.082.143.000,00;
5. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang sumber pendanaannya adalah Pinjaman dan Hibah Luar Negeri melalui IFAD pada Ditjen PEI-DDTT. Program TEKAD ini menysasar pada 5 (lima) provinsi yaitu Maluku Utara, Maluku, NTT, Papua dan Papua Barat. Tahun Anggaran 2021 dari Pinjaman Luar Negeri pada kegiatan TEKAD ini memiliki anggaran pagu belanja sebesar Rp200.000.000.000,00.

Hibah luar negeri sebesar Rp18.420.308.000,00 yang digunakan untuk program:

1. Program *Investing In Nutrition Early Years (INEY) Strengthening Capacity for Village Convergence Program* di Ditjen PDP dengan tujuan memfasilitasi desa dalam program konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa. Program ini bersumber dari Hibah Luar Negeri melalui *World Bank* sebesar Rp10.736.546.000,00;

2. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang sumber pendanaannya adalah Pinjaman dan Hibah Luar Negeri melalui IFAD. Tahun Anggaran 2022 Hibah Luar Negeri pada kegiatan TEKAD ini memiliki anggaran pagu belanja sebesar Rp7.683.762.000,00.

Hibah langsung luar negeri sebesar Rp4.590.722.000,00 yang digunakan untuk program:

1. Program *Out Of School Children Proggame* yang merupakan hibah dari UNICEF terdapat pada Ditjen PDP.

B.1 Pendapatan

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi
Pendapatan
Rp13.856.530.
978,00

Realisasi Pendapatan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.856.530.978,00 atau mencapai 926,49% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.495.587.000,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022 Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

No	Uraian Akun	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	% Realisasi Anggaran
<i>Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha</i>				
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0,00	406.793.680,00	100,00
2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	549.563.447,00	100,00
3	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	18.057.575,00	100,00
4	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.495.587.000,00	1.300.528.235,00	86,96
<i>Pendapatan Kesehatan, Pertindungan Sosial, Keagamaan</i>				
5	Pendapatan dari BPJS Kesehatan		335.200,00	100,00
<i>Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, Pengelolaan Keuangan</i>				
6	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	88.514.287,00	100,00
<i>Pendapatan Denda</i>				
7	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	140.262.912,00	100,00
<i>Pendapatan Lain-Lain</i>				
8	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0,00	1.771.250.330,00	100,00
9	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0,00	8.866.808.959,00	100,00
10	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0,00	304.700.014,00	100,00
11	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	54.705.300,00	100,00
12	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN	0,00	309.090.909,00	100,00
13	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	45.920.130,00	100,00
Jumlah		1.495.587.000,00	13.856.530.978,00	926,49

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (pendapatan dengan menggunakan tarif) dengan estimasi pendapatan sebesar Rp1.495.587.000,00, per 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp1.300.528.235,00 atau 86,96%. Pendapatan tersebut terdapat pada Sekretariat Jenderal yang merupakan pendapatan hasil sewa Gedung Balai Makarti dan Gedung-Gedung di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (Kantin, Koperasi, Bank, Lahan Parkir).

Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2022 sebagian besar berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 terdapat kenaikan sebesar 117,08 persen. Kenaikan pendapatan daripada tahun 2021 dari pengelolaan BMN ada pada pendapatan hasil sewa Gedung Balai Makarti dikarenakan sudah turunnya status PPKM sehingga meningkatkan penyewaan Gedung Balai Makarti. Kenaikan juga terdapat pada penyelesaian ganti kerugian Negara.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Estimasi Pendapatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	1.495.587.000,00	2.274.942.937,00	1.475.721.644,00	54,16
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	0,00	276.997.097,00	(100,00)
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	0,00	335.200,00	0,00	-
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	88.514.287,00	25.051.370,00	253,33
Pendapatan Denda	0,00	140.262.912,00	251.595.418,00	(44,25)
Pendapatan Lain-lain	0,00	11.352.475.642,00	4.310.711.049,00	163,36
Jumlah	1.495.587.000,00	13.856.530.978,00	6.340.076.578,00	118,55

Rincian Jenis Pendapatan sesuai Akun Pendapatan 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Jenis Pendapatan Sesuai Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	Estimasi Pendapatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% NAIK (TURUN)
	Pendapatan PNPB Lainnya				
4251	Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, tanah dan/atau lainnya				
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0,00	406.793.680,00	526.976.180,00	(22,81)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	549.563.447,00	209.807.086,00	161,94
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	18.057.575,00	0,00	-
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.495.587.000,00	1.300.528.235,00	738.938.378,00	76,00
4256	Pendapatan Jasa Lainnya				
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	0,00	276.997.097,00	(100,00)
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Keagamaan				
425311	Pendapatan dari BPJS Kesehatan	0,00	335.200,00	0,00	-
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan				
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	0,00	13.142,00	(100,00)
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	0,00	88.514.287,00	17.000.000,00	420,67
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	0,00	0,00	8.038.228,00	(100,00)
4258	Pendapatan Denda				
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	140.262.912,00	251.595.418,00	(44,25)
4259	Pendapatan Lain-Lain				
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0,00	1.771.250.330,00	65.677.190,00	2.596,90
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0,00	8.866.808.959,00	3.803.043.285,00	133,15
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0,00	304.700.014,00	226.267.165,00	34,66
425931	Pendapatan dari jasa utang Non Litbang Lainnya	0,00	54.705.300,00	29.930.000,00	82,78
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	0,00	3.992.552,00	(100,00)
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN	0,00	309.090.909,00	0,00	-
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	45.920.130,00	181.800.857,00	(74,74)
	Jumlah	1.495.587.000,00	13.856.530.978,00	6.340.076.578,00	118,55

Realisasi Anggaran Pendapatan pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Realisasi Anggaran Pendapatan Pada UKE-1
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Kode	Eselon I	Estimasi	Realisasi	% Realisasi Anggaran
067.02	Inspektorat Jenderal	0,00	108.450.299,00	-
067.03	Ditjen PDP	0,00	935.147.078,00	-
067.04	Ditjen PEID	0,00	3.749.439.858,00	-
067.06	Ditjen PPDT	0,00	1.436.198.994,00	-
067.07	Ditjen PPKTrans	0,00	2.167.210.704,00	-
067.09	BPSDM	0,00	1.402.351.409,00	-
067.10	Sekretariat Jenderal	1.495.587.000,00	2.920.867.097,00	195,30
067.11	BPI	0,00	1.136.865.539,00	-
	JUMLAH	1.495.587.000,00	13.856.530.978,00	926,49

B.2 Belanja

*Realisasi
Belanja
Rp2.872.738.0
25.794,00*

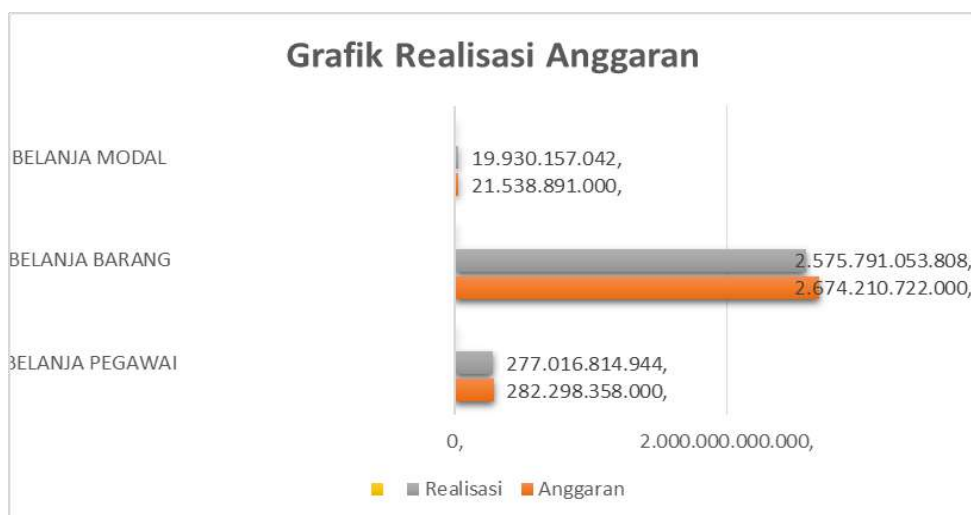
Realisasi Belanja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.872.738.025.794,00 atau 96,46 persen dari anggaran belanja sebesar Rp2.978.047.971.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Pegawai	282.298.358.000,00	280.122.388.610,00	99,23
Belanja Barang	2.674.210.722.000,00	2.581.663.735.089,00	96,54
Belanja Modal	21.538.891.000,00	19.930.157.042,00	92,53
Total Belanja Bruto	2.978.047.971.000,00	2.881.716.280.741,00	96,77
Pengembalian Belanja	0,00	8.978.254.947,00	-
Total Belanja Netto	2.978.047.971.000,00	2.872.738.025.794,00	96,46

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan Rincian Anggaran dan Realisasi belanja berdasarkan program Per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Anggaran dan Belanja Berdasarkan Program
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Kode	Program	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
WA	Program Dukungan Manajemen	666.083.224.000,00	657.948.328.903,00
CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	2.311.964.747.000,00	2.214.789.696.891,00
Jumlah		2.978.047.971.000,00	2.872.738.025.794,00

Adapun realisasi belanja berdasarkan sumber dana kegiatan pada 31 Desember 2022 di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Anggaran dan Belanja Berdasarkan Sumber Dana
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Jenis Sumber Dana	31 Desember 2022		% Realisasi
	Anggaran	Realisasi	
Rupiah Murni	2.574.171.516.000,00	2.554.958.003.686,00	99,25
Pinjaman Luar Negeri	380.865.425.000,00	296.583.013.279,00	77,87
Hibah Luar Negeri	18.420.308.000,00	16.606.287.714,00	90,15
Hibah Langsung Luar Negeri	4.590.722.000,00	4.590.721.115,00	100,00
JUMLAH	2.978.047.971.000,00	2.872.738.025.794,00	96,46

Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,84 persen dibandingkan Tahun 2021. Rincian perbandingan Realisasi Belanja Netto per jenis Belanja Per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Netto per jenis Belanja
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		KENAIKAN (PENURUNAN) %
		31 Desember 2022	31 Desember 2021	
Belanja Pegawai	282.298.358.000,00	277.016.814.944,00	253.339.847.313,00	9,35
Belanja Barang	2.674.210.722.000,00	2.575.791.053.808,00	2.647.572.730.238,00	(2,71)
Belanja Modal	21.538.891.000,00	19.930.157.042,00	46.566.432.484,00	(57,20)
Jumlah	2.978.047.971.000,00	2.872.738.025.794,00	2.947.479.010.035,00	(2,54)

B.2.1 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai
Rp277.016.814.944,00*

Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai

imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp277.016.814.944,00 dan Rp253.339.847.313,00 atau terjadi kenaikan sebesar 9,35 persen dari tahun 2021.

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2022 mencapai 98,13 persen dari anggaran belanja sebesar Rp282.298.358.000,00.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Per 31 Desember 2022 masing-masing Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per UKE-1
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Kode	Eselon I	Anggaran	Realisasi	% Realisas
067.02	Inspektorat Jenderal	20.192.637.000,00	19.957.342.498,00	98,83
067.03	Ditjen PDP	32.885.798.000,00	31.935.114.782,00	97,11
067.04	Ditjen PEID	29.772.261.000,00	29.387.719.108,00	98,71
067.06	Ditjen PPDT	27.126.481.000,00	25.744.607.887,00	94,91
067.07	Ditjen PPKTrans	38.289.684.000,00	37.684.285.999,00	98,42
067.09	BPSDM	61.769.169.000,00	61.015.419.025,00	98,78
067.10	Sekretariat Jenderal	48.785.490.000,00	47.965.972.771,00	98,32
067.11	BPI	23.476.838.000,00	23.326.352.874,00	99,36
	JUMLAH	282.298.358.000,00	277.016.814.944,00	98,13

Perbandingan rincian realisasi Belanja Pegawai Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Anggaran	REALISASI 31 Desember 2022 (Netto)	REALISASI 31 Desember 2021 (Netto)	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	154.762.009.000,00	150.381.932.376,00	144.598.705.013,00	4,00
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	390.000.000,00	373.405.000,00	427.905.000,00	(12,74)
Belanja Lembur	1.125.244.000,00	1.010.075.000,00	625.351.000,00	61,52
Belanja Tunjangan Khusus & Pegawai Transito	126.021.105.000,00	125.251.402.568,00	107.687.886.300,00	16,31
Jumlah Belanja Netto	282.298.358.000,00	277.016.814.944,00	253.339.847.313,00	9,35

Terdapat kenaikan belanja pegawai dikarenakan adanya penambahan jumlah pegawai dari perekrutan CPNS baru tahun 2022.

Terdapat kenaikan yang signifikan pada akun belanja lembur dibandingkan tahun 2021 disebabkan adanya kebijakan WFO 100% sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan di luar jam kerja dikerjakan di kantor.

B.2.2 Belanja Barang

Belanja
Barang
Rp2.575.791.0
53.808,00

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau Jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 2.575.791.053.808,00 dan Rp2.647.572.730.238,00 atau terjadi penurunan sebesar 2,71 persen dibandingkan tahun 2021. Penurunan realisasi belanja barang tahun 2022 dikarenakan turunnya anggaran belanja barang dari kebijakan *automatic adjustment* yang berdampak pemotongan anggaran.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 mencapai 96,32 persen dari anggaran belanja barang Tahun 2022 sebesar Rp2.674.210.722.000,00.

Belanja Barang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2022 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Barang pada UKE-I
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Kode	Eselon I	Anggaran	Realisasi	Realisasi %
067.02	Inspektorat Jenderal	18.802.479.000,00	18.213.854.355,00	96,87
067.03	Ditjen PDP	139.872.760.000,00	136.304.603.201,00	97,45
067.04	Ditjen PEID	281.336.490.000,00	212.721.481.468,00	75,61
067.06	Ditjen PPDT	41.709.482.000,00	40.899.523.769,00	98,06
067.07	Ditjen PPKTrans	242.056.597.000,00	238.187.076.022,00	98,40
067.09	BPSDM	1.711.104.417.000,00	1.695.820.823.259,00	99,11
067.10	Sekretariat Jenderal	157.864.876.000,00	157.323.157.143,00	99,66
067.11	BPI	81.463.621.000,00	76.320.534.591,00	93,69
JUMLAH		2.674.210.722.000,00	2.575.791.053.808,00	96,32

Adapun perbandingan Belanja Barang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Per 31 Desember 2022 dan 2021 per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Belanja Barang per Jenis Belanja
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Anggaran	REALISASI 31 Desember 2022 (Netto)	REALISASI 31 Desember 2021 (Netto)	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	113.092.650.000,00	111.172.242.400,00	112.050.605.788,00	(0,78)
Belanja Barang Non Operasional	117.034.287.000,00	103.193.204.855,00	172.799.069.777,00	(40,28)
Belanja Barang Persediaan	21.508.122.000,00	20.038.627.368,00	25.440.438.628,00	(21,23)
Belanja Jasa	1.876.582.628.000,00	1.848.937.027.916,00	1.779.259.902.391,00	3,92
Belanja Pemeliharaan	43.928.925.000,00	43.626.108.111,00	43.356.884.145,00	0,62
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	247.710.113.000,00	215.526.989.125,00	223.764.953.002,00	(3,68)
Belanja Perjalanan Luar negeri	2.114.773.000,00	1.895.670.796,00	0,00	-
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	112.528.133.000,00	92.862.198.386,00	153.516.702.895,00	(39,51)
Belanja Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	103.739.586.000,00	102.710.238.043,00	76.113.518.156,00	34,94
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	35.971.505.000,00	35.828.746.808,00	61.270.655.456,00	(41,52)
Jumlah Belanja	2.674.210.722.000,00	2.575.791.053.808,00	2.647.572.730.238,00	(2,71)

B.2.3 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp19.930.157.042,00*

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan Aset Tetap dan/atau aset lainnya atau menambah nilai Aset Tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp19.930.157.042,00 dan Rp46.566.432.484,00 atau mengalami penurunan sebesar 57,20 persen dibandingkan dengan Tahun 2021. Penurunan realisasi belanja modal tahun 2022 dikarenakan turunnya anggaran belanja modal dari kebijakan *automatic adjustment* yang berdampak pemotongan anggaran.

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2022 mencapai 92,53 persen dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp21.538.891.000,00.

Adapun Rincian Belanja Modal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2022 pada masing-masing Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Modal per Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Kode	Unit Kerja Eselon I	Anggaran	Realisasi	%Realisasi Anggaran
067.02	Inspektorat Jenderal	1.796.687.000,00	1.795.736.690,00	99,95
067.03	Ditjen PDP	2.249.038.000,00	1.268.996.910,00	56,42
067.04	Ditjen PEID	126.400.000,00	126.359.100,00	99,97
067.06	Ditjen PPDT	0,00	0,00	-
067.07	Ditjen PPKTrans	1.458.005.000,00	1.453.710.670,00	99,71
067.09	BPSDM	10.009.022.000,00	9.398.644.198,00	93,90
067.10	Sekretariat Jenderal	3.896.608.000,00	3.883.656.574,00	99,67
067.11	BPI	2.003.131.000,00	2.003.052.900,00	100,00
	JUMLAH	21.538.891.000,00	19.930.157.042,00	92,53

Adapun Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Per Jenis Belanja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Jenis Belanja
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Anggaran	REALISASI 31 Desember 2022 (Netto)	REALISASI 31 Desember 2021 (Netto)	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	10.000.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.607.897.000,00	9.590.387.346,00	24.636.785.603,00	(61,07)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.288.000,00	198.288.000,00	3.839.695.756,00	(94,84)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	7.070.375.900,00	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	11.732.706.000,00	10.141.481.696,00	11.009.575.225,00	(7,88)
Jumlah Belanja	21.538.891.000,00	19.930.157.042,00	46.566.432.484,00	(57,20)

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

*Belanja
Modal Tanah
Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp10.000.000,00. Tidak terdapat anggaran belanja modal tanah pada tahun 2022.

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin
Rp9.590.387.346,00*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp9.590.387.346,00 dan Rp24.636.785.603,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 61,07 persen dibandingkan 31 Desember 2021. Penurunan realisasi belanja modal tahun 2022 dikarenakan turunnya anggaran

belanja modal dibanding tahun 2021 sehingga realisasi turun.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 mencapai 99,82 persen dari anggaran belanja peralatan dan mesin sebesar Rp9.607.897.000,00.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 31 Desember 2022 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Kode	Unit Kerja Eselon I	Anggaran	Realisasi	%Realisasi Anggaran
067.02	Inspektorat Jenderal	1.796.687.000,00	1.795.736.690,00	99,95
067.03	Ditjen PDP	600.000.000,00	597.621.910,00	99,60
067.04	Ditjen PEID	126.400.000,00	126.359.100,00	99,97
067.07	Ditjen PPKTrans	1.454.005.000,00	1.453.710.670,00	99,98
067.09	BPSDM	1.057.456.000,00	1.056.385.900,00	99,90
067.10	Sekretariat Jenderal	3.799.608.000,00	3.786.909.676,00	99,67
067.11	BPI	773.741.000,00	773.663.400,00	99,99
	JUMLAH	9.607.897.000,00	9.590.387.346,00	99,82

Realisasi belanja modal peralatan mesin tersebut merupakan realisasi anggaran belanja modal (532111) sebagian besar untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Operasional Kantor seperti alat elektronik, *furniture* untuk mendukung kegiatan operasional pegawai.

Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Anggaran	REALISASI	REALISASI	NAIK (TURUN) %
		31 Desember 2022 (Netto)	31 Desember 2021 (Netto)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.607.897.000,00	9.590.387.346,00	24.636.785.603,00	(61,07)
Jumlah Belanja	9.607.897.000,00	9.590.387.346,00	24.636.785.603,00	(61,07)

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja
Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp198.288.000,
0,00*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp198.288.000,00 dan Rp3.839.695.756,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 94,84 persen dibandingkan 31 Desember 2021.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 mencapai 100 persen dari anggaran belanja sebesar Rp198.288.000,00.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada 31 Desember 2022 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Kode	Unit Kerja Eselon I	Anggaran	Realisasi	%Realisasi Anggaran
067.09	BPSDM	198.288.000,00	198.288.000,00	100,00
JUMLAH		198.288.000,00	198.288.000,00	100,00

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan berupa penambahan nilai gedung dan bangunan pada Balai PPMDDT Banjarmasin.

Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Realisasi
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Anggaran	REALISASI 31 Desember 2022 (Netto)	REALISASI 31 Desember 2021 (Netto)	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	2.053.338.762,00	(100,00)
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	17.514.777,00	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	198.288.000,00	198.288.000,00	1.768.842.217,00	(88,79)
Jumlah Belanja	198.288.000,00	198.288.000,00	3.839.695.756,00	(94,84)

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja
Modal JIJ
Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.070.375.900,00. Tidak terdapat anggaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun 2022.

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

*Belanja
Modal
Lainnya
Rp10.141.481.
696,00*

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp10.141.481.696,00 dan Rp11.020.012.613,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 7,88 persen dibandingkan 31 Desember 2021.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 mencapai 86,44 persen dari anggaran Belanja Modal Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp11.732.706.000,00.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi per 31 Desember 2022 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Kode	Eselon I	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
067.03	Ditjen PDP	1.649.038.000,00	671.375.000,00	40,71
067.07	Ditjen PPKTrans	4.000.000,00	0,00	0,00
067.09	BPSDM	8.753.278.000,00	8.143.970.298,00	93,04
067.10	Sekretariat Jenderal	97.000.000,00	96.746.898,00	99,74
067.11	BPI	1.229.390.000,00	1.229.389.500,00	100,00
JUMLAH		11.732.706.000,00	10.141.481.696,00	86,44

Belanja Modal Lainnya pada Ditjen PDP senilai Rp671.375.000,00 digunakan untuk pengadaan *software* atas pengembangan aplikasi *eHDW*; Belanja Modal Lainnya pada BPSDM senilai Rp8.143.970.298,00 digunakan untuk penambahan nilai aset lainnya yaitu Aset Tetap Renovasi dan Aset Tak Berwujud (*software*); Belanja Modal Lainnya pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp96.746.898,00 merupakan pembelian Buku Perpustakaan; Belanja Modal Lainnya pada BPI sebesar Rp1.229.389.500,00 merupakan pengembangan aplikasi Monev Dana Desa, Indeks Desa Membangun, Desa Wisata Nusantara, dan Sistem Informasi Desa.

Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Anggaran	REALISASI 31 Desember 2022 (Netto)	REALISASI 31 Desember 2021 (Netto)	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	11.732.706.000,00	10.141.481.696,00	1.740.856.124,00	482,56
Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	6.467.852.511,00	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0,00	0,00	2.800.866.590,00	-
Jumlah Belanja	11.732.706.000,00	10.141.481.696,00	11.009.575.225,00	(7,88)

B.3 Catatan Penting Lainnya – Bagian LRA

B.3.1 Penjelasan Capaian Output Strategis K/L

Selama periode Tahun Anggaran 2022, output strategis yang telah dicapai oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut:

- 1) Program Terpenuhinya Indeks Desa yang Berkembang dan Mandiri memiliki output strategis berupa: Berkembangnya status Pembangunan Desa. Secara rinci output atas Program Terpenuhinya Indeks Desa yang Berkembang dan Mandiri dapat dilihat pada table berikut:

No	Uraian Output	Anggaran	Realisasi	%	Target Keluaran	Realisasi
1	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	2.477.500.000,00	2.471.692.437,00	99,77%	74.961 Desa	74.961 Desa
2	Pembangunan Pasar untuk mendukung Prukades dan Kegiatan Ekonomi	10.700.000.000,00	10.683.036.094,00	99,84%	20 Unit	20 Unit
3	Desa Wisata yg Dibangun	46.250.000.000,00	45.972.457.917,00	99,40%	101 Unit	100 Unit

Program Menurunnya Angka Kemiskinan Desa memiliki output strategis berupa: Menurunnya Angka Kemiskinan di Perdesaan. Secara rinci output atas Program Menurunnya Angka Kemiskinan Desa dapat dilihat pada table berikut:

No	Uraian Output	Anggaran	Realisasi	%	Target Keluaran	Realisasi
1	Masyarakat yg Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Stunting (INEY)	15.327.268.000,00	13.970.863.093,00	91,15%	22.500 Orang	22.500 Orang
2	Desa yg Mendapatkan Penanganan Konvergensi Stunting	674.417.000,00	673.812.005,00	99,91%	100 Kelompok Masyarakat	160 Kelompok

- 2) Program Meningkatnya Status BUM Desa yang Berkembang dan Maju memiliki output strategis berupa: Terevitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Secara rinci output atas Program Meningkatnya Status BUM Desa yang Berkembang dan Maju dapat dilihat pada table berikut:

No	Uraian Output	Anggaran	Realisasi	%	Target Keluaran	Realisasi
1	Fasilitasi Pengembangan BUMDesa Bersama	7.025.000.000,00	7.023.310.981,00	99,98%	72 BUMDes	72 BUMDes
2	Pengembangan BUMDesa	26.750.000.000,00	26.698.145.783,00	99,81%	500 BUMDes	499 BUMDes

- 3) Program Terbangunnya Komitmen Lintas K/L/D dalam Pembangunan

Daerah Tertinggal memiliki output strategis berupa: Meningkatnya rata-rata IPM di Daerah Tertinggal. Secara rinci output atas Program Terbangunnya Komitmen Lintas K/L dalam Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada table berikut:

No	Uraian Output	Anggaran	Realisasi	%	Target Keluaran	Realisasi
1	RAN PPDT 2023 yg Disusun	1.725.840.000,00	1.718.862.746,00	99,60%	3 Kebijakan	3 Kebijakan

- 4) Program Meningkatnya Daerah Tertinggal yang Potensi Terentaskan sesuai dengan Indeks Ketertinggalan memiliki output strategis berupa: Berkurangnya Jumlah Daerah Tertinggal. Secara rinci output atas Program Meningkatnya Daerah Tertinggal yang Potensi Terentaskan sesuai dengan Indeks Ketertinggalan dapat dilihat pada table berikut:

No	Uraian Output	Anggaran	Realisasi	%	Target Keluaran	Realisasi
1	Masyarakat di Daerah Tertinggal yg Ditingkatkan Kapasitasnya	4.848.391.000,00	4.815.488.608,00	99,32%	850 orang	812 orang
2	Pilot Project Jalan Strategis Desa yg Ditingkatkan di Kawasan Perbatasan	2.421.414.000,00	2.421.404.780,00	100,00%	1,05 km	1,00 km

- 5) Program Terpenuhinya Indeks Pembangunan Kawasan Transmigrasi Mandiri dan Berdaya Saing memiliki output strategis berupa: Meningkatnya status Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi. Secara rinci output atas Program Terpenuhinya Indeks Pembangunan Kawasan Transmigrasi Mandiri dan Berdaya Saing dapat dilihat pada table berikut:

No	Uraian Output	Anggaran	Realisasi	%	Target Keluaran	Realisasi
1	Sarana Perumahan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	2.750.532.000	2.700.699.200	98,19%	54 Unit	21 Unit
2	Sarana Perumahan yang direhab di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	425.577.000	424.843.480	99,83%	15 Unit	10 Unit
3	Sarana Perumahan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	8.813.015.000	8.800.454.197	99,86%	58 Unit	43 Unit
4	Sarana Air Bersih yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	1.269.221.000	1.265.407.508	99,70%	73 Unit	56 Unit
5	Sarana Air Bersih yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	283.564.000	283.347.730	99,92%	4 Unit	4 Unit
6	Sarana Air Bersih yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	449.012.000	446.685.140	99,48%	4 Unit	4 Unit
7	Sarana Air Bersih yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	3.131.170.000	3.113.921.700	99,45%	63 Unit	20 Unit
8	Sarana Air Bersih yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	228.707.000	227.348.968	99,41%	7 Unit	3 Unit
9	Sistem Drainase yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	7.827.572.000	7.505.502.000	95,89%	26,4 Km	27 Km
10	Sistem Drainase yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	1.707.362.000	1.605.821.218	94,05%	2 Km	2 Km
11	Sistem Drainase yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	268.962.000	267.815.200	99,57%	3 Km	2 Km
12	Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	16.705.523.000	15.660.259.746	93,74%	33,3 Km	16 Km
13	Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	3.751.724.000	3.738.393.472	99,64%	15,98 Km	20 Km
14	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	5.863.462.000	5.846.140.067	99,70%	14,524 Km	4 Km
15	Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan	1.417.424.000	1.417.422.540	100,00%	3 Km	2 Km
16	Jembatan yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	8.032.889.000	7.536.579.608	93,82%	420,1 m	278 m
17	Jembatan yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	5.197.443.000	5.196.281.636	99,98%	66 m	26 m
18	Jembatan yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi	2.471.285.000	2.462.091.760	99,63%	110 m	40 m
19	Jembatan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan	42.898.000	31.014.285	72,30%	8 m	8 m

- 6) Program Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang Berintegritas dan Berkompeten memiliki output strategis berupa: Meningkatnya Kapasitas SDM Desa dan Perdesaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Secara rinci output atas Program Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang Berintegritas dan Berkompeten dapat dilihat pada table berikut:

No	Uraian Output	Anggaran	Realisasi	%	Target Keluaran	Realisasi
1	Pelaksanaan Pendampingan Desa	1.528.871.656.000,00	1.522.695.702.488,00	99,60%	3.500 Orang	34.705 Orang

B.3.2 Pengungkapan Terkait Program Penanganan Pandemi COVID-19

Adapun belanja barang untuk penanganan Pandemi Covid-19 oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Belanja Barang untuk Penanganan Covid-19
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian Akun	Anggaran	Realisasi	Realisasi %
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	6.376.800.000,00	6.226.918.204,00	97,65
521241	Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	340.831.000,00	231.332.000,00	67,87
522192	Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	2.453.362.000,00	1.610.118.719,00	65,63
524115	Belanja Perjalanan Dinas- Penanganan Pandemi COVID-19	13.884.000,00	13.877.900,00	99,96
JUMLAH		9.184.877.000,00	8.082.246.823,00	88,00

Akun-akun khusus penanganan Pandemi Covid-19 ini dianggarkan sesuai surat dirjen perbendaharaan No. S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19. Akun-akun khusus ini digunakan oleh Satker-Satker di lingkup Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk Penanganan Covid (PC).

Adapun rincian realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan akun khusus Penanganan Pandemi Covid-19 pada masing-masing Unit Kerja Eselon I per 31 Desember 2022 dijelaskan pada tabel berikut:

*Rincian Realisasi Belanja Barang untuk Penanganan Covid-19 dengan akun khusus pada masing-masing UKE-I
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

UKE-1	521131	521241	522192	524115
Itjen	315.055.670,00	0,00	63.702.000,00	0,00
PDP	21.298.833,00	0,00	79.140.029,00	0,00
PEID	1.063.141.658,00	0,00	431.021.813,00	0,00
PPDT	104.146.000,00	38.490.000,00	125.880.089,00	0,00
PPKTrans	2.849.243.038,00	169.684.000,00	61.600.344,00	13.877.900,00
BPSDM	1.325.180.186,00	23.158.000,00	438.048.914,00	0,00
Sekjen	386.020.319,00	0,00	320.264.617,00	0,00
BPI	162.832.500,00	0,00	90.460.913,00	0,00
JUMLAH	6.226.918.204,00	231.332.000,00	1.610.118.719,00	13.877.900,00

Berdasarkan tabel belanja barang untuk penanganan Pandemi Covid-19 oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) telah mencapai 97,65 persen per 31 Desember 2022 digunakan untuk pembelian masker, *handsanitizer*, penyemprotan disinfektan, pembelian vitamin;
- Realisasi Belanja Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 (521241) telah mencapai 67,87 persen per 31 Desember 2022 digunakan untuk pembelian pulsa atau paket data internet pegawai rutin per bulan, biaya konsumsi petugas penyemprot;
- Realisasi Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19 (522192) telah mencapai 65,63 persen per 31 Desember 2022 digunakan untuk *Swab Test* antigen, *swab Test PCR*, Penyemprotan disinfektan dengan pihak ketiga, dan Honor Narasumber dan moderator video *conference* pada seluruh satker.
- Realisasi belanja perjalanan dinas-penanganan Pandemi Covid-19 (521841) telah mencapai 93,48 persen.

B.3.3 Pengungkapan Terkait Prioritas Nasional Tahun 2022

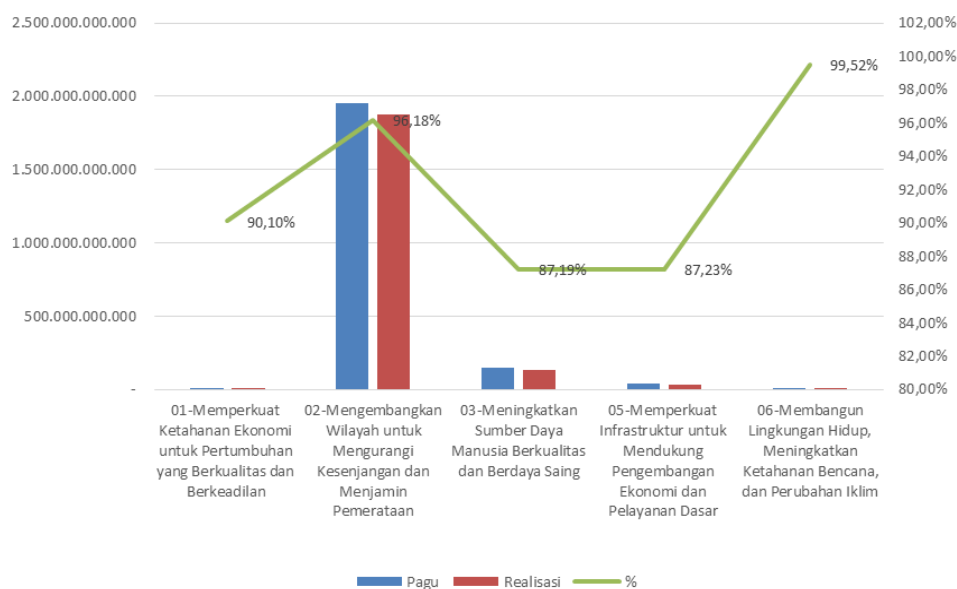
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional PN I, PN II, PN III, PN V, PN VI.

1. PN I : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pagu anggaran PN I adalah Rp5.665.540.000,00;
2. PN II : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pagu anggaran PN II adalah Rp1.950.475.673.000,00;
3. PN III : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Pagu anggaran PN III adalah Rp147.756.685.000,00;
4. PN V : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pagu anggaran PN V adalah Rp36.082.143.000,00
5. PN VI : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Pagu anggaran PN VI adalah Rp3.178.730.000,00.

Data realisasi Program Prioritas Nasional dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Kode PN	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi %
PN I	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	5.665.540.000,00	5.104.371.202,00	90,10
PN II	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1.950.475.673.000,00	1.875.895.080.607,00	96,18
PN III	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	147.756.685.000,00	128.828.214.820,00	87,19
PN V	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	36.082.143.000,00	31.475.215.505,00	87,23
PN VI	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	3.178.730.000,00	3.163.339.918,00	99,52
JUMLAH		2.139.980.041.000,00	2.044.466.222.052,00	95,54

Komposisi anggaran dan realisasi Program Prioritas Nasional dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Adapun capaian kegiatan Prioritas Nasional RKP 2022 pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per rincian output terlampir pada laporan ini.

C. Penjelasan Atas Pos – Pos Neraca

C.1 Aset

C.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar sebesar Rp197.950.152.524,00

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp197.950.152.524,00 dan Rp186.728.507.133,00. Rincian Aset Lancar per akun disajikan sebagai berikut:

Rincian Aset Lancar per Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Aset Lancar	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Kas di Bendahara Pengeluaran	23.500.000,00	10.716.000,00	119,30%
Kas Lainnya dan Setara Kas	5.118.500,00	74.353.492,00	-93,12%
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	4.861.085.003,00	-	100,00%
Piutang Bukan Pajak	766.622.921,00	1.157.977.401,00	-33,80%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(45.526.799,00)	(101.957.578,00)	-55,35%
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	721.096.122,00	1.056.019.823,00	-31,72%
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	145.767.100,00	-100,00%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	(11.686.710,00)	-100,00%
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	-	134.080.390,00	-100,00%
Persediaan	192.339.352.899,00	185.453.337.428,00	3,71%
Jumlah	197.950.152.524,00	186.728.507.133,00	6,01%

C.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp23.500.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp23.500.000,00 dan

Rp10.716.000,00 dengan rincian per Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per UKE-I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

UKE I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Ditjen PPKTrans	21.000.000,00	10.716.000,00	95,97%
BPSDM	2.500.000,00	-	100,00%
Jumlah	23.500.000,00	10.716.000,00	119,30%

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Ditjen PPKTrans dan BPSDM dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Saldo Kas di bendahara pengeluaran pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp 21.000.000,00 terdapat di Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Fak – Fak merupakan keterlambatan dalam penyetoran sisa UP/TUP tahun 2022 sudah disetorkan kembali ke Kas Negara pada tanggal 16 januari 2023 dengan nomor NTB 230116773370 dan nomor NTPN AC8586QRA648GGQ5. Bukti setor terdapat pada **Lampiran 19**.
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada BPSDM sebesar Rp2.500.000,00 terdapat di BPPMDDTT Jayapura merupakan UP yang akan digunakan untuk belanja persediaan. Namun terdapat revisi pada tanggal 16 Desember 2022 sehingga belanja persediaan kegiatan pelatihan catrans telah direvisi. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pagu pada aplikasi sakti dan om span. Karena perbedaan ini maka harus menyesuaikan dengan omspan sehingga harus pengembalian belanja persediaan. Perbedaan ini baru diketahui pada tanggal 6 Januari 2023. Sehingga penyetoran baru dilakukan di bulan Januari 2023 dengan nomor NTB 06274124546 NTPN 3AB7C395ARQGV5JU tanggal 6 Januari 2023. Bukti setor terdapat pada **lampiran 20**.

C.1.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas sebesar
Rp5.118.500,00*

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp5.118.500,00 dan Rp74.353.492,00 dengan rincian per Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per UKE-I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

UKE I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Ditjen PDP	-	180.400,00	-100,00%
Ditjen PEID	-	24.233.200,00	-100,00%
Ditjen PPKTrans	5.118.500,00	-	100,00%
BPSDM	-	49.939.892,00	-100,00%
Jumlah	5.118.500,00	74.353.492,00	-93,12%

1. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Ditjen PDP per 31 Desember 2021 sebesar Rp180.400,00 dijelaskan sebagai berikut:

a) Transfer masuk atas sisa kas pada rekening satuan kerja dekonsentrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat (350150) sebesar Rp400,00 yang di karenakan kekurangan penarikan atas pembayaran honor perjalanan dinas kepada salah satu pegawainya. Dilakukan transfer masuk dari satuan kerja dekonsentrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat (350150) ke Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (350456) dikarenakan pada tahun 2022 satuan kerja dekonsentrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat (350150) sudah menjadi satuan kerja inaktif. Honor perjalanan dinas ini sudah dibayarkan pada tanggal 4 Januari 2022 dengan nomor kwitansi 162/DPPMD-KWT/2021.

b) Transfer masuk atas sisa kas pada rekening satuan kerja dekonsentrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau (350425) sebesar Rp180.000,00 yang di karenakan kekurangan penarikan atas pembayaran honor perjalanan dinas kepada salah satu pegawainya. Dilakukan transfer masuk dari satuan kerja dekonsentrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau (350425) ke Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (350456) dikarenakan pada tahun 2022 satuan kerja dekonsentrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau (350425) sudah menjadi satuan kerja inaktif. Kas pada dinas ini sudah dibayarkan pada tanggal 4 Januari 2022 dengan nomor kwintasi 01/DPPMD-DUKCAPIL-06/2022

Sehingga saldo kas lainnya dan setara kas Ditjen PDP pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

2. Saldo Ditjen PEID per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.233.200,00

dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kas Lainnya dan Setara Kas pada Satker Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (350453) sebesar Rp1.327.350,00 merupakan Uang Pajak Bendahara yang sudah disetor (berupa PPh 21, PPh 22 dan PPN) pada tanggal 1 Januari 2022
- b) Kas Lainnya dan Setara Kas pada Satker Dekonsentrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (670408) sebesar Rp8.100.750,00 merupakan Retur Uang Perdin, Honor dan Sewa Kendaraan Kegiatan dan sudah disetorkan pada tanggal 11 April 2022
- c) Kas Lainnya dan Setara Kas pada Satker Dekonsentrasi Provinsi Papua (670409) sebesar Rp14.805.100,00 merupakan Retur Honor Petugas Kebersihan selama 4 bulan dan sudah disetorkan pada tanggal 24 Februari 2022

Sehingga saldo kas lainnya dan setara kas Ditjen PEID per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00

3. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Ditjen PPKTrans per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.118.500,00 merupakan saldo yang terdapat di satker dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kab. mamuju kode satker 350440 TP merupakan masih ada kas di rekening satker yang merupakan honor yang baru dibayarkan bulan Januari 2023
4. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas BPSDM per 31 Desember 2021 sebesar Rp49.939.892,00 merupakan sisa kas Satker Balai Pekanbaru yang terlambat disetorkan berupa pajak yang sudah dipungut dari transaksi di bulan Desember namun pajak tersebut baru disetorkan pada bulan Januari 2022. Sisa Pajak tersebut sudah dikembalikan ke kas negara pada tanggal 23 Januari 2022 dengan Nomor NTB 000000783614 NTPN 1FE5200NLE7EH20S. Sehingga saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

C.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

*Belanja
Dibayar
Dimuka
(Prepaid)
Rp4.861.085.0
03,00*

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.861.085.003,00 dan Rp0,00 dengan rincian per satker sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) per Satker
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Satker	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	4.000.000.000,00	-	100,00%
Disnakertrans Kab. Mamuju Tengah	199.932.000,00	-	100,00%
Dinsosnakertrans Kab. Luwu Utara	499.820.198,00	-	100,00%
Disnakertrans Kab. Konawe Selatan	161.332.805,00	-	100,00%
Jumlah	4.861.085.003,00	-	100,00%

1. Saldo Prepaid sebesar Rp4.000.000.000,00 yang terdapat pada Ditjen PDP untuk kegiatan konsultan pada Program Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) *Community Capacity and social Accountability Systems (Non-Governmental Organizations) Central Region* dengan penyedia Yayasan Lakpesdam NU senilai Rp2.000.000.000,00
 - b) *Community Capacity and social Accountability Systems (Non-Governmental Organizations) East Region* dengan penyedia kemitraan senilai Rp2.000.000.000,00
2. Dinas Transmigrasi Kab Mamuju Tengah sebesar Rp 199.932.000,00 merupakan pekerjaan paket pembangunan plat deucker. Hasil dari pemeriksaan di lapangan Badan Pemeriksaan Keuangan pekerjaan fisik dilapangan belum sampai 100% selesai. Satker Dinas Transmigrasi Kab Mamuju Tengah sudah mencatat BAST Final di modul komitmen dalam Aplikasi Sakti 2022 dengan mencatat pekerjaan fisik sudah 100% selesai. Batas kontrak BAST pertama pekerjaan tanggal 20 desember 2022 sehingga dilakukan pencatatan koreksi atas pembangunan Platdeker yang belum selesai dikerjakan sampai dengan selesainya kontrak pekerjaan Bukti Jaminan Bank Garansi, BAST, dan Denda Keterlambatan terdapat pada **Lampiran 21**
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Luwu Utara sebesar Rp499.820.198,00 merupakan 2 pekerjaan fisik dilapangan belum sampai 100% batas kontrak yaitu peningkatan jalan ruas Bone – Bone Batimurung Kawasan masamba dan Pekerjaan Ruas Jalan Desa Strategis Bone-Bone Bantimurung batas kontrak Tanggal 17 Desember 2022 perpanjang addendum I Tanggal 27 Desember 2022 dan addendum II dengan Jaminan Bank Garansi sampai terbitnya BAST tanggal 30 Januari 2023 telah selesai. Bukti Jaminan Bank Garansi, BAST, dan Denda Keterlambatan terdapat pada **Lampiran 22**
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Konawe Selatan sebesar Rp161.332.805,00 merupakan pekerjaan fisik dilapangan belum

sampai 100% batas kontrak yaitu pekerjaan pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) Perpipaian belum sampai 100% batas kontrak Tanggal 27 Desember 2022 perpanjang kontrak addendum I dengan Jaminan Bank Garansi sampai terbitnya BAST Tanggal 20 Januari Tahun 2023. Butki Bank Garansi, Jaminan Pemeliharaan SAB, BAST, dan Denda Keterlambatan terdapat pada **lampiran 23**.

C.1.1.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak
Rp766.622.921,00

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca. Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp766.622.921,00 dan Rp1.157.971.401,00 dengan rincian per Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak per UKE-I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

UKE I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Ditjen PPKTrans	79.691.100,00	410.784.790,00	-80,60%
BPSDM	210.500.000,00	230.500.000,00	-8,68%
Setjen	476.431.821,00	516.692.611,00	-7,79%
Jumlah	766.622.921,00	1.157.977.401,00	-33,80%

1. Piutang Bukan Pajak Ditjen PPKTrans per 31 Desember 2021 sebesar Rp410.784.790,00 merupakan kekurangan volume pekerjaan fisik atas pemeriksaan BPK di lapangan tahun 2020 dan sudah dilakukan validasi dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak Ditjen PPKTrans
Per 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Wajo	112.869.373,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Konawe	127.148.767,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sidrap	30.887.817,00
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Muna	139.878.833,00
Total	410.784.790,00

penjelasan rincian kekurangan volume sebagai berikut:

- a) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Wajo dijelaskan sebagai berikut:
 - Melakukan pelunasan penyetoran ke kas negara atas pengembalian kelebihan pembayaran CV. RAHMAN atas pembangunan RTJK UPT Bekkae Tahun 2020 sebesar Rp37.000.000,00 tanggal penyetoran 12 Januari 2022, kode

- akun 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dengan No NTB 927890614611 dan No NTPN CAAE161QUGUGA8P2 yang terdapat pada **lampiran 24**
- Melakukan penyetoran ke kas negara atas pengembalian kelebihan pembayaran CV. ALVIA LESTARI Atas Pembangunan Jembatan S.Nanna 3 SP.2 dan Pembangunan Jembatan S.Nanna 2 SP.1 UPT Bekkae Tahun 2020 sebesar Rp46.215.279,00 tanggal penyetoran 12 Januari 2022, kode akun 425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu dengan No NTB 928567615467 dan No NTPN 32D5B8N3E0LLHAB5 yang terdapat pada **lampiran 24**
 - Melakukan penyetoran ke kas negara atas pengembalian kelebihan pembayaran CV. RAHMAN atas pembangunan RTJK UPT Bekkae Tahun 2020 sebesar Rp29.654.094,00 tanggal penyetoran 21 Februari 2022, kode akun 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dengan No NTB 944037809858 dan No NTPN 7E4C36U8EBK295Q3 yang terdapat pada **lampiran 24**
- b) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Konawe sudah melakukan pelunasan penyetoran ke kas negara sebesar Rp127.148.767,00 tanggal penyetoran 19 Februari 2022 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Jalan dan Drainase TA. 2020 oleh CV. Mowewe Raya kode akun 425913 – Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu dengan No NTB 905521786402 dan No NTPN BBFE96U8EBK16933 yang terdapat pada **lampiran 25**
- c) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sidrap sudah melakukan pelunasan penyetoran ke kas negara atas pengembalian kelebihan pembayaran Kegiatan Pilah Kumpul Bersih CV Accah Mediatama TA. 2020 sebesar Rp30.888.817,00 tanggal penyetoran 17 Februari 2022, kode akun 425912 – Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dengan No NTB 220217682114 dan No NTPN 714B18N3E0OR1SCH yang terdapat pada **lampiran 26**
- d) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Muna dijelaskan sebagai berikut:
- Melakukan pelunasan penyetoran ke kas negara atas pengembalian kelebihan pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi UPT. Raimuna oleh

CV. SAIUMAYA sebesar Rp29.000.000,00 tanggal penyetoran 18 Februari 2022, kode akun 425913 – Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu dengan No NTB 220218744351 dan No NTPN 933ED6U8EBK3D065 yang terdapat pada **lampiran 27**

- Melakukan penyetoran ke kas negara atas pengembalian kelebihan pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi UPT. Raimuna oleh CV. SAIUMAYA sebesar Rp28.000.000,00 tanggal penyetoran 18 Februari 2022, kode akun 425913 – Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu dengan No NTB 220218739490 dan No NTPN 83B091JNFC5OU73P yang terdapat pada **lampiran 27**
- Melakukan penyetoran ke kas negara atas pengembalian kelebihan pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi UPT. Raimuna oleh CV. SAIUMAYA sebesar Rp2.338.308,00 tanggal penyetoran 8 Januari 2022, kode akun 425913 – Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu dengan No NTB 000000670642 dan No NTPN 8DAF83CIF173J3N3 yang terdapat pada **lampiran 27**
- Melakukan penyetoran ke kas negara atas pengembalian kelebihan pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi UPT. Raimuna oleh CV. SAIUMAYA sebesar Rp10.000.000,00 tanggal penyetoran 11 Januari 2022, kode akun 425913 – Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu dengan No NTB 000000227610 dan No NTPN 1A25F7QLU63833VQ yang terdapat pada **lampiran 27**
- Melakukan penyetoran ke kas negara atas pengembalian kelebihan pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Volume Pekerjaan Pembangunan RTJK Type 36 Paket I Lokasi UPT. Raimuna Oleh CV. THALITA sebesar Rp10.544.246,00 tanggal penyetoran 18 Februari 2022, kode akun 425912 – Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dengan No NTB 000000654850 dan No NTPN CCD1948VURSU33F6 yang terdapat pada **lampiran 27**
- Melakukan penyetoran ke kas negara atas pengembalian kelebihan pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Pilah

Kumpul Bersih Lokasi UPT Raimuna oleh CV. Prytha sebesar Rp5.996.279,00 tanggal penyetoran 13 Januari 2022, kode akun 425912 – Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dengan No NTB 000000284938 dan No NTPN BD0F93CIF17A244B yang terdapat pada **lampiran 27**

- Melakukan penyetoran ke kas negara atas pengembalian kelebihan pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Volume Pekerjaan Pembagunan RTJK Type 36 Lokasi UPT. Raimuna Oleh CV. THALITA sebesar Rp25.000.000,00 tanggal penyetoran 6 April 2022, kode akun 425912 – Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dengan No NTB000000359539 dan No NTPN 76BA16U8EBPM4POR yang terdapat pada **lampiran 27**
- Melakukan penyetoran ke kas negara atas pengembalian kelebihan pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Volume Pekerjaan Pembagunan RTJK Type 36 Lokasi UPT. Raimuna Oleh CV. THALITA sebesar Rp7.000.000,00 tanggal penyetoran 24 Maret 2022, kode akun 425912 – Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dengan No NTB 000000373217 dan No NTPN 1D70461QUH4R777I yang terdapat pada **lampiran 27**

Sehingga pada 31 Desember 2022 saldo piutang bukan pajak (Kurang Volume) Ditjen PPKTrans sebesar Rp0,00. Namun terdapat piutang bukan pajak yang merupakan penerimaan negara bukan pajak Ex Ditjen PPKTrans (067.08) yang merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 15/HP/XVI/01/2011 Tanggal 19 Januari 2011 merupakan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas (akun 425912) sebesar Rp 79.691.100,00.

2. Piutang Bukan Pajak Setjen sebesar Rp476.431.821,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak Setjen
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan
Piutang Pujasera, Kantin masa kontrak 06/1/2018 s.d. 06/1/2020	438.880.881,00	465.080.882,00	- 26.200.001,00
Piutang Pujasera, Kantin Masa kontrak 01/0/2021 s.d. 01/0/2022	5.654.222,00	33.737.562,00	- 28.083.340,00
Piutang Pujasera, Kantin masa kontrak 1/2/2022 s.d. 1/2/2022	22.000.000,00	-	-
Piutang Café Latere (2021) Audited	-	2.827.500,00	- 2.827.500,00
Piutang CV Gita Sabela (2021) Audited	-	15.046.667,00	- 15.046.667,00
Piutang Sewa Lantai Parkir PT. Aulas Buana Juli s.d. Desember 2022	9.896.718,00	-	9.896.718,00
Total Piutang Setjen	476.431.821,00	516.692.611,00	- 62.260.790,00

Berdasarkan Catatan Hasil Rivi (CHR) APIP dengan nomor 118/PWS.04.01/II/2023 tanggal 10 februari 2023 atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Semester II Tahun Anggaran 2022 terdapat Piutang sewa masa kontrak 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian CHR Piutang Sewa Setjen dari APIP

(Dalam Rupiah)

Nama	Nomor Kontrak	Sewa	Nominal
Ipin	21/KEU.10.02/III/2022	Kantin DPR	1.000.000,00
Fitria Pridani Putri	27/KEU.10.02/III/2022	Kantin DPR	1.000.000,00
(Sukardi Ricen/ Yan Susanti) / Sarmi	28/KEU.10.02/III/2022	Kantin DPR	1.000.000,00
Sri Haryanti	29/KEU.10.02/III/2022	Kantin DPR	1.000.000,00
Waryani	31/KEU.10.02/III/2022	Kantin DPR	1.000.000,00
Dian Wahyuni	32/KEU.10.02/III/2022	Kantin DPR	1.500.000,00
Endang Fitrianti	20/KEU.10.02/III/2022	Kantin DPR	3.000.000,00
Sulis Sutiono	114/KEU.10.02/X/2022	Kantin Pujasera	3.500.000,00
Sukarno	35/KEU.10.02/III/2022	Kantin Pujasera	1.500.000,00
(Reni Wahyuningrum) / Nur Iman	13/KEU.10.02/III/2022	Kantin Pujasera	2.500.000,00
Bambang Subianto	18/KEU.10.02/III/2022	Kantin Pujasera	2.000.000,00
Dewi Julianti	175/KEU.10.02/X/2022	Kantin Pujasera	3.000.000,00
Jumlah			22.000.000,00

3. Piutang Bukan Pajak BPSDM per 31 Desember 2021 sebesar Rp230.500.000,00 merupakan merupakan Temuan BPK TA 2021 pada satker Balilatfo dan sekarang menjadi BPSDM PMDDTT atas Kurang Volume Hasil Pemeriksaan Fisik Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Layar Film/Film (Videotron) sebesar Rp199.000.000,00 dan Note Book sebesar Rp31.500.000,00. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak ketiga diwajibkan untuk membayar pengembalian ke Negara atas Temuan tersebut sebesar Rp230.500.000,00. Untuk pembayaran telah dilakukan sebanyak 1 kali pada tanggal 20 Juni 2022 senilai Rp20.000.000,00 dengan nomor NTB 000000290315 dan nomor NTPN FDE906U8EBVV20S9. Bukti setor tersebut terdapat pada **Lampiran 28**.

C.1.1.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih-
Piutang Bukan
Pajak
(Rp45.526.799
,00)

Penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bukan pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing - masing piutang masing - masing debitur. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar (Rp45.526.799,00) dan (Rp101.957.401,00). Penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak pada masing - masing Unit Kerja Eselon I per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per UKE-I Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

UKE I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Ditjen PPKTrans	398.456,00	2.053.923,00	-80,60%
BPSDM	1.052.500,00	1.152.500,00	-8,68%
Setjen	44.075.843,00	98.751.155,00	-55,37%
Jumlah	45.526.799,00	101.957.578,00	-55,35%

Adapun rincian penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	327.742.040,00	0,50%	1.638.710,20
Kurang Lancar	438.880.881,00	10%	43.888.088,10
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	766.622.921,00		45.526.798,30

C.1.1.6 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Piutang Bukan
Pajak (Netto)
Rp721.096.12
2,00

Piutang bukan pajak (netto) merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya setelah dikurang estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing - masing piutang masing - masing debitur. Saldo piutang bukan pajak (netto) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp721.096.122,00 dan Rp1.056.019.823,00 dengan rincian per Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak (Netto) per UKE-I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

UKE I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Ditjen PPKTrans	79.292.644,00	408.730.867,00	-80,60%
BPSDM	209.447.500,00	229.347.500,00	-8,68%
Setjen	432.355.978,00	417.941.456,00	3,45%
Jumlah	721.096.122,00	1.056.019.823,00	-31,72%

**C.1.1.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

*Bagian Lancar
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan
Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0,00*

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp145.767.100,00 dengan rincian per Akun sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	-	87.967.100,00
Bagian Lancar TGR	-	57.800.000,00
JUMLAH	-	145.767.100,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp145.767.100,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan terdapat pada Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi Ditjen Pembangunan Kawasan Transmigrasi 067.08.350463 yang merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 15/HP/XVI/01/2011 dan telah dilakukan jumlah transfer keluar dari 067.08.350463 dan jumlah transfer masuk ke 067.07.350467 di tahun 2021 sebesar Rp87.967.100,00. Dalam Aplikasi SAKTI tahun 2022 sudah dilakukan pencatatan piutang di modul piutang dan pencatatannya merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan SPMKN (Surat Pemyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara) perseorangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 15/HP/XVI/01/2011 penyetoran penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas (akun 425912)
- b) Temuan atas hilangnya kendaraan dinas roda 4 atas pegawai dengan inisial RP. Pencatatan atas hilangnya kendaraan dinas roda 4 sesuai

dengan atensi temuan hasil audit surat Itjen No.Rhs.232/PW.03.01/VII/2019 pada Ditjen PPKTrans Tanggal 30 Juli 2019. Saldo bagian lancar TGR per 31 Desember 2020 sebesar Rp72.800.000,00 merupakan piutang yang harus dibayarkan atas temuan tersebut sesuai dengan *Time Line* di SKTJM dimana untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp22.000.000,00 dan bulan Januari sampai dengan desember 2021 sebesar Rp52.800.000,00. Yang sudah disetorkan ke kas negara sebesar Rp2.000.000,00 dengan kode akun 425791 (pendapatan penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain) yang disetorkan tanggal bayar 15 september 2020 telah dilakukan jumul umum di Tahun 2020 dan sudah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp15.000.000,00 dengan akun 425791 (pendapatan penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain) yang disetorkan tanggal bayar 22 Desember 2021 telah dilakukan jumul umum di Tahun 2021. Tahun 2022 sudah dilakukan penyetoran ke kas negara tanggal 11 januari 2022 sebesar Rp2.000.000,00, tanggal 25 april 2022 sebesar Rp5.000.000,00 dan pelunasan tanggal 11 juli 2022 sebesar Rp81.514.287,00 bukti setor terlampir dan di Aplikasi SAKTI sudah di lakukan jumul manual dan dilakukan pencatatan piutang di modul piutang

Sehingga saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00

C.1.1.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Bagian Lancar
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan
Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0,00*

Penyisihan piutang tak tertagih – bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing - masing piutang masing - masing debitor. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp0,00 dan (Rp11.686.710,00).

C.1.1.9 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Netto)

Bagian Lancar
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan
Ganti Rugi
(TP/TGR)
(Netto) Rp0,00

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Netto) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan dikurangi dengan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing - masing piutang masing - masing debitur. Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Netto) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp0,00 dan Rp134.080.390,00.

C.1.1.10 Persediaan

Persediaan
Rp192.339.352.899,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp192.339.352.899,00 dan Rp185.453.337.428,00. Adapun rincian persediaan per Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

*Rincian Persediaan per UKE-I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

UKE I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Itjen	18.720.000,00	25.948.400,00	-27,86%
Ditjen PDP	17.371.101.607,00	16.559.540.037,00	4,90%
Ditjen PEID	1.447.551.500,00	1.448.858.000,00	-0,09%
Ditjen PPDT	804.481.652,00	2.454.991.718,00	-67,23%
Ditjen PPKTrans	172.361.665.066,00	164.628.017.569,00	4,70%
BPSDM	61.194.880,00	62.402.950,00	-1,94%
Setjen	188.168.581,00	187.828.104,00	0,18%
BPI	86.469.613,00	85.750.650,00	0,84%
	192.339.352.899,00	185.453.337.428,00	3,71%

Selain rincian persediaan per Unit Kerja Eselon I, Adapun rincian persediaan per akun sebagai berikut:

*Rincian Persediaan per Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
117111	Barang Konsumsi	607.291.584,00	592.884.844,00	2,43%
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	240.000,00	-100,00%
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan	55.321.418.723,00	76.551.508.733,00	-27,73%
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan	-	8.227.612.100,00	-100,00%
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan	21.920.231.465,00	23.186.668.744,00	-5,46%
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan	84.821.764.499,00	64.004.705.520,00	32,52%
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	27.477.337.870,00	10.698.192.889,00	156,84%
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	2.191.308.758,00	2.191.308.758,00	0,00%
117199	Persediaan Lainnya	-	215.840,00	-100,00%
	Jumlah	192.339.352.899,00	185.453.337.428,00	3,71%

Selain rincian persediaan per Unit Kerja Eselon I dan Akun, ada juga rincian mutasi persediaan per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

*Mutasi Persediaan
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	185.453.337.428,00
Mutasi Tambah	299.273.245.255,00
Pembelian	144.736.101.718,00
Reklasifikasi Masuk	125.676.700.609,00
Reklasifikasi Dari Aset	14.977.425.384,00
Persediaan Dalam Proses Masuk	5.951.241.100,00
Transfer Masuk	3.855.995.669,00
Koreksi Kuantitas Tambah	1.999.445.506,00
Perolehan Lainnya	1.526.888.622,00
Hibah (Masuk)	517.539.147,00
Hasil Opname Fisik	18.507.500,00
Koreksi Nilai Tambah	10.000.000,00
Saldo Awal	3.400.000,00
Mutasi Kurang	292.387.229.784,00
Habis Pakai	150.965.667.296,00
Reklasifikasi Keluar	125.676.700.609,00
Persediaan Dalam Proses Keluar	5.951.241.100,00
Reklasifikasi ke Aset	3.873.849.750,00
Transfer Keluar	3.855.995.669,00
Koreksi Nilai Kurang	1.464.119.048,00
Koreksi Kuantitas Kurang	570.122.266,00
Hasil Opname Fisik	22.205.526,00
Usang	7.328.520,00
Saldo Akhir	192.339.352.899,00

Adapun rincian mutasi persediaan per Unit Kerja Eselon I pada **lampiran 29**.

C.1.2 Aset Tetap

*Aset Tetap
sebesar
Rp1.848.490.3
92.769,00*

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.848.490.392.769,00 dan Rp1.971.067.943.029,00. Adapun rincian perbandingan Aset Tetap per

31 Desember 2022 dengan 2021 terdiri dari:

*Rincian Aset Tetap
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Tanah	701.074.345.474,00	701.074.345.474,00	-
Peralatan dan Mesin	411.831.979.599,00	401.220.950.084,00	2,64
Gedung dan Bangunan	592.704.642.830,00	603.103.929.447,00	(1,72)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	840.224.928.086,00	857.833.129.797,00	(2,05)
Aset Tetap Lainnya	97.531.882.269,00	115.537.418.571,00	(15,58)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.581.539.269,00	17.670.622.284,00	(45,78)
Akumulasi Penyusutan	(804.458.924.758,00)	(725.372.452.628,00)	10,90
Jumlah	1.848.490.392.769,00	1.971.067.943.029,00	(6,22)

C.1.2.1 Tanah

Tanah sebesar
Rp701.074.345.474,00

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp701.074.345.474,00 dan Rp701.074.345.474,00. Tidak perubahan dibandingkan tahun 31 Desember 2021. Adapun rincian aset Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Tanah per UKE-I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

UKE I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
BPSDM	596.815.490.474,00	596.815.490.474,00	0,00%
Setjen	104.258.855.000,00	104.258.855.000,00	0,00%
Jumlah	701.074.345.474,00	701.074.345.474,00	0,00%

Selain rincian tanah per Unit Kerja Eselon I, ada juga rincian mutasi tanah per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

*Mutasi Tanah
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	701.074.345.474,00
Mutasi Tambah	3.119.110.673,00
Pembelian	3.119.110.673,00
Mutasi Kurang	3.119.110.673,00
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	2.783.350.673,00
Reklasifikasi Keluar	335.760.000,00
Saldo Akhir	701.074.345.474,00

Adapun rincian mutasi tanah per Unit Kerja Eselon I dan per kode barang pada **lampiran 30**.

C.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin sebesar Rp411.831.979.599,00

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp411.831.979.599,00 dan Rp401.220.950.084,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp10.611.029.515,00 atau 2,64 persen dibandingkan tahun 31 Desember 2021. Adapun rincian aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Peralatan dan Mesin per UKE-I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

UKE I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Itjen	11.704.678.793,00	10.291.495.003,00	13,73%
Ditjen PDP	18.525.204.605,00	17.877.916.195,00	3,62%
Ditjen PEID	21.398.953.124,00	21.289.993.024,00	0,51%
Ditjen PPDT	27.695.242.092,00	27.870.743.592,00	-0,63%
Ditjen PPKTrans	80.299.401.746,00	80.245.452.285,00	0,07%
Ditjen PKTrans	-	732.147.090,00	-100,00%
BPSDM	67.782.505.326,00	66.920.513.772,00	1,29%
Setjen	128.501.811.333,00	123.087.736.743,00	4,40%
BPI	55.924.182.580,00	52.904.952.380,00	5,71%
Jumlah	411.831.979.599,00	401.220.950.084,00	2,64%

Saldo pada Ditjen PKTrans per 31 Desember 2021 sebesar Rp732.147.090,00 ini merupakan data anomali yang terjadi akibat permasalahan pada aplikasi E-Rekon pada saat likuidasi. Sehingga pada tahun 2022 ini telah dilakukan Normalisasi BMN untuk mengatasi permasalahan anomali data tersebut.

Terdapat penambahan Saldo Peralatan dan Mesin pada Setjen sebesar Rp451.700.002,00. Penambahan ini berupa mobil yang terdiri dari Micro Bus, Mini Bus, dan Pick Up. Saldo tersebut merupakan hasil inventarisasi.

Selain rincian peralatan dan mesin per Unit Kerja Eselon I, ada juga rincian mutasi tanah per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

*Mutasi Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	401.220.950.084,00
Mutasi Tambah	20.168.464.259,00
Pembelian	9.752.765.346,00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dibenturkan penggunaan aktif	4.155.616.340,00
Transfer Masuk	2.930.406.950,00
Reklasifikasi Masuk	1.828.736.271,00
Perolehan Lainnya	473.831.450,00
Saldo Awal	469.682.002,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	171.276.500,00
Pembatalan Penghapusan	162.675.000,00
Normalisasi BMN	143.607.400,00
Perolehan Tinjuc Normalisasi BMN	72.367.000,00
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	7.500.000,00
Mutasi Kurang	9.557.434.744,00
Transfer Keluar	2.926.406.950,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	2.767.548.074,00
Reklasifikasi Keluar	1.828.736.271,00
Normalisasi BMN	732.147.090,00
Koreksi Pencatatan	509.859.450,00
Hibah Keluar	306.762.759,00
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	264.071.000,00
Jurnal Manual	211.923.150,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	9.980.000,00
Saldo Akhir	411.831.979.599,00
Akumulasi Penyusutan	363.176.530.594,00
Nilai Bersih	48.655.449.005,00

Adapun rincian mutasi peralatan dan mesin per Unit Kerja Eselon I barang terdapat pada **lampiran 31**.

C.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan sebesar Rp592.704.642.830,00

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah Rp592.704.642.830,00 dan Rp603.103.929.447,00. Terdapat penurunan sebesar Rp10.399.286.617,00 atau 1,72% nilai aset Gedung dan Bangunan dibandingkan tahun 31 Desember 2021. Adapun rincian aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

UKE I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Ditjen PPKTrans	179.548.632.104,00	189.666.210.059,00	-5,33%
Ditjen PKTrans	-	3.607.709.000,00	100,00%
BPSDM	131.172.481.589,00	131.342.415.739,00	-0,13%
Setjen	281.983.529.137,00	278.487.594.649,00	1,26%
Jumlah	592.704.642.830,00	603.103.929.447,00	-1,72%

Saldo pada Ditjen PKTrans per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.607.709.000,00 ini merupakan data anomali yang terjadi akibat permasalahan pada aplikasi E-Rekon pada saat likuidasi. Sehingga pada tahun 2022 ini telah dilakukan Normalisasi BMN untuk mengatasi permasalahan anomali data tersebut.

Terdapat kesalahan penganggaran atas Belanja Pemeliharaan pada Balai Makassar. Belanja Pemeliharaan tersebut digunakan untuk pembangunan kolam ikan sebesar Rp80.000.000,00

Selain rincian gedung dan bangunan per Eselon I, ada juga rincian mutasi tanah per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

*Mutasi Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	603.103.929.447,00
Mutasi Tambah	12.139.451.738,00
Reklasifikasi Masuk	6.251.901.000,00
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	3.495.934.488,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.581.767.700,00
Pembelian	368.877.550,00
Pengembangan Melalui KDP	198.288.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	162.683.000,00
Perolehan Lainnya	80.000.000,00
Mutasi Kurang	22.538.738.355,00
Hibah Keluar	10.117.577.955,00
Reklasifikasi Keluar	6.251.901.000,00
Normalisasi BMN	3.607.709.000,00
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	1.762.271.650,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	610.905.150,00
Koreksi Pencatatan	188.373.600,00
Saldo Akhir	592.704.642.830,00
Akumulasi Penyusutan	81.542.748.565,00
Nilai Bersih	511.161.894.265,00

Adapun rincian mutasi gedung dan bangunan per eselon I terdapat pada **lampiran 32**.

C.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
sebesar
Rp840.224.92
8.086,00*

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing - masing sebesar Rp840.224.928.086,00 dan Rp857.833.129.797,00. Terdapat

penurunan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp17.608.201.711,00 atau 2,05 persen dibandingkan tahun 31 Desember 2021. Adapun rincian aset jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per UKE-I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

UKE I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Ditjen PDP	738.709.450,00	738.709.450,00	0,00%
Ditjen PPKTrans	818.385.017.801,00	822.282.454.975,00	-0,47%
Ditjen PKTrans	-	13.770.764.537,00	-100,00%
BPSDM	13.462.132.593,00	13.402.132.593,00	0,45%
Setjen	1.768.116.292,00	1.768.116.292,00	0,00%
BPI	5.870.951.950,00	5.870.951.950,00	0,00%
Jumlah	840.224.928.086,00	857.833.129.797,00	-2,05%

Saldo pada Ditjen PKTrans per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.770.764.537,00 ini merupakan data anomali yang terjadi akibat permasalahan pada aplikasi E-Rekon pada saat likuidasi. Sehingga pada tahun 2022 ini telah dilakukan Normalisasi BMN untuk mengatasi permasalahan anomali data tersebut.

Terdapat kesalahan penganggaran Belanja Pemeliharaan pada Balai Makassar sebesar Rp60.000.000,00. Belanja tersebut digunakan untuk pembangunan Trotoar (Jalan Khusus Pejalan Kaki).

Selain rincian jalan, irigasi dan jaringan per Unit Kerja Eselon I, berikut rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

*Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	857.833.129.797,00
Mutasi Tambah	28.659.866.981,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	9.034.029.314,00
Pembelian	7.288.359.012,00
Perolehan Tinjau Normalisasi BMN	4.079.080.000,00
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	3.846.399.750,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	3.846.399.750,00
Reklasifikasi Masuk	335.760.000,00
Saldo Awal	138.955.351,00
Perolehan Lainnya	60.000.000,00
Normalisasi BMN	30.883.804,00
Mutasi Kurang	46.268.068.692,00
Hibah Keluar	20.151.769.094,00
Normalisasi BMN	13.770.764.537,00
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	8.493.390.311,00
Koreksi Pencatatan	3.852.144.750,00
Saldo Akhir	840.224.928.086,00
Akumulasi Penyusutan	358.924.795.407,00
Nilai Bersih	481.300.132.679,00

Adapun rincian mutasi jalan, irigasi, dan jaringan per eselon I terdapat pada **lampiran 33**.

C.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp97.531.882.269,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo aset tetap lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp97.531.882.269,00 dan Rp115.537.418.571,00. Terdapat penurunan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp18.005.536.302,00 atau 15,58 persen dari 31 Desember 2021. Adapun rincian aset tetap lainnya per Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

*Rincian Aset Tetap Lainnya per UKE-I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

UKE I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Itjen	49.125.000,00	49.875.000,00	-1,50%
Ditjen PDP	372.721.760,00	409.076.760,00	-8,89%
Ditjen PEID	-	466.516.450,00	-100,00%
Ditjen PPDT	-	1.878.310.000,00	-100,00%
Ditjen PPKTrans	95.597.479.063,00	111.364.180.813,00	-14,16%
BPSDM	501.958.424,00	501.958.424,00	0,00%
Setjen	953.810.022,00	810.713.124,00	17,65%
BPI	56.788.000,00	56.788.000,00	0,00%
Jumlah	97.531.882.269,00	115.537.418.571,00	-15,58%

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya per Akun sebagai berikut:

*Rincian Aset Tetap Lainnya per Eselon I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Akun	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Aset Tetap Renovasi	95.779.494.583,00	113.927.377.783,00	-15,93%
Aset Tetap Lainnya	1.752.387.686,00	1.610.040.788,00	8,84%
Jumlah	97.531.882.269,00	115.537.418.571,00	-15,58%

Terdapat rincian aset tetap renovasi per eselon I sebagai berikut:

*Rincian Aset Tetap Renovasi per Eselon I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

UKE I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Ditjen PDP	-	36.355.000,00	-100,00%
Ditjen PEID	-	466.516.450,00	-100,00%
Ditjen PPDT	-	1.878.310.000,00	-100,00%
Ditjen PPKTrans	95.449.510.538,00	111.216.212.288,00	-14,18%
BPSDM	329.984.045,00	329.984.045,00	0,00%
Jumlah	95.779.494.583,00	113.927.377.783,00	-15,93%

Penjelasan terkait aset tetap renovasi per eselon I sebagai berikut:

- Saldo Aset Tetap Renovasi Ditjen PDP per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.355.000,00 merupakan pembuatan grill selokan area belakang gedung Ditjen PDP Tahun perolehan 2020. Pada Triwulan III Tahun 2022 terdapat mutasi transfer keluar kepada Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor dengan mengajukan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 1/KEU.09.03/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp36.355.000. BAST terdapat pada **lampiran 34**. Sehingga saldo aset tetap renovasi Ditjen PDP per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00
- Saldo Aset Tetap Renovasi Ditjen PEID per 31 Desember 2021 Rp466.516.450,00 ini merupakan renovasi gedung/bangunan Tahun 2016 yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Aset tetap renovasi (ATR) diatas tercatat sebagai aset tetap lainnya pada laporan keuangan Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dikarenakan gedung tersebut masih menjadi milik Kementerian Dalam Negeri yang digunakan oleh Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sudah dilakukan Transfer Keluar ke Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 05/KEU.09.05/VIII/2022. BAST terdapat pada **lampiran 35**. Sehingga saldo Aset tetap renovasi Ditjen PEID per 31

Desember 2022 sebesar Rp0,00

3. Saldo Aset Tetap Renovasi Ditjen PPDT per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.878.310.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Renovasi gedung dan bangunan milik Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2016 yang dipakai untuk pelaksanaan pemerintahan oleh Kemendesa PDPT yang berlokasi di Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat senilai Rp1.680.560.000,00
 - b) Renovasi ruang tunggu tamu menjadi *cafeteria* pada tahun 2017. Pengerjaan renovasi tersebut sesuai dengan kontrak nomor 019/SPK/SATKER-PPK.I/XI/2017 tanggal 1 November 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp197.750.000,00

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara No.77/KEU.09.05/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022, aset tetap renovasi ini telah diserahkan kepada Kementerian Sekretarian Negara. BAST terdapat pada **lampiran 37**. Sehingga saldo aset tetap renovasi Ditjen PPDT per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00
4. Saldo Aset Tetap Renovasi Ditjen PPKTrans per 31 Desember 2022 dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Ditjen PPKTrans
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Satker	31 Desember 2022
DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PROVINSI ACEH	919.983.499,00
DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH	599.200.000,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN	58.261.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI	534.750.000,00
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. LUWU UTARA	19.000.000,00
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR	672.412.600,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KONawe SELATAN	8.053.690.600,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALMAHERA TIMUR	158.300.000,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN FAK-FAK	1.379.636.000,00
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN	79.802.019.538,00
DINAS NAKERTRANS KAB. BULUNGAN	3.137.422.301,00
DINAS TRANSMIGRASI , TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KAB.	114.835.000,00
Jumlah	95.449.510.538,00

Saldo Aset Tetap Renovasi BPSDM sebesar Rp329.984.045,00 merupakan aset tetap renovasi milik BBPPMDDTT Jakarta yang masih tercatat dalam pencatatan BMN, sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Sampai dengan tanggal pelaporan, ATR masih dalam proses, BBPPMDDTT Jakarta menunggu penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Selain rincian – rincian di atas, ada juga rincian mutasi aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

*Mutasi Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	115.537.418.571,00
Mutasi Tambah	1.457.102.336,00
Pembelian	697.741.298,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	496.001.038,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	198.608.000,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	64.752.000,00
Mutasi Kurang	19.462.638.638,00
Hibah Keluar	12.965.376.300,00
Transfer Keluar	3.998.805.938,00
Koreksi Pencatatan	1.878.310.000,00
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	619.396.400,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	750.000,00
Saldo Akhir	97.531.882.269,00
Akumulasi Penyusutan	814.850.192,00
Nilai Bersih	96.717.032.077,00

Adapun rincian mutasi aset tetap lainnya per eselon I dan per kode barang terdapat pada **lampiran 37**.

C.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
sebesar
Rp9.581.539.269,00*

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo konstruksi dalam pengerjaan Per 31 Desember 2022 dan 2021 masing –masing sebesar Rp9.581.539.269,00 dan Rp17.670.622.284,00. Terdapat penurunan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp8.089.083.015,00 atau 45,78 persen dibandingkan tahun 31 Desember 2021. Adapun rincian KDP per Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

*Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per UKE-I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

UKE I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Ditjen PPKTrans	9.528.089.269,00	17.617.172.284,00	-45,92%
BPSDM	53.450.000,00	53.450.000,00	0,00%
Jumlah	9.581.539.269,00	17.670.622.284,00	-45,78%

1. Rincian perbandingan saldo KDP Ditjen PPKTrans per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

*Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Ditjen PPKTrans
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Satker	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KAB. ACEH UTARA	-	599.096.100,00	-100,00%
DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. LUWU TIMUR	2.037.759.100,00	2.037.759.100,00	0,00%
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU	702.612.351,00	702.612.351,00	0,00%
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN	6.787.717.818,00	6.787.717.818,00	0,00%
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. SIDRAP	-	8.089.083.015,00	-100,00%
Jumlah	9.528.089.269,00	18.216.268.384,00	-47,69%

Penjelasan KDP Ditjen PPKTrans sebagai berikut:

- a) Disnakertrans Kab. Aceh Utara mempunyai KDP berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp599.096.100,00 ini merupakan kesalahan pembukuan. JIJ ini merupakan persediaan, dan sudah dilakukan reklas ke persediaan. Sehingga saldo KDP Disnakertrans Kab. Aceh Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00
- b) Disnakertrans Kab. Luwu Timur mempunyai KDP berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.037.759.100,00 masih dalam tahap pengerjaan di tahun 2022
- c) Disnakertrans Prov. Bengkulu mempunyai KDP berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp702.612.351,00. Awalnya KDP ini akan dilanjutkan pada tahun 2021, akan tetapi terdapat refocusing anggaran sehingga KDP ini akan dilanjutkan pada tahun 2022
- d) KDP yang terdapat pada Satker Pusat Ditjen PPKTrans merupakan KDP pada satker yang tidak dalam pengerjaan pada tahun 2022 ini. Rincian KDP yang tidak dalam pengerjaan sebagai berikut:
 - Disnakertrans Kab. Kolaka Timur sebesar Rp109.494.994,00 belum ditindaklanjuti sampai dengan saat ini
 - Disnakertrans Kab. Pesisir Selatan sebesar Rp463.361.920,00 belum ditindaklanjuti sampai dengan saat ini
 - Disnakertrans Kab. Halmahera Selatan sebesar Rp2.802.594.000,00 dihentikan permanen
 - Disnakertrans Kab. Aceh Selatan sebesar Rp1.142.974.765,00. KDP ini masih dalam proses hukum sehingga belum bisa ditindaklanjuti sampai saat ini
 - Disnakertrans Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp1.169.402.839,00. KDP ini masih dalam proses hukum sehingga belum bisa ditindaklanjuti sampai saat ini
 - Disnakertrans Kab. Donggala sebesar Rp717.852.000,00. KDP ini masih dalam proses hukum sehingga belum bisa ditindaklanjuti sampai saat ini
 - Disnakertrans Kab. Takalar sebesar Rp202.805.000,00. KDP ini masih dalam proses hukum sehingga belum bisa ditindaklanjuti sampai saat ini
 - Disnakertrans Kab. Bolaang Mongondow Timur sebesar Rp179.232.300,00 telah dihentikan pada tahun 2013 namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut
- e) Disnakertrans Kab. Sidrap mempunyai KDP berupa Gedung dan

Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.037.759.100,00 sudah menjadi aset definitif. namun KDP ini berasal dari belanja 526, sehingga sudah dilakukan reklas ke persediaan. Saldo KDP pada Disnakertrans Kab. Sidrap per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00

2. Saldo KDP BPSDM per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.450.000,00 berdasarkan DIPA BPPMDDTT Denpasar Tahun Anggaran 2020 Nomor:DIPA-067-09.2.350485/2020 tanggal 5 Desember 2019 terdapat alokasi Belanja Modal Pembangunan Gedung dan Bangunan Senilai Rp3.797.782.000,00 telah di realisasikan sebesar Rp53.450.000, dengan rincian sebagai berikut:

1) Perencanaan *Homestay*

- Perencanaan Pembuatan *Home Stay* senilai Rp53.450.000,00
- Nomor dan tanggal kontrak: SPK Nomor:22.2/K05/KU.02.02/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.
- Nama Konsultan/Perusahaan PT. Dafrosa alamat jalan Gandapura No. 15 Denpasar
- Jangka waktu pengerjaan selama 45 hari dari tanggal 02 Maret s.d 15 April 2020

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, anggaran belanja modal gedung dan bangunan direalokasi untuk menangani pandemi. Sehubungan dengan tidak dilanjutkannya KDP tersebut, maka Kepala BPPMDDTT Denpasar akan mengajukan usulan penghapusan ke Sekretariat Jenderal.

Selain rincian konstuksi dalam pengerjaan per Unit Kerja Eselon I, ada juga rincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

*Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	17.670.622.284,00
Mutasi Tambah	4.188.515.699,00
Perolehan/Penambahan KDP	3.490.765.929,00
Pengembangan KDP	509.376.170,00
Perolehan Lainnya KDP	188.373.600,00
Mutasi Kurang	12.277.598.714,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	10.680.549.014,00
Koreksi Pencatatan KDP	799.665.600,00
Penghapusan/Penghentian KDP	599.096.100,00
Pengembangan Melalui KDP	198.288.000,00
Saldo Akhir	9.581.539.269,00

Adapun rincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan per eselon I terdapat pada **lampiran 38**.

C.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp804.458.924.758,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing – masing sebesar (Rp804.458.924.758,00) dan (Rp725.372.452.628,00). Adapun rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

*Rincian Nilai Buku Aset Tetap
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2022	Nilai Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	411.831.979.599,00	363.176.530.594,00	48.655.449.005,00
Gedung dan Bangunan	592.704.642.830,00	81.542.748.565,00	511.161.894.265,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	840.224.928.086,00	358.924.795.407,00	481.300.132.679,00
Aset Tetap Lainnya	97.531.882.269,00	814.850.192,00	96.717.032.077,00
Jumlah	1.942.293.432.784,00	804.458.924.758,00	1.137.834.508.026,00

C.1.3 Piutang Jangka Panjang

Piutang
Jangka
Panjang
Rp0,00

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kementerian Akuntansi merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA. Saldo piutang jangka panjang pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp0,00 dan Rp30.714.287,00. Adapun rincian perbandingan Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dengan 2021 terdiri dari:

*Rincian Piutang Jangka Panjang
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	30.714.287,00	(100,00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	(1.535.714,00)	(100,00)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	-	29.178.573,00	(100,00)
Jumlah	-	29.178.573,00	(100,00)

C.1.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Piutang
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan
Ganti Rugi
Rp0,00

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Saldo piutang tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp0,00 dan Rp30.714.287,00. Adapun rincian piutang tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi per Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per UKE-I Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

UKE I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Dijten PPKTrans	-	30.714.287,00	-100,00%
Jumlah	-	30.714.287,00	-100,00%

Saldo Piutang tagihan tuntutan perbendaharaan/TGR per 31 Desember 2021 merupakan Pencatatan atas hilangnya kendaraan dinas roda 4 sesuai dengan atensi temuan hasil audit surat Itjen No.Rhs.232/PW.03.01/VII/2019 Ditjen PKP2Trans Tanggal 30 Juli 2019, dimana piutang tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR sesuai dengan time line penyelesaian pengembalian kerugian negara di tahun 2022 sebesar Rp30.714.287,00 merupakan piutang jangka panjang yang harus dibayarkan atau dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu bulan juli tahun 2022. Tahun 2022 sudah dilakukan penyetoran ke kas negara tanggal 11 januari 2022 sebesar Rp2.000.000,00, tanggal 25 April 2022 sebesar Rp5.000.000,00 dan pelunasan tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp81.514.287,00.

C.1.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan
Piutang
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan
Ganti Rugi
Rp0,00

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing – masing piutang. Saldo penyisihan piutang tidak tertagih – tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti

rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp0,00 dan (Rp1.535.714,00). Adapun rincian penyisihan piutang tidak tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per UKE-I Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

UKE I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Dijten PPKTrans	-	(1.535.714,00)	-100,00%
Jumlah	-	(1.535.714,00)	-100,00%

C.1.3.3 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Netto) Rp0,00

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya dikurangi dengan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing – masing piutang. Saldo piutang tagihan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi (netto) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp0,00 dan Rp29.178.573,00.

C.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp537.556.576.822,00

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp537.556.576.822,00 dan Rp610.309.249.784,00. Adapun rincian aset lainnya per akun sebagai berikut:

Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Aset Tak Berwujud	20.643.950.764,00	9.304.684.004,00	121,87
Aset Lain-lain	1.329.277.877.603,00	1.428.971.979.371,00	(6,98)
Akumulasi Penyusutan/ amortisasi Aset Lainnya	(812.365.251.545,00)	(827.967.413.591,00)	(1,88)
Jumlah	537.556.576.822,00	610.309.249.784,00	(11,92)

C.1.4.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp20.643.950.764,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp20.643.950.764,00 dan Rp9.304.684.004,00. Aset Tak Berwujud mengalami kenaikan sebesar Rp11.339.266.760,00 atau 121,87 persen dibandingkan tahun 31 Desember 2021. Adapun rincian aset tak berwujud per Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud per UKE-I
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

UKE I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Ditjen PDP	1.330.274.100,00	658.899.100,00	101,89%
Ditjen PPDT	852.370.000,00	852.370.000,00	0,00%
Ditjen PPKTrans	1.808.464.000,00	1.808.464.000,00	0,00%
BPSDM	7.566.861.260,00	117.500.000,00	6339,88%
Setjen	1.360.180.000,00	1.866.680.000,00	-27,13%
BPI	7.725.801.404,00	4.000.770.904,00	93,11%
Jumlah	20.643.950.764,00	9.304.684.004,00	121,87%

Penambahan aset tak berwujud pada Ditjen PDP merupakan pengembangan aplikasi *e-Human Development Worker* (eHDW) Berbasis Android dan Web Ver. 2.0 pada Program *Investing In Nutrition Early Years* (INEY) yang bersumber dari dana hibah luar negeri sebesar Rp671.375.000,00, aset tak berwujud ini berasal dari aset yang diserahkan kepada *World Bank* untuk penunjang kegiatan INEY. Pengembangan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa khususnya pada Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan atas aplikasi tersebut dikarenakan untuk sesuai kebutuhan pelaporan oleh pendamping desa dan kader pembangunan manusia untuk mempermudah pengumpulan data, pemantauan, pencatatan dan pelaporan secara digital dalam mendukung peningkatan konvergensi intervensi gizi kepada keluarga 1.000 hari pertama kelahiran, namun sampai saat ini Ditjen PDP masih menunggu Berita Acara Serah Terima atas pengakuan awal aplikasi tersebut yang bersumber dari *World Bank*.

Penambahan aset tak berwujud BPSDM merupakan pengembangan aplikasi *Online Video Platform* (OVP) Akademi Desa 4.0 yang bersumber dari dana hibah luar negeri pada Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)/ *Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Project* sebesar Rp7.449.361.260,00. Aplikasi ini ditujukan kepada masyarakat pedesaan, dimana masyarakat dapat

mengakses materi video digital yang dapat menginspirasi mereka untuk meningkatkan kehidupan mereka dan sebagai sarana pendukung pembelajaran dan peningkatan kapasitas di desa. OVP yang akan digunakan adalah platform semacam dimana pengguna dapat mengunggah, memutar dan mengunduh berbagai macam video pembelajaran dan inovasi.

Kenaikan saldo aset tak berwujud pada BPI berupa transaksi penambahan saldo awal dengan rincian barang berupa software yang pada awalnya software ini dicatat sebagai akun persediaan. Sehingga pada tahun 2022 telah dilakukan koreksi sehingga software ini telah dicatat sebagai aset tak berwujud BPI sebesar Rp3.725.030.500,00.

Adapun rincian aset tak berwujud per akun sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud per Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Software	12.582.799.504,00	8.692.894.004,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	8.061.151.260,00	611.790.000,00
Jumlah	20.643.950.764,00	9.304.684.004,00

Selain rincian aset tak berwujud per Eselon I dan per akun, ada juga rincian mutasi aset tak berwujud per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

*Mutasi Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	9.304.684.004,00
Mutasi Tambah	13.534.671.760,00
Pengembangan Melalui KDP	5.990.141.760,00
Pembelian	2.918.294.500,00
Penambahan Saldo Awal	2.495.641.000,00
Perolehan Lainnya	1.002.900.000,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	892.713.250,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	234.981.250,00
Mutasi Kurang	2.195.405.000,00
Koreksi Pencatatan	1.688.905.000,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	506.500.000,00
Saldo Akhir	20.643.950.764,00
Akumulasi Penyusutan	8.803.296.554,00
Nilai Bersih	11.840.654.210,00

Adapun rincian mutasi aset tak berwujud per eselon I dan per kode barang terdapat pada **lampiran 39**.

C.1.4.2 Aset Lain – lain

Aset Lain-lain
Rp1.329.277.877.603,00

Aset Lain-lain adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta dalam proses penghapusan dari BMN. Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp1.329.277.877.603,00 dan Rp1.428.971.979.371,00. Adapun rincian aset lain – lain per Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

*Rincian Aset Lain – lain per UKE-I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

UKE I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Ex PDT	9,00	9,00	0,00%
Itjen	88.835.600,00	81.485.600,00	9,02%
Ditjen PDP	271.412.030,00	271.412.030,00	0,00%
Ditjen PEID	6.532.948.636,00	29.780.259.403,00	-78,06%
Ditjen PPDT	466.873.169.171,00	472.033.745.621,00	-1,09%
Ditjen PPKTrans	843.787.677.338,00	914.754.970.440,00	-7,76%
Ditjen PKTrans	-	(18.110.620.627,00)	-100,00%
BPSDM	1.834.168.528,00	2.014.282.378,00	-8,94%
Setjen	9.755.428.291,00	28.012.206.517,00	-65,17%
BPI	134.238.000,00	134.238.000,00	0,00%
Jumlah	1.329.277.877.603,00	1.428.971.979.371,00	-6,98%

Saldo pada Ditjen PKTrans per 31 Desember 2021 sebesar (Rp18.110.620.627,00) ini merupakan data anomali yang terjadi akibat permasalahan pada aplikasi E-Rekon pada saat likuidasi. Sehingga pada tahun 2022 ini telah dilakukan Normalisasi BMN untuk mengatasi permasalahan anomali data tersebut.

Selain rincian aset lain – lain per Eselon I, ada juga rincian mutasi aset lain – lain per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

*Mutasi Aset Lain – lain
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	1.428.971.979.371,00
Mutasi Tambah	24.212.040.651,00
Normalisasi BMN	18.110.620.627,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	3.885.703.224,00
Transfer Masuk (Henti Guna)	2.215.716.800,00
Mutasi Kurang	123.906.142.419,00
Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan)	94.191.008.869,00
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	18.208.500.958,00
Penghapusan	7.239.358.852,00
Penghapusan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	4.155.616.340,00
Jurnal Manual	88.062.400,00
Normalisasi BMN	23.595.000,00
Saldo Akhir	1.329.277.877.603,00
Akumulasi Penyusutan	803.561.954.991,00
Nilai Bersih	525.715.922.612,00

Adapun rincian mutasi aset lain – lain per eselon I terdapat pada lampiran 40

C.1.4.3 Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp812.365.251.545,00)*

Akumulasi penyusutan/ amortisasi aset lainnya merupakan kontra akun aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset lainnya. Saldo akumulasi penyusutan/ amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar (Rp812.365.251.545,00) dan (Rp827.967.413.591,00). Adapun rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

*Rincian Nilai Buku Aset Lainnya
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2022	Nilai Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Software	12.582.799.504,00	8.803.296.554,00	3.779.502.950,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	8.061.151.260,00	-	8.061.151.260,00
Aset Lain-lain	9,00	-	9,00
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1.329.248.877.594,00	803.532.954.991,00	525.715.922.603,00
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	29.000.000,00	29.000.000,00	-
Jumlah	1.349.921.828.367,00	812.365.251.545,00	537.556.576.822,00

C.2 Kewajiban

C.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban
Jangka
Pendek
Rp18.127.452.
827,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp18.127.452.827,00 dan Rp5.128.106.901,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per Akun disajikan sebagai berikut:

*Rincian Kewajiban Jangka Pendek per Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Aset Lancar	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Utang kepada Pihak Ketiga	17.642.123.060,00	4.356.743.309,00	304,94%
Pendapatan Diterima Dimuka	461.829.767,00	759.320.242,00	-39,18%
Uang Muka dari KPPN	23.500.000,00	10.716.000,00	119,30%
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	1.327.350,00	-100,00%
Jumlah	18.127.452.827,00	5.128.106.901,00	253,49%

C.2.1.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp17.642.123.
060,00

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp17.642.123.060,00 dan Rp4.356.743.309,00. Adapun rincian utang kepada pihak ketiga per Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

*Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Eselon I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

UKE I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Itjen	680.782.933,00	-	100,00%
Ditjen PDP	1.538.448.625,00	180.400,00	852698,57%
Ditjen PEID	3.458.690.934,00	2.394.399.107,00	44,45%
Ditjen PPDT	2.036.643.795,00	1.144.263.304,00	77,99%
Ditjen PPKTrans	1.898.011.275,00	-	100,00%
BPSDM	2.585.920.839,00	93.152.423,00	2676,01%
Setjen	4.560.739.817,00	724.748.075,00	529,29%
BPI	882.884.842,00	-	100,00%
Jumlah	17.642.123.060,00	4.356.743.309,00	304,94%

Penjelasan Utang Kepada Pihak Ketiga per Eselon I sebagai berikut:

1. Utang kepada pihak ketiga yang terdapat pada Itjen sebesar Rp80.782.933,00 merupakan Belanja Tunjangan Kinerja Bulan Desember TA 2022 yang akan di bayar bulan Januari 2023 dengan menggunakan DIPA tahun 2023
2. Utang kepada pihak ketiga yang terdapat pada Ditjen PDP sebesar Rp1.538.448.625,00 merupakan beban pegawai tahun 2021 atas tunjangan kinerja penyesuaian jabatan fungsional dan beban pegawai tahun 2022 atas uang makan dan tunjangan kinerja Bulan Desember tahun 2022 yang baru akan dibayar di Bulan Januari tahun 2023.
3. Utang kepada pihak ketiga yang terdapat pada Ditjen PEID sebesar Rp3.458.690.934,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Transfer Masuk dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (350456) kepada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (350453) pada Bulan September Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp2.520.886.011,00. Pada tanggal 10 November 2021 telah dibayar oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp149.392.754,00 dengan No SPM 30208 dan No SP2D 211331303011227 sehingga masih tersisa utang sebesar Rp2.371.493.257,00
 - b) Jurnal Penyesuaian Khusus berupa Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp1.087.197.677,00 dengan rincian Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Pegawai PNS dan CPNS Bulan Desember TA 2022 sebanyak 245 pegawai dengan nilai sebesar Rp1.008.599.677,00 dan Belanja Pegawai berupa Uang Makan Bulan Desember TA 2022 sebanyak 232 pegawai dengan nilai sebesar Rp78.598.000,00.
4. Utang kepada pihak ketiga yang terdapat pada Ditjen PPDT sebesar Rp2.004.694.495,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Utang kepada pihak ketiga lainnya (MAK 212191) sebesar Rp1.076.561.155,00 merupakan tunggakan atas kegiatan – kegiatan yang belum terselesaikan pembayarannya pada tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:
 - Utang kepada pihak ketiga atas nama PT. Mutiara Teknotama atas pekerjaan pengadaan 5 paket peternakan modern (paket 2) di Kab. Pandeglag tahun 2015 sebesar Rp572.679.000,00
 - Utang kepada pihak ketiga atas nama Rektor IPB C/Q Lembaga

- atas pekerjaan bantuan stimulant pengembangan sumber daya hayati berbasis daratan di Kab. Musiwaras tahun 2015 sebesar Rp503.882.155,00
- b) Belanja pegawai yang masih harus dibayar (MAK 212111) sebesar Rp960.082.640,00 merupakan pengakuan atas pembayaran gaji pegawai periode Desember 2022 yang dibayarkan di Januari 2023 dengan rincian Uang Makan PNS senilai Rp55.212.000,00, Tunjangan Kinerja sebesar Rp872.921.340,00, Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp31.773.100,00 dan Tunjangan PPh PNS sebesar Rp176.200,00
5. Utang kepada pihak ketiga yang terdapat pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp1.898.011.275,00 elanja pegawai tunjangan kinerja bulan desember tahun 2022 yang dibayarkan di bulan januari tahun 2023 menggunakan DIPA Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 067.07.350467 tahun 2023
6. Utang kepada pihak ketiga yang terdapat pada BPSDM sebesar Rp2.585.920.839,00 terdiri dari pembayaran kewajiban seperti tunjangan kinerja, uang makan, gaji, honor tpp dan tagihan listrik dan tagihan telepon bulan Desember 2022 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2023
7. Utang kepada pihak ketiga yang terdapat pada Setjen sebesar Rp4,560.739.817,00 merupakan belanja pegawai bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari sebesar Rp1.928.735.985,00 dan belanja barang berupa tagihan listrik bulan Desember yang akan dibayarkan pada bulan Januari sebesar Rp2.632.003.832,00
8. Utang kepada pihak ketiga yang terdapat pada BPI sebesar Rp882.884.842,00 merupakan belanja pegawai yang masih harus dibayarkan berupa tunjangan kinerja dan uang makan bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari sebesar Rp838.669.306,00 dan Tunjangan Kinerja yang dibayarkan pada tahun 2023 sebesar Rp38.509.887,00

C.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp461.829.76
7,00*

Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp461.829.767,00 dan Rp759.320.242,00. Adapun rincian pendapatan diterima dimuka per Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per UKE-I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

UKE I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Setjen	461.829.767,00	759.320.242,00	-39,18%
Jumlah	461.829.767,00	759.320.242,00	-39,18%

Rincian pendapatan diterima dimuka pada Setjen dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Setjen
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Nama Rekanan	Nilai SSBP	Akrual s.d. 2021	Akrual s.d. 2022	Pendapatan Diterima Dimuka 2021	Pendapatan Diterima Dimuka 2022
CV Latere	36.112.000	36.112.000,00		-	-
PT Dayamitra Telekomunikasi	70.000.000	70.000.000,00		-	-
Usaha Cafe Gita Sabela	11.310.000	11.310.000,00		-	-
Warung Kopi Manaek Sinaga	4.000.000	4.000.000,00		-	-
PT BRI	109.734.000	109.734.000,00		-	-
PT BNI	446.946.000	209.596.548,66	149.120.074,14	237.349.451	88.229.377
ATM BRI	4.403.642	4.403.642,00		-	-
Usaha Foto Copy Nur Kholiq	26.948.000	19.237.877,78	7.710.122,22	7.710.122	-
PT Antara Persada Sukses	39.587.000	30.514.979,17	9.072.020,83	9.072.021	-
PT Telekomunikasi Sehuler	70.000.000	60.472.222,22	9.527.777,78	9.527.778	-
Gedung Makarti 2019	353.000.000	208.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000	-
CV Latere	15.046.667	15.046.667,00		-	-
PT Dayamitra Telekomunikasi	299.932.000	68.040.129,63	99.977.333,33	231.891.870	131.914.537
Usaha Cafe Gita Sabela	2.827.500	2.827.500,00		-	-
CV Amooraa	36.000.000	36.000.000,00		-	-
Gedung Makarti 2021	118.769.000		118.769.000	118.769.000	-
Warung Kopi Manaek Sinaga	12.000.000		1.666.667		10.333.333
PT Candra Mulya Phaliphi	21.000.000		2.916.667		18.083.333
PT BRI	183.353.500	48.250.921	115.802.211		19.300.368
Usaha Foto Copy Nur Kholiq	30.000.000		4.166.667		25.833.333
Usaha Foto Copy Dahirin	17.962.000		14.968.333		2.993.667
Usaha Cafe Gita Sabela	11.000.000		9.686.111		1.313.889
Travel Haryono	14.017.500		5.840.625		8.176.875
Mura Cafe (Wirawati)	13.074.000		6.428.050		6.645.950
Gedung Makarti Sewa 2023	136.555.000				136.555.000
Koperasi Kantor Kemendesaa	26.420.750		11.008.646		15.412.104
Total				759.320.243	464.791.767

C.2.1.3 Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka
Dari KPPN
Rp23.500.000,
00

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo uang muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp23.500.000,00 dan Rp10.716.000,00.

C.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka
Pendek
Lainnya
Rp0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara. Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.327.350,00. Saldo utang

jangka pendek lainnya per tanggal 31 Desember 2021 merupakan Pajak PPh 21, PPh 22 dan PPN pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (350453) yang disetorkan pada tanggal 1 Januari 2022 dengan NTB 000000048829 NTPN 6D37C4ER1JAUEBAJ sehingga saldo pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

C.3 Ekuitas

Ekuitas
Rp2.565.869.6
69.288,00

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp2.565.869.669.288,00 dan Rp2.763.006.771.618,00.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan-LO**

Pendapatan
Rp2.539.735.159,00

Jumlah Pendapatan-LO pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.539.735.159,00 dan Rp1.899.336.545,00.

Rincian Pendapatan-LO pada periode 31 Desember 2022 per jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Pendapatan-LO per jenis pendapatan
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	406.793.680,00	526.976.180,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.639.915.428,00	657.961.299,00
425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	(10.000.000,00)	-
425311	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada FKTP	335.200,00	-
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	-	276.997.097,00
425764	Pendapatan Jasa lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	13.142,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	147.679.812,00	251.595.418,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	3.992.552,00
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN	309.090.909,00	-
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	45.920.130,00	181.800.857,00
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2022		2.539.735.159,00	1.899.336.545,00

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp406.793.680,00 berasal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di satuan kerja Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu (350480) berupa penjualan komoditi kelapa sawit, karet, dan kelapa.

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp1.639.915.428,00 merupakan pendapatan dari sewa Gedung Makarti, lahan parkir, pugasera, kantin dan fotocopy yang terdapat pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal (350088).

Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada FKTP berasal dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (350453) sebesar Rp335.200,00 berupa potongan iuran BPJS atas pembayaran kekurangan gaji pegawai pensiun Januari 2021-Oktober 2022.

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar

Rp147.679.812,00 berasal dari:

1. Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (350456) sebesar Rp17.233.333,00 terdiri dari:
 - a. Denda penyelesaian atas pekerjaan jalan kawasan Kab. Kubu Raya senilai Rp14.274.500,00
 - b. Denda penyelesaian atas Sarana Air Bersih Kab. Buol senilai Rp2.575.583,00
 - c. Paket Fullboard Meeting dalam rangka Rapat Antar Lembaga “Workshop Evaluasi Pelaksanaan TOT dan Konsolidasi Tahap 2 Pengajar TOT dalam rangka Bimbingan Teknis Kader Pembangunan Manusia (KPM)” senilai Rp383.250,00
2. Satuan Kerja Ditjen PEID (350453) sebesar Rp15.686.360,00 terdiri dari:
 - a. Denda keterlambatan Kegiatan Pembangunan Pariwisata Terpadu di Kab. Ende TA. 2018 a.n. CV. Ile Ape senilai Rp3.000.000,00
 - b. Denda penyelesaian pekerjaan pemerintah a.n. Kali Urip Konsultan senilai Rp1.776.060,00
 - c. Denda penyelesaian pekerjaan pemerintah a.n. PT. Ciriajasa Engineering Consultans senilai Rp10.910.300,00
3. Satuan Kerja Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (350454) sebesar Rp41.227.824,00 adalah pendapatan atas keterlambatan penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana desa wisata di Kab. Mentawai oleh CV. Bina Kamopoe Karya
4. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp73.532.295,00 terdiri dari:
 - a. Denda atas penyelesaian pekerjaan fasilitas umum berupa Balai Desa, Rumah KaUPT, dan Gudang di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir senilai Rp8.390.800,00
 - b. Denda atas supervisi pekerjaan fasilitas umum di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir senilai Rp252.192,00
 - c. Denda keterlambatan pekerjaan jembatan semi permanen di Puuhialu Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp1.942.168,00
 - d. Denda penyelesaian pekerjaan pengembangan ternak kambing Kabupaten Sigi senilai Rp3.718.800,00
 - e. Denda atas pekerjaan peningkatan jembatan di Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp995.656,00
 - f. Denda keterlambatan pekerjaan pada Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Bone Bone Bantimurung di Kawasan Masamba Kabupaten

- Luwu Utara senilai Rp7.416.900,00
- g. Denda penyelesaian pekerjaan peningkatan jembatan Kabupaten Gorontalo senilai Rp1.148.742,00
 - h. Denda atas pekerjaan sarana air bersih di Kabupaten Boalemo senilai Rp2.721.358,00
 - i. Denda atas pengadaan sarana produksi mendukung Prukades Kabupaten Simeuleu senilai Rp928.393,00
 - j. Denda atas supervisi peningkatan jembatan terdampak bencana pada Kabupaten Simeuleu senilai Rp343.200,00
 - k. Denda atas peningkatan jembatan pada Kabupaten Simeuleu senilai Rp6.019.920,00
 - l. Denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dalam pekerjaan pembukaan Lahan di Lokasi Tanjung Buka Kabupaten Bulungan senilai Rp4.994.682,00
 - m. Denda keterlambatan pelaksanaan pembangunan jembatan lanjutan Lokasi Lampasio Kabupaten Toli-Toli senilai Rp2.409.624,00
 - n. Denda atas pekerjaan pembangunan sumur bor di KTM Air Terang Desa Kokobuka Kabupaten Buol senilai Rp1.047.000,00
 - o. Denda atas pekerjaan sumur bor di Kabupaten Buol senilai Rp4.084.960,00
 - p. Denda atas pekerjaan peningkatan jalan UPT Poongan di Kabupaten Buol senilai Rp6.318.000,00
 - q. Denda atas di Kabupaten Bengkulu Utara senilai Rp20.799.900,00 merupakan denda hasil koreksi yang awalnya disetor di satker yang tidak aktif, dicatat sesuai surat DJPB S-24/PB.06/2023

Pendapatan dalam rangka Refund PHLN sebesar Rp309.090.909,00 berasal dari satuan kerja Sekretariat Jenderal. Pendapatan tersebut merupakan pengembalian Refund *Ineligible Expenditure* atas temuan audit *Village Innovation Project Loan* IBRD 8217-ID Tahun 2018 a.n. PT. Media Televisi Indonesia sesuai LAI BPKP No: LAI-25/D105/02/2019 Tanggal 28 Juni 2019.

Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp45.920.130,00 berasal dari:

1. Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser (350245) senilai Rp45.894.920,00 terdiri dari:
 - a. Pengembalian Termin I Pekerjaan Supervisi Pembangunan SAB Non Standar pada Kontrak Pekerjaan Supervisi Pembangunan Permukiman Transmigrasi TA. 2021 CV. Wahana Cahaya

- Konsultan senilai Rp6.840.000,00
- b. Pengembalian Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Jembatan Standar pada Kontrak Pekerjaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi CV. Aulia Prima Teknik senilai Rp11.812.360,00
 - c. Pengembalian Uang Muka Pekerjaan Pembangunan SAB Non Standar pada Kontrak Pekerjaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi TA. 2021 CV. Aulia Prima Teknik senilai Rp19.322.560,00
 - d. Pengembalian Termin I Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jembatan Standar pada Kontrak Pekerjaan Supervisi Pembangunan Permukiman Transmigrasi TA. 2021 CV. Cahaya Konsultan senilai Rp7.920.000
2. Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura (255164) senilai Rp10,00 adalah setoran pengembalian sisa uang persediaan pada saat penyesuaian proporsi uang persediaan
 3. Satuan Kerja Setjen (350088) senilai Rp25.200,00 adalah kelebihan setor UP Nihil akhir tahun
 - d. Adapun Rincian Pendapatan-LO pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Pendapatan-LO per Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
067.03	Ditjen PDP	17.233.333,00	3.720,00
067.04	Ditjen PEID	16.021.560,00	3.000.000,00
067.05	Ditjen PDTu	-	381,00
067.06	Ditjen PPDT	41.227.824,00	831.215,00
067.07	Ditjen PPKTrans	119.427.215,00	374.083.075,00
067.09	BPSDM	406.793.690,00	582.466.730,00
067.10	Setjen	1.939.031.537,00	934.958.396,00
067.11	BPI	-	3.993.028,00
JUMLAH		2.539.735.159,00	1.899.336.545,00

D.2 Beban Pegawai

*Beban
Pegawai
Rp276.994.678.239,00*

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp276.994.678.239,00 dan Rp253.339.847.313,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan

yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai per akun pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Pegawai per Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
511111	Beban Gaji Pokok PNS	99.505.590.082,00	98.129.091.700,00
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(45.043.500,00)	(25.066.380,00)
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1.647.989,00	1.667.575,00
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(26.607,00)	(15.873,00)
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	5.973.923.783,00	6.073.140.188,00
511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	(3.829.610,00)	-
511122	Beban Tunj. Anak PNS	1.435.918.073,00	1.443.451.390,00
511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	(206.350,00)	-
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	7.938.340.000,00	9.096.263.050,00
511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	(2.881.681.960,00)	(38.237.100,00)
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	10.737.747.788,00	5.779.399.000,00
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(42.626.807,00)	(24.087.628,00)
511125	Beban Tunj. PPh PNS	801.591.726,00	695.454.017,00
511126	Beban Tunj. Beras PNS	4.904.209.980,00	4.824.620.400,00
511127	Beban Tunj. Kemahalan PNS	-	119.350.000,00
511129	Beban Uang Makan PNS	16.705.468.777,00	16.287.126.000,00
511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	(3.282.950,00)	(948.900,00)
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	134.715.000,00	-
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	2.246.210.000,00	2.308.050.000,00
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(9.807.929,00)	(70.552.426,00)
511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	373.405.000,00	427.905.000,00
512211	Beban Uang Lembur	1.010.075.000,00	625.351.000,00
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	128.331.408.707,00	107.705.834.084,00
512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	(119.067.953,00)	(17.947.784,00)
JUMLAH		276.994.678.239,00	253.339.847.313,00

Terdapat peningkatan yang signifikan pada Beban Tunjangan Fungsional PNS yang terjadi karena penyesuaian pergantian jabatan dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Terdapat peningkatan yang signifikan juga terdapat pada Beban Uang Lembur yang terjadi karena penyesuaian jam kerja yang telah diberlakukannya kembali kebijakan *work from office* (WFO) 100% di tengah Pandemi COVID-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan SE Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Masa PPKM Mikro COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali Tanggal 24 Mei 2022.

Rincian Beban Pegawai pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 menurut Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Pegawai per Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
067.02	Inspektorat Jenderal	20.419.540.713,00	18.831.293.420,00
067.03	Ditjen PDP	31.816.110.891,00	25.439.231.945,00
067.04	Ditjen PEID	28.766.475.819,00	23.994.327.353,00
067.05	Ditjen PDTu	-	3.385.611.245,00
067.06	Ditjen PPDT	24.432.422.510,00	21.029.340.168,00
067.07	Ditjen PPKTrans	37.619.048.519,00	31.971.963.291,00
067.08	Ditjen PKTrans	-	4.561.611.511,00
067.09	BPSDM	60.695.002.337,00	59.005.567.707,00
067.10	Sekretariat Jenderal	49.101.217.163,00	43.898.127.905,00
067.10	BPI	24.144.860.287,00	21.222.772.768,00
JUMLAH		276.994.678.239,00	253.339.847.313,00

Penurunan yang signifikan pada Beban Pegawai terjadi pada Ditjen PDTu dan Ditjen PKTrans yang disebabkan oleh adanya likuidasi yang terjadi akibat perubahan Organisasi dan Tata Kerja yang baru di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp20.230.031.
948,00*

Beban Persediaan pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp20.230.031.948,00 dan Rp25.558.272.980,00. Beban Persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan menurut Akun pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Perbandingan Beban Persediaan menurut Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
593111	Beban Persediaan konsumsi	20.039.122.508,00	25.335.287.720,00
593131	Beban Persediaan bahan baku	1.267.200,00	8.335.500,00
593149	Beban Persediaan lainnya	189.642.240,00	214.649.760,00
JUMLAH		20.230.031.948,00	25.558.272.980,00

Beban Persediaan Bahan Baku terdapat pada Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Banjarmasin (350484) digunakan untuk pembelian cartridge printer.

Beban Persediaan Lainnya sebesar Rp189.642.240,00 terdapat pada Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu (350480) sebesar Rp189.462.000,00 digunakan untuk pembelian pupuk. Selain itu pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal (350088) sebesar Rp180.240,00 merupakan pemakaian colartusin syrup 60ml sebanyak 11 buah dengan nilai Rp110.000,00, spasminal (tab) sebanyak 26 buah dengan nilai Rp25.740,00, dan salicyl talk botol sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar Rp35.600,00. Selain itu juga terdapat penyesuaian persediaan stock opname fisik salicyl talk botol senilai Rp8.900,00.

Rincian Beban Persediaan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I pada periode 30 September 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Persediaan per Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
067.02	Inspektorat Jenderal	1.890.348.900,00	1.930.113.100,00
067.03	Ditjen PDP	1.892.010.698,00	3.142.024.765,00
067.04	Ditjen PEID	1.171.716.123,00	3.474.382.170,00
067.06	Ditjen PPDT	2.972.570.858,00	3.800.692.029,00
067.07	Ditjen PPKTrans	1.890.072.577,00	1.639.572.740,00
067.08	Ditjen PKTrans	-	198.936.750,00
067.09	BPSDM	3.830.002.898,00	4.724.393.394,00
067.10	Sekretariat Jenderal	4.910.319.863,00	4.760.748.534,00
067.11	BPI	1.672.990.031,00	1.887.409.498,00
JUMLAH		20.230.031.948,00	25.558.272.980,00

Penurunan yang signifikan pada Beban Persediaan terjadi pada Ditjen PKTrans disebabkan oleh adanya likuidasi yang terjadi akibat perubahan Organisasi dan Tata Kerja yang baru di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp2.061.299.1
79.866,00*

Beban Barang dan Jasa pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.061.299.179.866,00 dan Rp1.986.396.103.325,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa menurut akun pada periode 31

Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa menurut Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	30 September 2021
Beban Keperluan Perkantoran	86.232.708.876,00	81.588.037.663,00
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	(1.712.800,00)	(10.978.314,00)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	18.238.580,00	33.432.750,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	570.600.545,00	403.230.880,00
Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	(324.800,00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	11.418.629.000,00	13.862.704.000,00
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(2.309.500,00)	(890.000,00)
Beban Barang Operasional Lainnya	6.709.562.745,00	6.504.310.500,00
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	(393.250,00)	(316.878,00)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6.226.918.204,00	9.671.399.987,00
Beban Bahan	49.526.244.217,00	48.514.110.210,00
Pengembalian Beban Bahan	-	(106.007.406,00)
Beban Honor Output Kegiatan	17.409.110.771,00	19.461.002.000,00
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(55.150.000,00)	(22.030.000,00)
Beban dalam Rangka Refund Dana PHLN	2.305.605.887,00	2.378.907.600,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	17.637.965.099,00	21.126.667.643,00
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	(17.956.006,00)	(16.020.175,00)
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	1.351.000.000,00	195.000.000,00
Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	14.700.000.000,00	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	231.332.000,00	4.929.309.575,00
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	34.647.787,00	-
Beban Langganan Listrik	10.953.812.194,00	8.845.891.101,00
Beban Langganan Telepon	378.723.443,00	696.021.336,00
Beban Langganan Air	459.926.403,00	384.302.454,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	10.136.087.484,00	8.738.323.021,00
Beban Jasa Pos dan Giro	44.408.140,00	7.484.550,00
Beban Jasa Konsultan	34.266.426.375,00	51.704.611.514,00
Pengembalian Beban Jasa Konsultan	(884.808.130,00)	-
Beban Sewa	48.910.845.130,00	40.881.317.491,00
Pengembalian Beban Sewa	-	(22.884.000,00)
Beban Jasa Profesi	9.690.346.000,00	13.392.305.120,00
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(135.495.500,00)	(113.995.000,00)
Beban Jasa Lainnya	1.731.635.400.708,00	1.639.255.148.847,00
Pengembalian Beban Jasa Lainnya	(147.629.355,00)	(578.155.206,00)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.613.233.719,00	14.600.242.525,00
Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	(3.115.000,00)	(73.601.123,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	85.976.100,00	167.545.460,00
JUMLAH	2.061.299.179.866,00	1.986.396.103.325,00

Terdapat penurunan yang signifikan pada beban yang berkaitan dengan Penanganan Pandemi COVID-19 seperti Beban Barang Operasional –

Penanganan Pandemi COVID-19 dan Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19. Hal ini karena telah dilaksanakannya pemberlakuan WFO 100% sehingga berkurangnya pembebanan atas sarana penggunaan aplikasi jarak jauh (*Zoom Meeting*) karena pelaksanaan rapat yang telah dilakukan di dalam kantor atau luar kantor. Selain itu berkurangnya pelaksanaan tes deteksi COVID-19 dan berkurangnya pengadaan COVID kit (masker, vitamin, penambah daya tahan tubuh) juga menyebabkan penurunan Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19.

Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomtabel terdapat pada Satuan Kerja Ditjen PEID (350454) sebesar Rp3.397.787,00 berupa pengadaan mesin gerinda tangan senilai Rp683.720,00, pengadaan mesin bor tangan senilai Rp978.900,00, pengadaan tool set senilai Rp799.900,00, dan pengadaan microwave oven senilai Rp935.267,00. Pada Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu (350480) sebesar Rp 31.250.000,00 adalah pembelian sofa meubelair sebanyak 125 unit.

Beban Dalam Rangka Refund PHLN sebesar Rp2.305.605.887,00 terdapat pada Ditjen PEID senilai RP 587.160.387,00 adalah pembayaran langsung penyelesaian sisa refund of *Ineligible Expenditures Village Innovation Program (VIP) Loan* IBRD 8217 Tahun 2018 dan 2019 sesuai dengan Surat Direktorat PKN Nomor S-41/PB.3/PB.34/2022 Tanggal 21 September 2022. Pada Ditjen PDP sebesar Rp1.174.640.881,00 merupakan refund of *Ineligible Expenditure* Pinjaman Luar Negeri Bank Dunia untuk *Loan* IBRD 8217ID Program Inovasi Desa Tahun 2019 sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Nomor S-53/PB.3/PB.34/2022 Tanggal 14 November 2022. Pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp543.804.619 merupakan pengembalian Refund *Ineligible Expenditure* atas temuan audit *Village Innovation Project Loan* IBRD 8217-ID Tahun 2018 a.n. PT. Media Televisi Indonesia sesuai LAI BPKP No: LAI-25/D105/02/2019 Tanggal 28 Juni 2019.

Adapun Rincian Beban Barang dan Jasa menurut Unit Kerja Eselon I pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa menurut Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
067.02	Inspektorat Jenderal	8.147.279.245,00	7.274.707.784,00
067.03	Ditjen PDP	49.246.309.614,00	87.336.325.094,00
067.04	Ditjen PEID	137.495.336.415,00	68.846.759.761,00
067.05	Ditjen PDTu	-	312.300.000,00
067.06	Ditjen PPDT	19.139.062.866,00	22.629.435.051,00
067.07	Ditjen PPKTrans	69.000.842.919,00	76.161.905.716,00
067.08	Ditjen PKTrans	-	858.608.799,00
067.09	BPSDM	1.614.509.218.216,00	1.595.513.533.635,00
067.10	Sekretariat Jenderal	105.355.965.510,00	93.916.827.084,00
067.11	BPI	58.405.165.081,00	33.547.700.401,00
JUMLAH		2.061.299.179.866,00	1.986.398.103.325,00

Penurunan yang signifikan pada Beban Barang dan Jasa terjadi pada Ditjen PDTu dan Ditjen PKTrans yang disebabkan oleh adanya likuidasi yang terjadi akibat perubahan Organisasi dan Tata Kerja yang baru di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp43.275.631.
168,00*

Beban Pemeliharaan pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp43.275.631.168,00 dan Rp43.154.768.245,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 menurut jenis akun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Rincian Beban Pemeliharaan Menurut Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.550.741.427,00	23.287.934.821,00
523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	(21.824.981,00)
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	81.924.547,00	20.481.137,00
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.168.031.090,00	18.609.947.855,00
523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	(14.643.886,00)
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	483.006.183,00	481.083.474,00
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	880.505.022,00	634.854.575,00
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	107.589.899,00	112.342.650,00
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.498.000,00	39.740.000,00
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	1.335.000,00	4.852.600,00
JUMLAH		43.275.631.168,00	43.154.768.245,00

Beban Asuransi Gedung dan Bangunan sebesar Rp81.924.547,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal (350088) yang merupakan asuransi Gedung A Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang ada di Kalibata dengan pertimbangan tinggi potensi kerusakan karena letak geografis.

Adapun perbandingan Beban Pemeliharaan menurut Unit Kerja Eselon I

per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Beban Pemeliharaan Menurut Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
067.02	Inspektorat Jenderal	637.632.984,00	396.845.618,00
067.03	Ditjen PDP	1.652.349.618,00	2.224.754.956,00
067.04	Ditjen PEID	2.091.275.844,00	2.950.053.241,00
067.06	Ditjen PPDT	1.134.891.006,00	1.305.407.702,00
067.07	Ditjen PPKTrans	2.389.296.012,00	1.969.743.053,00
067.08	Ditjen PKTrans	-	8.309.500,00
067.09	BPSDM	5.610.480.453,00	6.577.150.091,00
067.10	Sekretariat Jenderal	25.392.997.563,00	23.296.181.004,00
067.11	BPI	4.366.707.688,00	4.426.323.080,00
JUMLAH		43.275.631.168,00	43.154.768.245,00

Penurunan yang signifikan pada Beban Pemeliharaan terjadi pada Ditjen PKTrans yang disebabkan oleh adanya likuidasi yang terjadi akibat perubahan Organisasi dan Tata Kerja yang baru di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp217.422.65
9.921,00

Beban Perjalanan Dinas pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp217.422.659.921,00 dan Rp223.764.953.002,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Menurut Akun pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas menurut Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
524111	Beban Perjalanan Biasa	137.224.343.989,00	144.458.973.870,00
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(2.132.390.927,00)	(2.708.659.087,00)
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	638.905.164,00	444.603.688,00
524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	(50.000,00)
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	49.591.321.014,00	50.067.747.081,00
524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(1.969.507.475,00)	(1.830.565.328,00)
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	13.877.900,00	5.891.602.970,00
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.543.307.588,00	28.484.833.165,00
524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(382.868.128,00)	(1.043.533.357,00)
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	561.425.106,00	-
524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	(28.440.600,00)	-
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.465.694.000,00	-
524219	Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	(103.007.710,00)	-
JUMLAH		217.422.659.921,00	223.764.953.002,00

Beban Perjalanan Dinas–Penanganan Pandemi COVID-19 mengalami

penurunan yang signifikan dikarenakan pemberlakuan WFO 100% yang dilaksanakan di tengah Pandemi COVID-19 sehingga pegawai masuk seperti biasa tanpa adanya transport WFO. Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri mengalami peningkatan karena sudah tidak dibatasinya perjalanan Luar Negeri di tengah Pandemi COVID-19.

Adapun perbandingan Beban Perjalanan Dinas pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 menurut Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Beban Perjalanan Dinas menurut Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
067.02	Inspektorat Jenderal	7.546.521.626,00	4.106.793.261,00
067.03	Ditjen PDP	22.496.783.401,00	41.483.782.798,00
067.04	Ditjen PEID	37.114.939.586,00	36.753.367.788,00
067.06	Ditjen PPDT	11.926.119.789,00	13.691.760.249,00
067.07	Ditjen PPKTrans	31.061.811.467,00	30.979.097.981,00
067.08	Ditjen PKTrans	-	198.957.848,00
067.09	BPSDM	71.812.002.257,00	62.033.196.380,00
067.10	Sekretaris Jenderal	23.589.528.967,00	18.371.802.386,00
067.11	BPI	11.874.952.828,00	16.146.194.311,00
JUMLAH		217.422.659.921,00	223.764.953.002,00

Penurunan yang signifikan pada Beban Perjalanan Dinas terjadi pada Ditjen PKTrans yang disebabkan oleh adanya likuidasi yang terjadi akibat perubahan Organisasi dan Tata Kerja yang baru di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat/
Pemda
Rp220.341.171.932,00*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp220.341.171.932,00 dan Rp199.388.318.251,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah menurut akun pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
menurut Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
526111	Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	2.677.000,00	-
526115	Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	52.989.000,00	-
526121	Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	566.000.000,00	271.500.000,00
526122	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	2.090.000.000,00	555.000.000,00
526123	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	40.004.151.000,00	58.130.113.271,00
526124	Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	13.165.849.000,00	19.318.431.727,00
526223	Beban Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah	24.997.550,00	-
526224	Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	117.950.600,00	-
526224	Pengembalian Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	(7.416.900,00)	-
526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	34.900.000.000,00	42.385.000.000,00
526312	Pengembalian Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	(480.000,00)	(5.000,00)
526321	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	18.008.690.000,00
593122	Beban Persediaan Tanah Bangunan Untuk Dijual Atau Diserahkan Kepada Masyarakat	37.592.303.113,00	12.896.389.622,00
593123	Beban Persediaan Hewan dan Tanaman Untuk Dijual Atau Diserahkan Kepada Masyarakat	8.227.612.100,00	-
593124	Beban Persediaan Peralatan dan Mesin Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	8.453.428.163,00	6.310.944.608,00
593125	Beban Persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	69.039.267.907,00	29.091.304.234,00
593127	Beban Persediaan Aset Lain-lain untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	140.413.148,00
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	6.111.843.399,00	12.280.536.641,00
JUMLAH		220.341.171.932,00	199.388.318.251,00

Beban Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang – Penanganan Pandemi COVID-19 mengalami penurunan yang signifikan karena berkurangnya hibah pada masyarakat yang diperuntukan untuk pengadaan COVID kit (contoh: masker).

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat menurut Unit Kerja Eselon I lingkup KDPDTT per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat Menurut
Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
067.03	Ditjen PDP	56.205.588.300,00	80.012.047.622,00
067.04	Ditjen PEID	34.849.520.000,00	42.079.995.000,00
067.06	Ditjen PPDT	7.894.928.463,00	24.316.836.900,00
067.07	Ditjen PPKTrans	121.391.135.169,00	52.979.438.729,00
JUMLAH		220.341.171.932,00	199.388.318.251,00

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp156.380.571.634,00*

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp156.380.571.634,00 dan Rp165.222.108.471,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi menurut akun pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	28.468.883.729,00	33.721.765.172,00
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.508.057.631,00	16.576.092.770,00
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	44.830.988.955,00	54.513.496.970,00
591312	Beban Penyusutan Irigasi	9.153.727.899,00	9.282.340.833,00
591313	Beban Penyusutan Jaringan	1.918.891.044,00	1.959.762.291,00
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.498.750,00	-
592115	Beban Amortisasi Software	2.074.251.906,00	1.350.233.593,00
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	55.421.271.720,00	47.818.416.842,00
JUMLAH		156.380.571.634,00	165.222.108.471,00

Sedangkan rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi menurut Unit Kerja Eselon I pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut UKE-I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
067.02	Inspektorat Jenderal	1.186.269.372,00	1.185.099.576,00
067.03	Ditjen PDP	2.448.401.891,00	2.798.635.622,00
067.04	Ditjen PEID	3.555.078.291,00	4.488.766.711,00
067.05	Ditjen PDTu	-	-
067.06	Ditjen PPDT	26.044.821.980,00	27.579.746.498,00
067.07	Ditjen PPKTrans	92.573.813.046,00	95.495.700.819,00
067.08	Ditjen PKTrans	-	97.254.124,00
067.09	BPSDM	9.890.785.898,00	11.693.803.752,00
067.10	Sekretariat Jenderal	13.794.142.244,00	16.311.576.325,00
067.11	BPI	6.887.258.912,00	5.571.525.044,00
JUMLAH		156.380.571.634,00	165.222.108.471,00

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan*

Beban Penyisihan Tak Tertagih pada periode 31 Desember 2022 dan

Piutang Tak
Tertagih
Rp220.461,00

2021 adalah masing masing sebesar Rp220.461,00 dan Rp51.191.861,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih menurut akun pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih menurut Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	1.070.604,00	46.766.147,00
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbedaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(850.143,00)	4.425.714,00
JUMLAH		220.461,00	51.191.861,00

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tuntutan Perbedaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar (Rp850.143,00) muncul dalam sistem saat pencatatan pelunasan piutang atas Tuntutan Ganti Rugi berupa kendaraan pada Modul Piutang dengan nomor 00012/STLSSBP/350467/2022 Tanggal 11 Juli 2022.

Sedangkan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih menurut Unit Kerja Eselon I di lingkup KDPDTT per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada table berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per Unit Kerja Eselon I*

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
067.07	Ditjen PPKTrans	(891.523,00)	4.425.714,00
067.09	BPSDM	952.500,00	-
067.10	Sekretariat Jenderal	159.484,00	46.766.147,00
Jumlah		220.461,00	51.191.861,00

D.10 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit
Kegiatan Non
Operasional
Rp53.125.347.
512,00

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(64.776.062.077,00)	(55.661.107.168,00)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	567.621.022,00	209.807.086,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	65.343.683.099,00	55.870.914.254,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	11.650.714.565,00	3.963.083.853,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11.929.800.525,00	3.963.083.853,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	279.085.960,00	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(53.125.347.512,00)	(51.698.023.315,00)

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar menurut akun pada

periode 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar menurut Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	549.563.447,00	209.807.086,00
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	18.057.575,00	-
JUMLAH		567.621.022,00	209.807.086,00

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per Unit Kerja Eselon I pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Per Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
067.09	BPSDM	256.005.022,00	98.055.887,00
067.10	Sekretariat Jenderal	311.616.000,00	111.751.199,00
Jumlah		567.621.022,00	209.807.086,00

Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Unit Kerja Eselon I pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Per Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
067.02	Inspektorat Jenderal	53.796.005,00	-
067.03	Ditjen PDP	-	3.675.999.950,00
067.04	Ditjen PEID	3.245.672.562,00	-
067.07	Ditjen PPKTrans	61.704.094.279,00	51.800.396.858,00
067.09	BPSDM	340.120.253,00	196.353.017,00
067.10	Sekretariat Jenderal	-	198.164.429,00
Jumlah		65.343.683.099,00	55.870.914.254,00

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya menurut akun pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya menurut Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
425793	Pendapatan penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	-	8.038.228,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.771.250.330,00	65.677.190,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8.690.450.523,00	3.754.208.355,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	41.997.660,00	105.230.080,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	54.705.300,00	29.930.000,00
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	1.122.954.472,00	-
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	248.442.240,00	-
JUMLAH		11.929.800.525,00	3.963.083.853,00

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Unit Kerja Eselon I pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Per Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
067.02	Inspektorat Jenderal	108.450.299,00	12.558.329,00
067.03	Ditjen PDP	917.913.745,00	1.589.797.213,00
067.04	Ditjen PEID	3.733.418.298,00	206.423.133,00
067.05	Ditjen PDTu	-	257.871.848,00
067.06	Ditjen PPDT	1.394.971.170,00	504.714.085,00
067.07	Ditjen PPKTrans	2.461.840.574,00	675.296.846,00
067.08	Ditjen PKTrans	-	11.435.558,00
067.09	BPSDM	719.552.697,00	378.211.859,00
067.10	Sekretariat Jenderal	1.456.788.203,00	262.296.190,00
067.11	BPI	1.136.865.539,00	64.478.792,00
Jumlah		11.929.800.525,00	3.963.083.853,00

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya menurut akun pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya menurut Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	271.757.440,00	-
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	7.328.520,00	-
JUMLAH		279.085.960,00	-

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Unit Kerja Eselon I pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Per Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
067.07	Ditjen PPDT	260.339.240	-
067.09	BPSDM	11.418.200	-
067.10	Sekretariat Jenderal	7.328.520	-
Jumlah		279.085.960	-

D.11 SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL

Defisit LO
Rp3.046.529.757.522,00

Nilai Defisit Laporan Operasional pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.046.529.757.522,00 dan Rp2.946.674.250.218,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp2.763.006.771.618,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.763.006.771.618,00 dan Rp2.739.050.841.674,00. Nilai Ekuitas Awal Tahun 2022 merupakan nilai Ekuitas Akhir Neraca per 31 Desember 2021 pada Laporan Keuangan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2021 *Audited*.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp3.046.529.757.522,00

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah defisit sebesar Rp3.046.529.757.522,00 dan Rp2.946.674.250.218,00. Defisit LO merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit kegiatan operasional, Surplus/Defisit kegiatan non operasional, dan Surplus/Defisit pos Luar Biasa. Rincian Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 disajikan dalam Laporan Operasional.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Rp0,00

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,00

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Namun demikian, semenjak tahun 2021 penilaian persediaan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) sehingga tidak menimbulkan penyesuaian nilai aset persediaan.

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp3.400.000,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Jumlah Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp3.400.000,00 dan Rp0,00.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan per Akun untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
391113	Koreksi Nilai Persediaan	3.400.000,00	-
JUMLAH		3.400.000,00	-

Rincian Koreksi Nilai Persediaan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan Menurut UKE-I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
067.07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3.400.000,00	-
JUMLAH		3.400.000,00	-

Koreksi Nilai Persediaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp3.400.000,00 terjadi pada satker:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara (067.07.350257) sebesar Rp3.400.000,00 merupakan koreksi saldo awal persediaan

E.4.3. Koreksi Atas Reklasifikasi

*Koreksi atas
Reklasifikasi
Rp94.310.635,
00*

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp94.310.635,00 dan (Rp116.816.479,00).

Koreksi atas Reklasifikasi digunakan untuk menyajikan akun Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi Masuk dan keluar Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Koreksi atas Reklasifikasi merupakan selisih nilai reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk atas persediaan/ aset tetap/ aset lainnya.

Adapun rincian Koreksi atas Reklasifikasi menurut Akun per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi atas Reklasifikasi Menurut Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	94.310.635,00	(116.816.479,00)
JUMLAH		94.310.635,00	(116.816.479,00)

Rincian Koreksi atas Reklasifikasi pada masing-masing Unit Kerja Eselon I per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi atas Reklasifikasi Menurut UKE-I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-	1,00
067.07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	94.310.635,00	(11.448,00)
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	-	-
067.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-	(116.805.032,00)
JUMLAH		94.310.635,00	(116.816.479,00)

Koreksi atas Reklasifikasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp94.310.635,00 terjadi pada satker:

1. Pada satker Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh (067.07.350120) sebesar Rp6.998.129,00 merupakan koreksi atas penggunaan kode referensi yang sama namun nilai barangnya berbeda
2. Pada satker Dinas Nakertrans Kabupaten Banyuasin (067.07.350170) sebesar Rp6.794.800,00 merupakan koreksi atas penggunaan kode referensi yang sama namun nilai barangnya berbeda
3. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan (067.07.350282) sebesar Rp841.410,00 merupakan koreksi atas penggunaan kode referensi yang sama namun nilai barangnya berbeda
4. Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo (067.07.350415) sebesar Rp7.497.550,00 merupakan koreksi atas penggunaan kode referensi yang sama namun nilai barangnya berbeda
5. Pada satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju (067.07.350440) sebesar Rp1.168.046,00 merupakan koreksi atas penggunaan kode referensi yang sama namun nilai barangnya berbeda
6. Dinas Keluarga Sejahtera, Mobduk, dan Transmigrasi Kabupaten Simeuleu (067.07.350450) sebesar Rp71.010.700,00 merupakan

koreksi atas penggunaan kode referensi yang sama namun nilai barangnya berbeda

E.4.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih
Revaluasi Aset
Tetap
Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang (revaluasi) aset tetap. Revaluasi Aset Tetap merupakan penilaian kembali Barang Milik Negara yang dilaksanakan oleh Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilaian Kembali BMN.

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut merupakan koreksi hasil penilaian kembali atas BMN.

E.4.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp1.737.140.534,00

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.737.140.534,00 dan Rp26.241.018.426,00.

Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset antara lain disebabkan adanya pencatatan barang berlebih, koreksi nilai wajar hasil perbaikan penilaian atas barang berlebih, dan adanya penyusutan transaksional atas aset obyek revaluasi non tanah sebagai akibat perubahan nilai wajar atas penilaian BMN sebelum Tahun 2019 serta koreksi nilai aset akibat dampak transaksi normalisasi aset.

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi menurut Akun per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Menurut Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(383.520.840,00)	35.621.686.613,00
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	2.120.661.374,00	(9.380.668.187,00)
JUMLAH		1.737.140.534,00	26.241.018.426,00

Sedangkan Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi menurut Unit Kerja Eselon I per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi UKE-I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	40.861.907,00	-
067.06	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	(4.026.554.333,00)	-
067.07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	(1.046.631.799,00)	(11.186.526.294,00)
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	4.963.126.790,00	18.670.158.458,00
067.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	147.431.471,00	24.250.058.504,00
067.10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	(476.384.876,00)	591.236.610,00
067.11	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2.135.291.374,00	(6.083.908.852,00)
JUMLAH		1.737.140.534,00	26.241.018.426,00

Koreksi Nilai aset non revaluasi sebesar Rp407.435.485,00 terdapat pada:

A. Ditjen PDP sebesar Rp40.861.907,00 terjadi pada satker:

- 1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo (03.310720) sebesar Rp40.861.907,00 dikarenakan adanya koreksi atas pengajuan form pendataan rekonsiliasi internal TAYL sesuai Surat Edaran Direktur Akuntansi dan Pelaporan Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-40/PB/PB.6/2022 tanggal 30 September 2022 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2022 untuk menyesuaikan saldo yang benar (seharusnya) yaitu nihil pada akun akumulasi penyusutan alat komunikasi sebesar Rp14.876.175,00; akumulasi penyusutan peralatan pemancar sebesar Rp12.548.210,00 dan akumulasi penyusutan instalasi pembangkit listrik sebesar Rp13.437.522,00.

B. Ditjen PPDT sebesar (Rp4.026.554.333,00) terjadi pada satker Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (06.350454) sebesar (Rp4.026.554.333,00) dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi nilai aset tetap non revaluasi berasal dari penghapusan aset lainnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal No. 83 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Penghapusan BMN yang dihibahkan

oleh satker Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal kepada Pemda Kab. Samosir berupa Bangunan untuk Kandang sebesar Rp1.161.766.552,00 dan Gedung untuk Bengkel/Hanggar Lainnya sebesar Rp216.029.339,00.

- Penghapusan aset lainnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal No. 84 Tahun 2017 tentang Penetapan Penghapusan BMN yang dihibahkan oleh satker Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal kepada Pemda Kab. Pinrang sebesar Rp770.448.442,00 berupa Bnagunan Gedung Kantor Lainnya.
- Koreksi pencatatan Gedung dan Bangunan dalam renovasi sebesar Rp1.878.310.000,00 berdasarkan BAST BMN No.77/KEU.09.05/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022.

C. Ditjen PPKTrans sebesar (Rp1.046.631.799,00) terjadi pada satker:

- 1) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (07.350467) sebesar Rp342.689.515,00 merupakan dampak normalisasi dan koreksi penyusutan karena adanya hibah keluar.
- 2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidrap (07.418191) sebeasr (Rp20.944.400,00) dikarenakan adanya koreksi tambahan nilai aset sehingga terbentuk koreksi pada penyusutan aset.
- 3) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar (07.419109) sebesar (Rp1.368.376.914,00) merupakan dampak normalisasi aset dan koreksi penyusutan aset karena adanya hibah keluar.

D. Ex Ditjen PKTrans sebesar Rp4.963.126.790,00 terjadi pada satker:

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara (08.350254) sebesar Rp3.454.860.589,00 merupakan dampak normalisasi aset.
- 2) Sekretariat Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (08.350458) sebesar Rp1.508.266.201,00 terdiri dari Rp1.518.839.152,00 merupakan dampak normalisasi aset serta sebesar (Rp10.572.951,00) merupakan hasil jurnal koreksi perbaikan selisih rekon internal TAYL yang dilakukan secara terpusat oleh Direktorat SITP Kemenkeu.

E. BPSDM sebesar Rp147.431.471,00 terjadi pada satker:

- 1) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makassar (09.350483) sebesar

Rp147.431.471,00 merupakan koreksi pencatatan nilai bertambah yang berasal dari hasil audit operasional pelaksanaan tupoksi dan anggaran periode bulan Januari sampai dengan April Tahun 2021 oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

F. Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sebesar (Rp476.384.876,00) terjadi pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (10.350088) dikarenakan adanya transaksi pencatatan barang yang dihapuskan sesuai dengan:

- Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022 sebanyak 9 kode barang
- Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Nomor 89 Tahun 2022 tanggal 06 April 2022 sebanyak 3.744 kode barang
- Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Nomor 153 Tahun 2022 tanggal 5 September 2022 sebanyak 2 kode barang
- Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Nomor 162 Tahun 2022 tanggal 19 September 2022 sebanyak 4 kode barang.

G. BPI sebesar Rp2.135.291.374,00 terjadi pada satker Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (11.670892) dikarenakan koreksi penambahan saldo awal berupa *software* komputer.

E.4.6. Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-lain
(Rp11.379.361.490,00)*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar (Rp11.379.361.490,00) dan Rp3.254.611.865,00.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Adapun rincian Koreksi lain-lain menurut Akun per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Lain-Lain Menurut Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
391119	Koreksi Lainnya	(11.379.361.490,00)	3.254.611.865,00
JUMLAH		(11.379.361.490,00)	3.254.611.865,00

Sedangkan Koreksi Lain-Lain menurut Unit Kerja Eselon I per 31

Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Lain-Lain Menurut Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
067.02	Inspektorat Jenderal	(218.584.718,00)	-
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	(1.657.452.516,00)	(194.441.469,00)
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	(1.708.440.966,00)	149.392.754,00
067.06	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	(2.204.565.868,00)	3.213.048.845,00
067.07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	(1.944.143.887,00)	849.361,00
067.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	(2.770.981.801,00)	-
067.10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	(810.814.305,00)	85.762.374,00
067.11	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	(64.377.429,00)	-
JUMLAH		(11.379.361.490,00)	3.254.611.865,00

Koreksi Lain-Lain sebesar (Rp11.379.361.490,00) dijelaskan sebagai berikut:

- A. Inspektorat Jenderal** sebesar (Rp218.584.718,00) terjadi pada satker Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (02.350452) yang merupakan koreksi beban atas kekurangan pembayaran belanja pegawai gaji, tunjangan kinerja, Gaji ke-13 dan THR Tahun 2021 yang dibayarkan pada Tahun 2022.
- B. Ditjen PDP** sebesar (Rp1.657.452.516,00) terjadi pada satker Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (03.350456) yang merupakan koreksi beban atas kekurangan pembayaran belanja pegawai gaji, tunjangan kinerja, dan THR Tahun 2021 yang dibayarkan pada Tahun 2022 dan 2023.
- C. Ditjen PEID** sebesar (Rp1.708.440.966,00) terjadi pada satker Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (04.350453) yang merupakan koreksi beban atas kekurangan pembayaran belanja pegawai gaji, tunjangan fungsional, tunjangan kinerja, Gaji ke-13, dan THR Tahun 2021 yang dibayarkan pada Tahun 2022.
- D. Ditjen PPDT** sebesar (Rp2.204.565.868,00) terjadi pada satker Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (06.350454) yang merupakan koreksi beban atas kekurangan pembayaran belanja pegawai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan fungsional, dan Uang Makan sebesar (Rp2.272.268.017,00) serta sebesar Rp67.702.149,00 yang merupakan saldo dari transaksi

koreksi atas utang pihak ketiga lainnya yang dilakukan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa Hak Tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang dan dalam hal ini penyedia tidak melakukan penagihan sejak Tahun 2015. Selain itu, koreksi dilakukan karena adanya dokumen Surat Pernyataan dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana selaku pelaksana kegiatan yang menyatakan bahwa utang yang timbul atas pekerjaan tersebut merupakan selisih hiung dan sudah dianggap lunas dengan rincian utang sebagai berikut:

1. Bantuan Rehabilitas Rumah Layak Huni oleh OMS SIKILIANG SAIYO sebesar Rp67.500.000,00
2. Bantuan Rehabilitas Rumah Layak Huni oleh BANTUAN REHABILITAS RUMAH 4 sebesar Rp500,00
3. Pelaksanaan Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Lingkar Kalukubula oleh PT. PAKARENA MITRA SEJATI sebesar Rp636,00
4. Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktuks Ekonomi Kapal Penangkapan Ikan 3 GT di Kab. Gorontalo, Kepulauan Talaud, Maluku Tenggara Barat, Ende, Sabu Raijua, Alor, Manggarai Barat, Raja Ampat (Ekonomi-1B) TA. 2012 oleh PT. SUSANTO SOEKARDI BOAT YARD sebesar Rp85,00
5. Pekerjaan Bantuan GT Kab. Seram Bagian Barat, Maluku Barat Daya, Merauke, dan Mappi (Ekonomi-4C) TA. 2012 oleh PT. SUSANTO SOEKARDI BOAT YARD sebesar Rp200.928,00

E. Ditjen PPKTrans sebesar (Rp1.944.143.887,00) terjadi pada satker:

- 1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Wajo (07.350285) sebesar Rp564.347,00 dikarenakan penghapusan nilai penyisihan piutang yang sudah lunas.
- 2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe (07.350307) sebesar Rp635.743,00 dikarenakan penghapusan nilai penyisihan piutang yang sudah lunas.
- 3) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (07.350467) sebesar (Rp1.946.197.810,00) terdiri dari (Rp1.958.130.255,00) dikarenakan koreksi beban atas kekurangan pembayaran belanja pegawai tunjangan jabatan Tahun 2021 yang dibayarkan Tahun 2022 serta sebesar Rp11.932.445,00 merupakan penghapusan nilai penyisihan piutang yang sudah lunas.
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidrap

(07.418191) sebesar Rp154.439,00 dikarenakan penghapusan nilai penyisihan piutang yang sudah lunas.

- 5) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna (07.419124) sebesar Rp699.394,00 dikarenakan penghapusan nilai penyisihan piutang yang sudah lunas.

F. BPSDM sebesar (Rp2.770.981.801,00) terjadi pada satker:

- 1) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon (09.215155) sebesar (Rp216.820.287,00) yang merupakan koreksi beban atas pembayaran kekurangan belanja pegawai tunjangan fungsional, tunjangan kinerja, dan Uang Makan Tahun 2021 yang dibayarkan pada Tahun 2022.
- 2) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura (09.255164) sebesar (Rp124.642.537,00) yang merupakan koreksi beban atas pembayaran kekurangan belanja pegawai tunjangan kinerja Tahun 2021 yang dibayarkan pada Tahun 2022
- 3) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (09.350475) sebesar (Rp1.743.201.638,00) terdiri dari (Rp1.744.254.138,00) yang merupakan koreksi beban atas pembayaran kekurangan belanja pegawai tunjangan fungsional dan Uang Makan Tahun 2021 yang dibayarkan pada Tahun 2022 serta sebesar Rp1.052.500,00 merupakan koreksi penyisihan piutang tidak tertagih-PNBP.
- 4) Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta (09.350481) sebesar (Rp330.113.724,00) yang merupakan koreksi beban atas pembayaran kekurangan belanja pegawai gaji, tunjangan fungsional, dan tunjangan kinerja Tahun 2021 yang dibayarkan pada Tahun 2022
- 5) Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta (09.350482) sebesar (Rp325.088.131,00) koreksi beban atas pembayaran kekurangan belanja pegawai gaji, tunjangan fungsional, dan tunjangan kinerja Tahun 2021 yang dibayarkan pada Tahun 2022
- 6) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makassar (09.350483) sebesar (Rp2.830.344,00) koreksi beban atas pembayaran kekurangan belanja pegawai gaji dan tunjangan fungsional Tahun 2021 yang

dibayarkan pada Tahun 2022

- 7) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin (09.350484) sebesar (Rp6.772.600,00) koreksi beban atas pembayaran kekurangan belanja pegawai gaji, tunjangan fungsional, dan tunjangan kinerja Tahun 2021 yang dibayarkan pada Tahun 2022
- 8) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar (09.350485) sebesar (Rp821.100,00) koreksi beban atas pembayaran kekurangan belanja pegawai tunjangan kinerja Tahun 2021 yang dibayarkan pada Tahun 2022
- 9) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru (09.350486) sebesar (Rp20.691.440,00) koreksi beban atas pembayaran kekurangan belanja pegawai tunjangan kinerja Tahun 2021 yang dibayarkan pada Tahun 2022

G. Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sebesar (Rp810.814.305,00)

(Rp17.322.712,00) terjadi pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (10.350088) dikarenakan adanya jurnal koreksi piutang dan penyisihan piutang awal tahun dalam rangka penerapan modul piutang Sakti dan adanya transaksi koreksi piutang.

H. BPI sebesar (Rp64.377.429,00) terjadi pada satker Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (11.670892) yang merupakan koreksi beban atas pembayaran kekurangan belanja pegawai gaji, tunjangan fungsional, dan tunjangan kinerja Tahun 2021 yang dibayarkan pada Tahun 2022

E.5. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi
Antar Entitas
Rp2.858.937.1
65.513,00*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2.858.937.165.513,00 dan Rp2.941.251.366.350,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN. Adapun rincian Transaksi Antar Entitas menurut akun per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Transaksi Antar Entitas Menurut Akun
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	2.868.147.304.679,00	2.945.870.266.075,00
313121	Diterima dari Entitas Lain	(13.856.530.978,00)	(6.340.076.578,00)
313211	Transfer Keluar	(7.988.189.824,00)	(1.045.613.907.709,00)
313221	Transfer Masuk	7.526.321.374,00	1.045.726.340.602,00
391131	Pengesahan Hibah Langsung	5.276.200.702,00	2.314.965.200,00
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(685.479.587,00)	(706.221.240,00)
391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	517.539.147,00	-
JUMLAH		2.858.937.165.513,00	2.941.251.366.350,00

1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) sebesar (Rp13.856.530.978,00) dan Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp2.868.147.304.679,00

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar (Rp13.856.530.978,00) sedangkan DKEL sebesar Rp2.868.147.304.679,00.

- A. Diterima dari Entitas Lain (313121) sebesar (Rp13.856.530.978,00) merupakan realisasi pendapatan yang terdapat pada satker:
1. Inspektorat Jenderal sebesar (Rp108.450.299,00)
 2. Ditjen PDP sebesar (Rp935.147.078,00)
 3. Ditjen PEID sebesar (Rp3.749.439.858,00)
 4. Ditjen PPDT sebesar (Rp1.436.198.994,00)
 5. Ditjen PPKTrans sebesar (Rp2.167.210.704,00)
 6. BPSDM sebesar (Rp1.402.351.409,00)
 7. Setjen sebesar (Rp2.920.867.097,00)
 8. BPI sebesar (Rp1.136.865.539,00)
- B. Ditagihkan ke Entitas Lain (313111) sebesar Rp2.868.147.304.679,00 merupakan hasil dari realisasi belanja sebesar Rp2.872.738.025.794,00 dikurangi pengesahan hibah langsung sebesar Rp4.590.721.115,00 yang terdapat pada satker:
1. Inspektorat Jenderal sebesar Rp39.966.933.543,00
 2. Ditjen PDP sebesar Rp164.917.993.778,00
 3. Ditjen PEID sebesar Rp242.235.559.676,00
 4. Ditjen PPDT sebesar Rp66.644.131.656,00
 5. Ditjen PPKTrans sebesar Rp277.325.072.691,00

6. BPSDM sebesar Rp1.766.234.886.482,00
7. Setjen sebesar Rp209.172.786.488,00
8. BPI sebesar Rp101.649.940.365,00

2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

*Transfer
Masuk
sebesar
Rp7.526.321.3
74,00 dan
Transfer
Keluar
sebesar
(Rp7.988.189.
824,00)*

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp7.526.321.374,00 terdiri dari:

*Transfer Masuk
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

NO.	Jenis	Entitas Penerima	Nilai
1	Barang Konsumsi	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	731.000,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	45.000,00
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.004.273.259,00
		Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh	24.480.846,00
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara	248.744.250,00
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	429.263.109,00
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	88.847.460,00
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	33.340.824,00
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	243.216.600,00
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	726.302.028,00
		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua	29.575.149,00
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara	37.587.600,00
		Dinas Penanaman Modal dan ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	49.748.850,00
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat	939.839.694,00
4	Peralatan dan Mesin	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	29.850.000,00
		Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	55.500.000,00
		Badan Besar Pelatnan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1.522.503.000,00
		Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	49.666.500,00
		Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	147.050.000,00
		Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	1.125.837.450,00
5	Gedung dan Bangunan	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	3.495.934.488,00
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	(29.850.000,00)
		Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	(34.864.286,00)
		Badan Besar Pelatnan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	(1.522.503.000,00)
		Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	(31.642.715,00)
		Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	(147.050.000,00)
		Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	(1.028.308.732,00)
7	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2.215.716.800,00
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	(2.177.513.800,00)
JUMLAH			7.526.321.374,00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp7.988.189.824,00) terdiri dari:

*Transfer Keluar
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

NO.	Jenis	Entitas Pengirim	Nilai
1	Barang Konsumsi	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	731.000,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	45.000,00
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	2.850.946.410,00
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat	339.449.649,00
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	86.903.595,00
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	57.748.410,00
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku	520.171.605,00
4	Peralatan dan Mesin	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	70.361.000,00
		Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	111.783.000,00
		Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	17.399.000,00
		Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	105.166.500,00
		Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.116.593.450,00
		Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	1.505.104.000,00
5	Aset Tetap Renovasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	36.355.000,00
		Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	466.516.450,00
		Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	2.801.325.450,00
		Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	694.609.038,00
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	(70.361.000,00)
		Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	(86.249.750,00)
		Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	(17.399.000,00)
		Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	(66.507.001,00)
		Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	(1.047.397.982,00)
		Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	(1.505.104.000,00)
JUMLAH			7.988.189.824,00

Terdapat selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar sebesar Rp461.868.450,00 yang dijelaskan sebagai berikut:

- Adanya Transfer Masuk pada satker Sekretariat Jenderal berupa peralatan dan mesin sebesar Rp4.000.000,00 dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar (Rp1.200.000,00) yang berasal dari satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan (022.03.352596)
- Adanya Transfer Masuk pada satker Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(067.11.670892) berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebesar Rp2.215.716.800,00 dan akumulasi penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebesar (Rp2.177.513.800,00) yang berasal dari satker Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (026.11.452677).

- Adanya Transfer Keluar dari satker Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (067.03.350456) berupa Aset Tetap Renovasi sebesar Rp502.871.450,00 kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (010.08.634082) yang diterima sebagai aset Gedung dan Bangunan

3. Pengesahan Hibah Langsung, Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung, dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan Hibah Langsung
Rp5.276.200.702,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung
(Rp685.479.587,00)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL
Rp517.539.147,00

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga.

Adapun nilai pengesahan hibah langsung sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.276.200.702,00 dengan pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar (Rp685.479.587,00), sedangkan pengesahan hibah langsung TAYL sebesar Rp517.539.147,00 sesuai tabel berikut:

Rincian Pengesahan Hibah Langsung pada UKE-1 Per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	UKE-1	Nilai
391131	Pengesahan Hibah Langsung	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	5.276.200.702,00
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	(685.479.587,00)
391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	517.539.147,00
JUMLAH			5.108.260.262,00

Pengesahan Penerimaan Hibah Langsung sebesar Rp5.276.200.702,00 pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (067.03.350456) berasal dari penerimaan hibah langsung dari United Nations Children's Fund (UNICEF) dengan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung Nomor 01264.

Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sebesar (Rp685.479.587,00) pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (067.03.350456) sesuai dengan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Nomor 01265.

Pengesahan Hibah Langsung TAYL sebesar Rp517.539.147,00 pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (06.350454) merupakan pengesahan atas hibah langsung Tahun 2021 berupa *PV Solar System and Energy Storage System* dari Tatung Company, Taiwan.

E.6 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

*Penurunan
Ekuitas
Rp197.137.102.330,00*

Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan Kenaikan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebagai berikut (Rp197.137.102.330,00) dan Rp23.955.929.944,00. Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas

E.7 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp2.565.869.669.288,00*

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2.565.869.669.288,00 dan Rp2.763.006.771.618,00.

F. Pengungkapan Lain-Lain

F.1. Tindak Lanjut Temuan

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK – RI Tahun 2005-2021 sebagai berikut:

*Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

NO	UNIT KERJA	Rekomendasi		31-Dec				Sisa	
		Butir	Rp	Butir	%	Rp	%	Butir	Rp
A	Eks Trans								
	2005-2015	318	Rp7.217.422.862,11	141	44,34%	Rp4.919.023.035,55	68,15%	177	Rp2.298.399.826,56
B	Eks PDT								
	2005-2015	294	Rp16.804.825.298,75	228	77,55%	Rp15.653.990.500,97	93,15%	66	Rp1.150.834.797,78
	TOTAL A+B	612	Rp24.022.248.160,86	369	60,29%	Rp20.573.013.536,52	85,64%	243	Rp3.449.234.624,34
C	SOTK Lama								
1	Sekretariat Jenderal	90	Rp13.904.707.542,00	51	56,67%	Rp7.962.109.678,00	57,26%	39	Rp5.942.597.864,00
2	Inspektorat Jenderal	38	Rp820.383.116,00	34	89,47%	Rp797.550.182,00	97,22%	4	Rp22.832.934,00
3	Balilaflo	56	Rp4.402.571.741,00	46	82,14%	Rp3.980.799.481,00	90,42%	10	Rp421.772.260,00
4	Ditjen PPMD	148	Rp4.659.741.651,95	57	38,51%	Rp3.018.179.656,95	64,77%	91	Rp1.641.561.995,00
5	Ditjen PKP	174	Rp8.857.404.465,36	62	35,63%	Rp6.725.479.857,25	75,93%	112	Rp2.131.924.608,11
6	Ditjen PDT	153	Rp22.603.162.238,76	68	44,44%	Rp9.251.418.369,50	40,93%	85	Rp13.351.743.869,26
7	Ditjen PDTU	112	Rp13.341.887.356,60	66	58,93%	Rp11.259.546.627,70	84,39%	46	Rp2.082.340.728,90
8	Ditjen PKT	94	Rp3.677.941.044,17	62	65,96%	Rp3.452.210.941,02	93,86%	32	Rp225.730.103,15
9	Ditjen PKP2T	113	Rp17.454.346.780,91	56	49,56%	Rp11.584.806.209,50	66,37%	57	Rp5.869.540.571,41
	TOTAL C	978	Rp89.722.145.936,75	502	51,33%	Rp58.032.101.002,92	64,68%	476	Rp31.690.044.933,83
D	SOTK Baru								
1	Sekretariat Jenderal	26	Rp31.821.833,00	16	61,54%	Rp31.821.833,00	100,00%	10	Rp0,00
2	Inspektorat Jenderal	27	Rp0,00	22	81,48%	Rp0,00	0,00%	5	Rp0,00
3	Ditjen PDP	31	Rp192.513.110,00	23	74,19%	Rp9.402.610,00	4,88%	8	Rp183.110.500,00
4	Ditjen PEID	67	Rp1.631.689.116,00	19	28,36%	Rp572.186.433,00	35,07%	48	Rp1.059.502.683,00
5	Ditjen PPDT	24	Rp11.313.871,00	21	87,50%	Rp5.146.199,00	45,49%	3	Rp6.167.672,00
6	Ditjen PPKT	48	Rp5.263.965.364,00	36	75,00%	Rp1.022.876.768,00	19,43%	12	Rp4.241.088.596,00
7	BPSDM PM	66	Rp956.060.900,00	18	27,27%	Rp67.416.200,00	7,05%	48	Rp888.644.700,00
8	BPI	20	Rp36.620.985,00	16	80,00%	Rp36.620.985,00	100,00%	4	Rp0,00
	TOTAL D	309	Rp8.123.985.179,00	171	55,34%	Rp1.745.471.028,00	21,49%	138	Rp6.378.514.151,00

(sumber: Inspektorat Jenderal, diolah 2022)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menindaklanjuti Eks Kemnakertrans dan Eks Kementerian PDT yang diperkirakan sampai dengan Desember 2022

F.2. Penyelesaian Migrasi Roll Out SAKTI

Modul Persediaan:

proses migrasi data persediaan sepenuhnya sudah diproses sistem dengan tidak ada data anomali persediaan. Hasil migrasi modul persediaan tidak terdapat perbedaan data antara SAKTI dengan e-rekon. Seluruh satker sudah menutup periode per 31 Desember 2021. Namun masih terdapat satker yang belum mengupload berita acara migrasi (BAM) modul persediaan per 31 Desember 2022 yaitu Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas (350217).

Modul Aset Tetap :

Proses migrasi data aset tetap sepenuhnya sudah diproses sistem namun

masih terdapat data bmn anomali dengan status K3 pada beberapa satker. Data anomali BMN tersebut di normalisasi pada aplikasi SAKTI di tahun pembukuan 2022. Hasil migrasi modul aset tetap tidak terdapat perbedaan data antara SAKTI dengan e-rekon. Seluruh satker sudah melakukan finalisasi modul aset tetap per 31 Desember 2021. Namun masih terdapat 9 satker belum mengupload BAM modul aset tetap yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Riau (350152), Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas (350217), Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Boalemo (350415), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Morowali Utara (350474), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah (350264), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Timur (350395).

Modul GLP :

Proses migrasi modul GLP sepenuhnya sudah diproses sistem dan tidak terdapat selisih antara SAKTI dengan e-rekon. Terdapat satker belum mengupload BAM modul GLP yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Riau (350152), Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas (350217), Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Boalemo (350415), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Morowali Utara (350474), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah (350264), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Timur (350395).

F.3. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)

F.3.1. Pinjaman Luar Negeri

Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat anggaran dana pinjaman luar negeri sebesar Rp380.865.425.000,00 yang digunakan untuk program:

1. Program *Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery*/Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Ditjen PDP sebesar Rp16.692.728.000,00 dengan lender *World Bank* yang berfokus pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan pengembangan sistem akuntabilitas social dalam pembangunan Desa. P3PD Subkomponen 2B akan membiayai penguatan kader Desa, atau relawan masyarakat dan membiayai dukungan teknis Pusat Pembelajaran Masyarakat melalui kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ditingkat pusat hingga daerah. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui P3PD akan didukung lebih lanjut dan direplikasikan ke Desa lainnya dan akan terintegrasi secara digital dengan *platform* seperti Akademi Desa 4.0, Go Desa dan

Smart Village;

Alokasi dan realisasi anggaran P3PD Subkomponen 2B Direktorat pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2022 pada RO 6467.UBB.001 (Desa Digital yang dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD) sebesar Rp16.692.728.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp15.353.954.069,00 atau 91,97% terdapat pengembalian sebesar Rp559.696.930,00 sehingga realisasi menjadi sebesar Rp14.794.257.139,00 atau 88,63% pada semester II per tanggal 31 Desember 2022.

Capaian realisasi per 31 Desember 2022 Subkomponen 2B Direktorat pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan sebesar Rp14.794.257.139,00 atau 88,63% yang terdiri dari:

- a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Sosial meliputi kegiatan Perluasan Uji Coba Score Card Akuntabilitas Sosial di Desa sebesar Rp2.473.867.000,00, atau 14,82%, Pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat di Desa sebesar Rp1.229.663.601,00 atau 7,37%, Pendampingan Sekolah Lapang Desa Inklusif dan Akuntabilitas LSM Wilayah Tengah sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 11,98%, LSM Wilayah Timur sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 11,98%, Workshop Akselerasi Sinergitas Antar Stakeholder sebesar Rp3.423.349.680,00 atau 20,56%;
- b. Dukungan Manajemen meliputi gaji individual tim sekretariat dan dukungan kesekretariatan, perjalanan dinas dan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Sistem Akuntabilitas Sosial 2B sebesar Rp3.667.376.857,00 atau 21,96%

Capaian realisasi Semester II Subkomponen 2B Direktorat pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan sebesar Rp. 14.794.257.139,00 atau 88,63% dikarenakan ada kegiatan yang tidak terlaksana karena keterbatasan waktu.

2. Program *Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery*/Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di BPSDM yang memiliki pagu sebesar Rp113.090.554.000,00 yang terealisasi sampai dengan Desember 2022 adalah Rp104.864.144.785,00 atau 92,72 persen dimana kegiatan tersebut berada di:

- A. Puslat SDM dengan program Desa Digital yang dikembangkan melalui Platform Akademi Desa 4.0. Anggaran sebesar Rp19.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp18.314.562.198,00 dengan target output 30.000 orang. Rincian kegiatan antara lain:

- Pengembangan Online Video Platform Akademi Desa 4.0 dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.250.000.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp2.698.100.000,00
 - Produksi Konten Video Pembelajaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.499.708.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp6.455.049.129,00
 - Fasilitasi Pemanfaatan Akademi Desa Berkelanjutan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.747.756.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp3.687.444.816,00
 - Kampanye Informasi Pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.820.474.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp1.800.672.431,00
 - Dukungan Manajemen PIU Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.659.514.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp2.651.781.765,00
 - Monitoring dan Evaluasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.022.548.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp1.021.514.057,00
- B. Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan program Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang ditingkatkan kapasitasnya. Anggaran sebesar Rp94.090.554.000,00 dan realisasi sebesar Rp86.549.582.587,00 dengan target output 15.000 orang. Rincian kegiatan antara lain:
- Peningkatan Kapasitas TPP dengan alokasi anggaran sebesar Rp68.070.195.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp61.909.089.960,00
 - Dukungan Manajemen P3PD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.103.928.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp981.937.000,00
 - Dukungan Operasional Kantor P3PD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.064.150.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp880.496.850,00
 - Workshop Review dan Penyusunan Modul Peningkatan Kapasitas TPP P3PD dengan alokasi anggaran sebesar Rp584.222.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp573.684.000,00
 - Konsolidasi Master of Trainers (MOT) Peningkatan

Kapasitas TPP P3PD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.365.558.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp1.360.424.000,00

- TOT Peningkatan Kapasitas TPP - P3PD Metode Daring dengan alokasi anggaran sebesar Rp563.603.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp555.575.000,00
- TOT Peningkatan Kapasitas TPP - P3PD Region I Metode Tatap Muka dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.982.355.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp2.973.730.000,00
- TOT Peningkatan Kapasitas TPP - P3PD Region II Metode Tatap Muka dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.420.766.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp2.401.700.000,00
- TOT Peningkatan Kapasitas TPP - P3PD Region III Metode Tatap Muka dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.378.738.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp3.369.636.000,00
- TOT Peningkatan Kapasitas TPP - P3PD Region IV Metode Tatap Muka dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.128.172.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp4.119.391.000,00
- Penilaian Kebijakan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Bukti dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.134.338.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp1.119.362.274,00
- Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.495.155.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp1.137.874.500,00
- Rapat Koordinasi P3PD Sub Komponen 2A TA 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.128.251.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp1.124.140.000,00
- Evaluasi Peningkatan Kapasitas TPP dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.566.140.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp1.561.146.000,00
- Monitoring dan Evaluasi P3PD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp1.249.865.081,00
- Monitoring dan Evaluasi Pelatihan dengan alokasi

- anggaran sebesar Rp204.983.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp199.530.922,00
- Pengembangan Metode LMS (Learning Management System) dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 dan sudah realisasi sebesar Rp1.032.000.000,00
 - Learning Management System (Design) dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan tidak terealisasi.
3. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Sekretariat Jenderal dengan pagu anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan realisasi hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp14.894.772.338,00 atau 99,3 persen. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) pada Sekretariat Jenderal dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama antara lain sebagai berikut:
- Workshop Penyusunan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) P3PD Komponen 2 yang dilaksanakan tanggal 25 s.d. 29 Juli 2022 di Hotel Best Western Premier The Hive Kota Jakarta Timur.
 - Workshop Finalisasi Petunjuk Teknis Operasional (PTO) P3PD Komponen 2 PTO yang dilaksanakan tanggal 23 s.d. 26 Agustus 2022 di Bigland Hotel Kota Bogor.
 - Workshop Penyusunan Baseline Key Performance Indicator (KPI) Komponen 2 P3PD yang dilaksanakan tanggal 16 s.d. 18 November 2022 di Hotel Best Western Premier The Hive Kota Jakarta Timur.
 - Workshop Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 dalam Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Komponen 2 P3PD yang dilaksanakan pada tanggal 30 November s.d. 2 Desember 2022 di Hotel Best Western Premier The Hive Kota Jakarta Timur.
4. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di BPI dengan pagu anggaran sebesar Rp36.082.143.000,00 dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp31.009.483.348,00 atau 85,94 persen. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Untuk Pengembangan Desa Digital melalui *Smart Village* dimana PIU (*Project Implementing Unit*) adalah Pusdaing (Pusat Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) untuk program kegiatan sebagai berikut ;
- Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui *Smart Village* sebesar Rp12.007.448.930,00

- Jejaring Desa Cerdas sebesar Rp1.302.135.853,00
 - Program Duta Digital (*Digital Ambassador*) Rp4.248.510.234,00
 - Pengembangan Kapasitas sebesar Rp13.451.388.331,00
- Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp410.727.122,00.
5. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang sumber pendanaannya adalah Pinjaman dan Hibah Luar Negeri melalui IFAD pada Ditjen PEI-DDTT. Program TEKAD ini menysasar pada 5 (lima) provinsi yaitu Maluku Utara, Maluku, NTT, Papua dan Papua Barat. Tahun Anggaran 2021 dari Pinjaman Luar Negeri pada kegiatan TEKAD ini memiliki anggaran pagu belanja sebesar Rp200.000.000.000,00. Pagu Pinjaman Luar Negeri pada Tahun 2022 sebesar Rp200.000.000.000,00 sampai 31 Desember 2022 sudah terealisasi sebesar Rp131.624.839.232 atau sebesar 65,81%

F.3.2. Hibah Luar Negeri

Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat anggaran dana hibah luar negeri sebesar Rp18.420.308.000,00 yang digunakan untuk program:

1. Program Investing In Nutrition Early Years (INEY) di Ditjen PDP dengan tujuan memfasilitasi desa dalam mendukung pelaksanaan intervensi sensitif dan intervensi spesifikasi serta terjadinya konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa. Tahun 2022 Hibah Luar Negeri (INEY) sebesar Rp10.736.546.000,00. (Penjelasan lebih lanjut pada poin F.4. Laporan *Stunting*;
2. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang sumber pendanaannya adalah Pinjaman dan Hibah Luar Negeri melalui IFAD. Tahun Anggaran 2022 Hibah Luar Negeri pada kegiatan TEKAD ini memiliki anggaran pagu belanja sebesar Rp7.683.762.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2022 sudah terealisasi sebesar Rp7.683.762.000,00 atau 100 persen.

F.3.3. Hibah Langsung Luar Negeri

Hibah langsung luar negeri sebesar Rp4.590.722.000,00 yang digunakan untuk program:

1. Program *Out Of School Children Programme* yang merupakan hibah dari UNICEF terdapat pada Ditjen PDP dengan nomor SP3HL 01264. Program *Education* dengan terealisasi sebesar Rp3.368.150.370,00 dan Program *Social Policy* terealisasi sebesar Rp828.564.843,00.

F.4. Laporan Stunting

Data Alokasi Anggaran Tahun 2022 yang disampaikan oleh Kementerian

Desa PDTT meliputi Program/Kegiatan Stunting yang ada di Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan, meliputi:

- a. Kegiatan yang bersumber dari rupiah murni dengan anggaran semula sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk Rincian Output QDD.001 Desa yang Mendapatkan Penanganan Konvergensi Stunting, setelah refocusing anggaran menjadi sebesar Rp674.417.000,00
- b. Kegiatan yang bersumber dari hibah luar negeri melalui program INEY dengan Rincian Output BDC.003 Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan stunting (INEY) dengan jumlah anggaran sebesar Rp10.736.546.000,00

Kegiatan yang bersumber dari rupiah murni:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengamanatkan tanggungjawab utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai pilar ke-5 untuk melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting dengan target 90% Pemerintah Desa memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting dilihat dari tingkat konvergensi dan alokasi APBDesa untuk penurunan stunting (a.l. tingkat konvergensi dan ada alokasi APBDesa untuk stunting). Data Alokasi Anggaran Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Kementerian Desa PDTT pada Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan meliputi Program/Kegiatan dengan rincian output QDD.001 Desa yang Mendapatkan Penanganan Konvergensi Stunting yang bersumber dari rupiah murni APBN dengan Pagu Awal DIPA semula sebesar Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp674.417.000,00 setelah adanya refocusing.

Pada tanggal 15 Februari 2022 telah disampaikan kepada BAPPENAS adanya penyesuaian target menjadi 98 kelompok masyarakat setelah Automatic Adjustment Tahap 1. Sedangkan pada tanggal 20 Juni 2022 adanya Automatic Adjustment Tahap 2 menyebabkan anggaran percepatan Penurunan stunting di Desa. Data Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 setelah Automatic Adjustment Tahap 2 per tanggal 31 Desember 2022 yang disampaikan oleh Kementerian Desa PDTT meliputi Program/Kegiatan Stunting yang ada di Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan pada rincian output QDD.001.051 dengan jumlah anggaran sebesar Rp674.417.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp673.812.005,00 atau sebesar 99.91% meliputi kegiatan Sosialisasi Panduan Fasilitasi Konvergensi

Penurunan Stunting di Desa dengan alokasi kegiatan sebesar Rp418.140.000,00, dengan capaian realisasi Rp418.135.661,00, atau sebesar 100%, Sosialisasi Fasilitasi Perlindungan Sosial di Desa dengan alokasi kegiatan sebesar Rp8.500.000,00, dengan capaian realisasi sebesar Rp8.500.000,00, atau sebesar 100% dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa dengan alokasi kegiatan sebesar Rp247.777.000,00, dengan capaian realisasi sebesar Rp247.176.344,00, atau sebesar 99.76%.

Kegiatan yang bersumber dari hibah luar negeri melalui program INEY:

Pada Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapatkan tugas untuk memfasilitasi konvergensi penurunan stunting di Desa. Fasilitasi yang dilakukan diharapkan dapat mencapai beberapa hal berikut:

- Seluruh Desa bebas stunting tahun 2024;
- Seluruh Desa menandatangani komitmen percepatan penurunan stunting;
- Seluruh Desa mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting tahun 2024;
- 90% Kader Pembangunan Manusia (KPM) mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah tahun 2024;
- Seluruh Desa mengintegrasikan kegiatan pencegahan stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa mulai tahun 2022;
- 90% Desa meningkatkan alokasi Dana Desa untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif tahun 2024;
- 80% Desa melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting mulai tahun 2022;
- 90% Pemerintah Desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting pada tahun 2024;
- 90% Desa mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan pencegahan stunting.

Sementara itu, selain amanat Perpres 72, indikator kinerja Program INEY yang dibebankan kepada Kemendes PDTT sendiri adalah jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan konsolidasi data konvergensi pencegahan stunting Desa (minimal 50% Desa) dan jumlah Desa yang berkinerja baik dalam upaya percepatan penurunan stunting. Sebagai wujud pelaksanaan tugas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan

mendapat dukungan dari INEY Program, diperlukan unit khusus untuk membantu Kementerian dalam melakukan fasilitasi program baik di tingkat pusat maupun desa.

Sebagai wujud pelaksanaan tugas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan mendapat dukungan dari INEY Program, diperlukan unit khusus untuk membantu Kementerian dalam melakukan fasilitasi program baik di tingkat pusat maupun desa. Tujuan Program Investing In Nutrition Early Years (INEY) Adalah :

- a) Secara rutin akan memberikan data perkembangan pelaksanaan dan hasil konvergensi di Desa guna mendukung Kementerian/Lembaga lainnya didalam menyusun rencana dan mengembangkan strategi implementasi program.
- b) Memfasilitasi Pemerintah Desa dan mengorganisir masyarakat Desa guna mendukung proses pelaksanaan program yang dikembangkan oleh semua stakeholder.

Kegiatan utama Investing In Nutrition Early Years (INEY) mencakup:

- a) Mengoperasikan aplikasi eHDW dan dashboard kabupaten;
- b) Mengembangkan model fasilitasi desa merah stunting dan advokasi kebijakan;
- c) Penguatan literasi Desa tentang pencegahan stunting; serta
- d) Diseminasi kebijakan dan pembimbingan.

Pelaksanaan kegiatan utama sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menerapkan pendekatan desentralisasi-asimetris melalui metode benchmarking.

Mekanisme Program Investing In Nutrition Early Years (INEY) terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

1. Pengembangan aplikasi e-HDW berbasis Android dan Web Versi. 2.0;
2. Pembuatan Blended Learning untuk Peningkatan Kapasitas Pelaku di Desa (Modul Klasikal, Modul Daring, Modul dan Platform);
3. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Stakeholder Kecamatan untuk Fasilitasi Kegiatan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa;
4. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaku di Desa;
5. Dukungan Manajemen (Kontrak Individual dan Biaya Tambahan Kegiatan Investing In Nutrition Early Years (INEY) PIU Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan – Ditjen PDP).

Data Alokasi Anggaran Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa pada Triwulan 4 Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Kementerian Desa PDTT pada Direktorat Pengembangan Sosial Budaya

dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Program/Kegiatan dengan rincian output BDC.003 Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan stunting (INEY) bersumber dari hibah melalui Program INEY dengan Pagu DIPA sebesar Rp10.736.546.000,00 yang baru masuk on DIPA Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan per tanggal 18 Mei 2022. Data Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 per tanggal 31 Desember 2022 untuk Program/Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting melalui program INEY yang bersumber dari hibah pada rincian output BDC.003 dengan jumlah anggaran dengan Pagu DIPA sebesar Rp10.736.546.000,00 dan realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember tahun 2022 sebesar Rp8.945.836.842,00 atau 83,32% terdapat pengembalian sebesar Rp23.311.128,00 sehingga realisasi menjadi Rp8.922.525.714,00 atau 83,10% seperti dilihat dalam tabel berikut:

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT		Anggaran Semula	Anggaran Menjadi	Realisasi	%
6468. BCD. 003	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan stunting (INEY)	10.736.546.000	10.736.546.000	8.922.525.714	83,10%
	051 Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan stunting (INEY)	10.736.546.000	10.736.546.000	8.922.525.714	83,10%
	A Pelaksanaan Pencegahan Stunting (INEY)	7.854.026.000	7.854.026.000	6.354.639.431	80,91%
	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaku di Desa	5.635.640.000	5.635.640.000	5.168.574.925	91,71%
	Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Stakeholder Kecamatan untuk Fasilitasi Kegiatan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa	569.348.000	569.348.000	514.689.506	90,40%
	Pengembangan aplikasi Ehdw Berbasis Android dan Web Ver. 2.0	678.150.000	678.150.000	671.375.000	99,00%
	Pengembangan Blended Learning untuk Peningkatan Kapasitas Pelaku di Desa (Modul Klasikal, Modul Daring, Modul dan Platform)	970.888.000	970.888.000		0,00%
	B Dukungan Sekretariat PIU INEY	2.882.520.000	2.882.520.000	2.567.886.283	37,25%

Adapun permasalahan yang mempengaruhi penyerapan realisasi anggaran percepatan Penurunan stunting di Desa terlambatnya surat persetujuan Clearance untuk kegiatan Pembuatan Blended Learning untuk Peningkatan Kapasitas Pelaku di Desa (Modul Klasikal, Modul Daring, Modul dan Platform) di bulan November terpengaruhnya waktu pelaksanaan kegiatan yang melalui pihak ketiga baik waktu pelaksanaan lelang maupun pelaksanaan pekerjaan kegiatan dimaksud. Total alokasi anggaran kegiatan INEY T.A. 2022 yang tidak terserap sebesar Rp1.767.398.030,00 (16,46%).

F.5 Progres Usulan Hibah BMN

Terhadap Barang Milik Negara yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menindaklanjuti dengan proses penatausahaan aset tetap, persediaan dan aset tetap lainnya antara lain dengan melakukan proses hibah atas BMN yang berasal dari kegiatan/dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi serta persediaan yang direncanakan akan diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah. Total proses usulan hibah BMN per UKE I diuraikan sebagai berikut:

No.	UKE-1	USULAN HIBAH	PERSETUJUAN HIBAH
1	Ditjen PDP	17.179.046.819,00	17.179.046.819,00
2	Ditjen PEID	193.338.809.193,00	134.590.454.134,00
3	Ditjen PPDT	407.897.968.979,00	94.269.378.908,00
4	Ditjen PPKTrans	668.695.930.979,00	357.198.649.121,00
TOTAL		1.287.111.755.970,00	603.237.528.982,00

sumber : data diolah Biro Keuangan dan BMN

Hibah sesuai PMK 111/PMK.06/2016 dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang telah diproses dari awal tahun 2022 sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Usulan Hibah sebanyak 505 usulan senilai Rp1.287.111.755.970,00
- Persetujuan Hibah yang sudah disetujui oleh Sekretaris Jenderal sebanyak 355 usulan senilai Rp603.237.528.982,00
- Persetujuan Hibah yang sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan sebanyak 11 usulan senilai Rp180.272.311.100,00
- Usulan Hibah yang sedang diproses oleh Inspektorat Jenderal sebanyak 39 usulan senilai Rp77.352.061.681,00
- Usulan Hibah yang sedang diproses oleh Kementerian Keuangan sebanyak 6 usulan senilai Rp98.648.989.333,00
- Usulan Hibah yang dilakukan pengembalian dikarenakan berkas tidak lengkap sebanyak 94 usulan senilai Rp327.600.864.874,00

F.6 Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Monitoring Menu *To Do List* pada MONSAKTI

Berikut daftar *to do list* (hal-hal yang harus dilakukan oleh pengguna SAKTI) kelompok modul pelaporan:

No	Jenis	Jumlah Data	Modul
1	Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Persediaan	20	Persediaan
2	Ketidaksesuaian akun vs kode barang aset tetap/ATB	222	Aset Tetap

Ketidaksesuaian akun vs kode barang Persediaan dan Aset Tetap/ATB sudah ditindaklanjuti dengan melakukan reklasifikasi sesuai akun namun di *to-do list* MONSAKTI masih tercatat.

Jurnal Koreksi Audited

Berdasarkan hasil Nota Kesepakatan Final (NKF) pertemuan tiga pihak / *tripartit* antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi TA 2022 disepakati terdapat jurnal koreksi. Jurnal koreksi tersebut terdiri dari jurnal koreksi usulan satker dan jurnal usulan koreksi BPK. Jurnal koreksi terdiri dari beberapa jurnal sebagai berikut:

- a. Jurnal Likuidasi Satker Inaktif Bersaldo dan selisih rekon internal antara Laporan BMN dengan Laporan Keuangan;
- b. Jurnal Koreksi Beban Pegawai 2021 yang dibayar 2022;
- c. Jurnal Koreksi atas kesalahan catat nilai Piutang PNBPN atas sewa lahan parkir;
- d. Jurnal Koreksi pengakuan beban atas pekerjaan yang dilaksanakan Tahun 2022 namun pembayarannya di Tahun 2023;
- e. Jurnal Koreksi atas kurang/lebih pencatatan aset sesuai hasil *opname* fisik;
- f. Jurnal Koreksi atas kesalahan akun beban pemeliharaan yang seharusnya menjadi beban persediaan dan/atau menjadi aset tetap;
- g. Jurnal Koreksi atas pengakuan belanja dibayar di muka (*prepaid*) dan koreksi beban atas pekerjaan yang belum selesai yang dikerjakan di 2023;
- h. Jurnal Koreksi pengakuan setoran PNBPN satker inaktif ke satker aktif;
- i. Jurnal Koreksi eliminasi atas akun koreksi nilai aset yang terjadi karena salah pencatatan;
- j. Jurnal koreksi pengakuan kas berdasarkan sisa rekening satker per 31 Desember 2022;
- k. Jurnal koreksi atas pekerjaan yang BAST sudah selesai per 31 Desember 2022 namun masih tercatat sebagai belanja dibayar di muka (*prepaid*);

Rincian jurnal koreksi tersebut per Unit Kerja Eselon-1 di atas terlampir

dalam lampiran.

F.7 Informasi Data Tuntutan Hukum

Berdasarkan Berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Kemendesa PDTT kepada Inspektorat Jenderal Nomor 148/HK.11.02/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Informasi Data Tuntutan Hukum/ Gugatan Hukum Kepada Pemerintah Yang telah Berkekuatan Hukum tetap Tahun 2020 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal dengan menerbitkan surat Nomor 146/KU.06.01/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 kepada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Eks Ditjen PDT) perihal Hasil Koordinasi dengan Tim BPK RI, salah satu hal yang diinstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal adalah untuk mengungkapkan gugatan perbuatan melanggar hukum penyelenggara negara dalam hal pelaksanaan ganti rugi harta benda materil dan imateril pasca kerusuhan Maluku / Maluku Utara Tahun 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perkara yang menjadi perhatian adalah Perkara: 1950K/PDT/ 2016 Jo.Nomor:318/Pdt.G.Class.Action/2011/PNJkt.Pst yakni tuntutan Gugatan Class Action, Sdr. Hibani dkk yang memberikan kuasanya kepada Syamsuri Launa dkk, mewakili kelompok sebanyak 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) KK yang mengalami kerugian akibat kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999, dimana saat ini Kementerian Sosial akan membentuk Tim Panel yang akan membahas mekanisme pembayaran ganti rugi tersebut, sebagaimana amar Putusan.

Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam hal ini belum bisa mengakui tuntutan ganti rugi tersebut di Laporan Keuangan dikarenakan besaran nominal ganti rugi yang harus ditanggung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dalam hal ini didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal masih menunggu hasil pembahasan Tim Panel Kementerian Sosial.

Laporan Keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022 Audited serta Lampiran atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja (LKjKL) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022 juga disampaikan dalam bentuk softcopy sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan sebagaimana link/tautan dibawah ini:

Tautan:

<https://tinyurl.com/LKKEMENDESA2022AUDITED>

